

ADI SUSMIANTO

# EXIT STRATEGY

IMPLEMENTASI PADA PROYEK  
HIBAH LUAR NEGERI



WIDYA AKSARA PRESS

# EXIT STRATEGY

Implementasi Pada Proyek Hibah Luar Negeri

ADI SUSMIANTO

WIDYA AKSARA PRESS

# EXIT STRATEGY

## Implementasi Pada Proyek Hibah Luar Negeri



Widya Aksara Press

**Penulis:**

**Adi Susmianto**

**Editor:**

Gamin, Sri Harteti

Desain Cover & E-Book: Gamin

Ukuran : viii, 101 hlm, Uk: 21 x29,7 cm (A4)

ISBN: 978-602-99667-8-4 (PDF)

Cetakan Pertama: Agustus 2021

Hak Cipta 2021, pada Penulis

Copy Right @2020 by Widya Aksara Press

All Right Reserved

**Diterbitkan oleh:** WIDYA AKSARA PRESS (Anggota IKAPI No.349/Anggota Luar Biasa/JBA/2020)  
Komplek Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Jalan Mayjen Ishak Juarsa Gunung Batu Kotak Pos 141-Bogor 16118  
Telp (0251) 8323565, 8312841,  
email: [widyaaksara141@gmail.com](mailto:widyaaksara141@gmail.com), website: <http://pusdiklat.dephut.go.id>



## PENGANTAR KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LHK

Pendokumentasian ide dan pengalaman dalam karya literasi akan membuat ide dan karya tersebut dapat tersimpan lama dan tersebar lebih luas. Upaya-upaya tersebut merupakan pekerjaan mulia yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat literasi di Indonesia yang saat ini berada pada urutan ke – 62 dari 70 negara. Selain itu produksi karya dalam bentuk buku juga layak didorong. Hal ini akan berkontribusi terhadap peningkatan rasio produksi buku di Indonesia yang saat ini baru mencapai 0.09 (1 produksi buku ditunggu oleh 90 orang per tahun). Dimana standar UNESCO rasio itu adalah minimal 3 buku/orang/tahun. Sementara rasio untuk negara-negara Asia Timur (Korea, Jepang, dan China) adalah 20 buku/orang/tahun. Pusat Diklat SDM LHK sangat berkomitmen untuk berkontribusi dalam dunia literasi melalui pendirian **Widya Aksara Press** sebagai penerbit instansional kami.

Penerbitan buku "**Exit Strategy – Implementasi Pada Proyek Hibah Luar Negeri**" gagasan Saudara Adi Susmianto – Widyaiswara Ahli Utama pada Pusat Diklat SDM LHK melalui badan penerbitan kami adalah sebuah langkah nyata untuk mewujudkan karya literasi. Adi Susmianto ingin memberikan pemahaman khususnya kepada para perencana kegiatan tentang bagaimana merancang suatu exit strategy terhadap suatu kegiatan atau proyek. Penulis membagi prioritas kegiatan dalam jangka pendek (1 – 3 tahun) dan jangka panjang (1 – 5 tahun) untuk masing-masing kawasan konservasi. Selain itu komitmen stakeholder utama dan alternatif pendanaan berkelanjutan menjadi hal yang penting untuk dicatat.

Karya tertulis ini adalah bentuk nyata produksi profesi widyaiswara yang diperankan penulis untuk meningkatkan profesionalismenya. Oleh karena itu, kami sebagai lembaga diklat sangat mendukung penerbitan buku ini sebagai wahana untuk menyampaikan gagasan dan menyebarkan informasi. Selamat membaca, dan ditunggu karya-karya berikutnya.

Bogor, Agustus 2021

Plh. Kepala Pusat,

Puji Iswari, S.Hut., M.Si.





## KATA PENGANTAR

*Exit strategy* seringkali tidak cukup dipersiapkan dan direncanakan dengan baik untuk mengantisipasi berakhirnya suatu kegiatan atau proyek yang memiliki batas waktu dalam implementasinya. Akibatnya banyak kegiatan atau proyek, terutama proyek-proyek dari dana hibah luar negeri, yang tidak jelas arah keberlanjutannya pasca berakhirnya kegiatan. Siapa yang akan melanjutkan, kegiatan apa yang masih perlu dilanjutkan. Pendanaan apa saja yang diperlukan untuk melanjutkan kegiatan perlu direncanakan atau dipersiapkan sesaat setelah kegiatan atau proyek tersebut berakhir.

Buku ini dipersiapkan untuk memberikan pemahaman terutama kepada para perencana kegiatan tentang bagaimana merancang suatu *exit strategy* terhadap suatu kegiatan atau proyek. Guna memudahkan pembaca memahami *exit strategy*, buku ini disusun tidak dalam kerangka membahas atau memahami teori *exit strategy* itu sendiri, namun lebih kepada implementasi *exit strategy* pada suatu kegiatan atau proyek. Namun demikian untuk mengawali implementasi *exit strategy* ini dirumuskan kerangka pikir yang menggambarkan secara menyeluruh rangkaian proses dan tahapan implementasi *exit strategy* yang relevan dengan suatu kegiatan atau proyek yang menjadi obyek kajian.

Proyek yang menjadi obyek implementasi *exit strategy* yaitu "*Enhancing the Protected Area System in Sulawesi (E-PASS) for Biodiversity Conservation 2015-2020*" yang didanai oleh *Global Environment Fund (GEF)* bekerjasama dengan *United Nation Development Program (UNDP)*. Atas kerja sama dengan pengelola proyek, kajian implementasi *exit strategy* ini berlangsung selama 4 (empat) bulan yang dimulai sejak Juni sampai dengan September 2020 dengan melibatkan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, 3 Unit Pelaksana Teknis (Taman Nasional Lore Lindu, Taman Nasional Bogani Wana, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara), akademisi, tim ahli dan para pakar yang relevan.

Output penting dari implementasi *exit strategy* dapat dirumuskan kegiatan yang bersifat prioritas, peta stakeholders kunci, dan alternatif pendanaan dalam rangka pemandirian keberlanjutan proyek dimaksud. Untuk memudahkan implementasinya, *exit strategy* ini telah membagi kegiatan prioritas menjadi kegiatan yang bersifat jangka pendek (1-3 tahun), yaitu kegiatan yang operasionalisasinya paling lambat dapat terlaksana 3 tahun setelah berakhirnya proyek dan bersifat jangka panjang (1-5 tahun). Di samping itu, *exit strategy* ini dapat merumuskan mekanisme operasionalisasi kegiatan prioritas, komitmen stakeholders penting, dan identifikasi alternatif pendanaan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan.

Penulis





## KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat menyelesaikan proyek “*Enhancing the Protected Area System in Sulawesi (E-PASS) for Biodiversity Conservation* selama 5 tahun (2015-2020) dengan lancar. Atas arahan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati serta *teamwork* yang solid dari seluruh project management E-PASS (CTA, CO, dan AA), FCU (FC, PAs, CEs, AFA, dan OC) di Taman Nasional (TN) Lore Lindu, TN Bogani Nani Wartabone, dan BKSDA Sulawesi Utara yang didukung oleh para pemangku kepentingan di tingkat tapak, maka seluruh kegiatan dapat terkoordinasi dan dilaksanakan dengan capaian predikat baik berdasarkan *Project Implementation Report (PIR, 2020)* oleh GEF-UNDP.

Exit strategy dirancang sebagai strategi pengakhiran proyek untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan proyek yang dinilai prioritas yang didukung oleh stakeholders dan alternatif pendanaan sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara mandiri tidak tergantung lagi pada pendanaan E-PASS yang telah berakhir.

Kami mengharapkan kegiatan-kegiatan prioritas exit strategy yang difasilitasi Tim Ahli, benar-benar dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi penguatan sistem pengelolaan di ketiga kawasan konservasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penyangga.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas hasil kerja yang komprehensif dari Tim Ahli, Tim Pendamping Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air BAPPENAS serta yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) project E-PASS.

National Project Manager E-PASS Project,

Ttd,

Ir. M. Arief Toengkagie



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kontribusi proyek "*Enhancing the Protected Area System in Sulawesi (E-PASS) for Biodiversity Conservation*" yang didanai oleh UNDP-GEF dari tahun 2015 – 2020 sangat signifikan meningkatkan kinerja Taman Nasional (TN.) Lore Lindu, TN. Bogani Nani Wartabone dan KPHK Tangkoko. Selama lima tahun, proyek E-PASS memperkuat efektifitas pengelolaan dan keberlanjutan pendanaan sistem kawasan konservasi di tiga *site project* dalam menghadapi ancaman *biodiversity loss* melalui peningkatan tata kelola kerjasama dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Berbagai kegiatan diimplementasikan untuk memperkuat sistem pengelolaan kawasan konservasi dimaksud dan beberapa kegiatan dinilai perlu dilanjutkan setelah proyek E-PASS berakhir melalui mekanisme *exit strategy*. Menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness and Growth*) pada enam kriteria exit strategy yang mempunyai keterkaitan dan kesepadanan dengan 16 indikator E-PASS project untuk menetapkan kegiatan prioritas, stakeholder analysis untuk menetapkan stakeholder utama berikut komitmennya dan potensi pendanaan berkelanjutan maka ditetapkan kegiatan prioritas exit strategy jangka pendek (1-3 tahun) dan jangka panjang (1-5 tahun) untuk masing-masing kawasan konservasi.

Kegiatan prioritas exit strategy jangka pendek dan jangka panjang di ketiga kawasan konservasi didominasi oleh kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) dan pengembangan usaha ekowisata, agribisnis, home industry dan kegiatan konservasi/pemulihan ekosistem yang lokal spesifik di wilayah masing-masing kawasan konservasi. Komitmen pengelola TN/KPHK, KKM, pendamping, Pemerintah Desa/Kecamatan dan Dinas-dinas Kabupaten terkait perlu terus dipertahankan. Untuk kegiatan jangka pendek yang menekankan pembangunan fisik dapat diupayakan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dana Desa, dana dengan merealisasikan Perjanjian Kerjasama dengan mitra dan dana in-kind masyarakat. Untuk jangka panjang dapat diperoleh dari Badan Layanan Umum (BLU), BLU Daerah (BLUD), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) maupun sumber lain dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan hibah yang kesemuanya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku yang dipersyaratkan oleh donor. Untuk kegiatan



internal kawasan konservasi, implementasi *Resort Based Management* (RBM), monitoring biodiversitas, khususnya spesies kunci, SMART Patrol dan operasi penanggulangan pencurian Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) serta peningkatan kapasitas staf TN/KPHK masih perlu dilanjutkan.

Proyek E-PASS menghasilkan beberapa legacy yang perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah prioritas dalam kegiatan exit strategy dan terus dipromosikan kepada para stakeholder. Adapun legacy tersebut adalah: 1. Mendorong minimum 50% resort mengimplementasikan RBM secara penuh, 2. Telah tersusunnya RANPERDA Kota Bitung tentang perlindungan dan pengendalian TSL, 3. Terbangunnya sistem monev biodiversitas pada tiga *site project*, 4. Teridentifikasi valuasi ekonomi untuk masing-masing kegiatan di 3 *project sites*, 5. Terbangunnya model pendanaan konservasi melalui pemanfaatan HHBK aren di TNBNW, 6. Terbangunnya model pendanaan konservasi melalui pengembangan ekonomi alternatif masyarakat penyangga, 7. Terbangunnya model pendanaan konservasi melalui pemanfaatan limbah plastik di KPHK Tangkoko, 8. Terbentuknya mekanisme partisipatif penegasan batas kawasan dengan penanaman MPTS di tiga project site, 9. Penurunan tren gangguan di kawasan konservasi berkisar antara 15-20% di 3 project site, 10. Peningkatan Environment Health Index (EHI) di tiga project site sebesar 75%, 11. Ditetapkannya satu Perdes dan tersusunnya 10 Ranperdes Daerah Penyangga, 12. Terbentuknya minimal 35% dari 46 KKM yang dapat direplikasikan ke tempat lain, dan 13. Mendorong pendidikan konservasi melalui Sekolah Alam Ngata Toro di TNLL.

Capaian yang demikian signifikan tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan tujuan semula proyek E-PASS, ini merupakan kewajiban pengelola kawasan di tiga *project sites* untuk mempertahankan, mendampingi dan melanjutkan kegiatan-kegiatan tersebut dengan dukungan stakeholders kunci dan alternatif pendanaan terutama yang berasal dari kegiatan-kegiatan ekonomi alternatif masyarakat daerah penyangga.





## DAFTAR ISI

PENGANTAR KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LHK	i
KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
<b>A. Latar Belakang</b>	1
<b>B. Tujuan dan Sasaran</b>	3
<b>C. Ruang Lingkup</b>	4
II. METODE PENDEKATAN	6
<b>A. Kerangka Pikir</b>	6
<b>B. Menetapkan Kriteria dan Indikator</b>	8
<b>C. Proses Identifikasi Kegiatan</b>	13
<b>D. Menetapkan Kegiatan Prioritas</b>	14
<b>E. Proses Focus Group Discussion</b>	17
III. HASIL DAN PEMBAHASAN	18
<b>A. Kriteria dan Indikator Exit Strategy</b>	18
<b>B. Kegiatan Prioritas</b>	24
<b>C. Stakeholders Potensial</b>	39
<b>D. Sumber Pendanaan Alternatif</b>	56
IV. SARAN-SARAN DAN REKOMENDASI	64
<b>A. Saran-saran</b>	64
<b>B. Rekomendasi</b>	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kriteria dan indikator <i>exit strategy</i> proyek E-PASS	19
Tabel 2. Keterkaitan antara kriteria <i>exit strategy</i> dengan indikator E-PASS	24
Tabel 3. Kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> proyek E-PASS pada Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Prioritas Jangka Pendek (1 – 3 tahun)	25
Tabel 4. Kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> proyek E-PASS pada Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Prioritas Jangka Panjang (1 – 5 tahun)	27
Tabel 5. Kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> proyek E-PASS pada Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Prioritas Jangka Pendek (1 – 3 tahun)	29
Tabel 6. Kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> proyek E-PASS pada Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Prioritas Jangka Panjang (1 – 5 tahun)	31
Tabel 7. Kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> proyek E-PASS pada KPHK Tangkoko Prioritas Jangka Pendek (1 – 3 tahun)	33
Tabel 8. Kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> proyek E-PASS pada KPHK Tangkoko Prioritas Jangka Panjang (1 – 5 tahun)	35
Tabel 9. Kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> pendanaan berkelanjutan proyek E-PASS Prioritas Jangka Pendek (1 – 3 tahun)	37
Tabel 10. Kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> pendanaan berkelanjutan proyek E-PASS Prioritas Jangka Panjang (1–5 tahun)	38
Tabel 11. Peran <i>stakeholders</i> dalam implementasi SBSN	41
Tabel 12. Peran <i>stakeholders</i> dalam implementasi BLU, BPD LH dan BLUD	42
Tabel 13. Kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> dan <i>stakeholders</i> untuk pemberdayaan masyarakat di TN. Lore Lindu	44
Tabel 14. <i>Stakeholder mapping</i> kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> di TN Lore Lindu	46
Tabel 15. Kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> dan <i>stakeholders</i> untuk pemberdayaan masyarakat di TN. Bogani Nani Wartabone	49
Tabel 16. <i>Stakeholders mapping</i> kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> di TN Bogani Nani Wartabone	51
Tabel 17. Kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> dan <i>stakeholders</i> untuk pemberdayaan masyarakat di KPHK Tangkoko	52
Tabel 18. <i>Stakeholders mapping</i> kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> di KPHK Tangkoko	55
Tabel 19. Keterkaitan antara Prioritas Kegiatan, Stakoholders Kunci dan Alternatif Pendanaan Project EPASS	69



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka pikir penetapan <i>exit strategy</i> proyek E-PASS	6
Gambar 2. Penetapan indikator kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> berbasis <i>stakeholders</i>	13
Gambar 3. Kegiatan exit strategy jangka pendek di TNLL: (A) Implementasi RBM; (B) Pendampingan masyarakat; (C) Wisata air panas Desa Lawua; (D) Usaha kerajinan tangan	26
Gambar 4. Kegiatan exit strategy jangka panjang di TNLL: (A) Monitoring spesies kunci; (B) Patroli pengamanan kawasan; (C) Ekowisata maleo Desa Pakuli Utara; (D) Pengembangan peternakan	28
Gambar 5. Kegiatan exit strategy jangka pendek di TNBNW: (A) Penanaman pohon buah-buahan di batas kawasan; (B) Pengembangan aren secara kolaboratif; (C) Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat; (D) Pemulihan ekosistem oleh masyarakat	30
Gambar 6. Kegiatan exit strategy jangka panjang di TNBNW: (A) Pelatihan Sablon di TNBNW; (B) Implementasi RBM; (C) HHBK yang dapat dikembangkan BUMDES; (D) Ekowisata yang dapat dikembangkan BUMDES	32
Gambar 7. Kegiatan exit strategy jangka pendek di KPHK Tangkoko: (A) Implementasi SMART Patrol RBM; (B) Pembahasan Ranperda PPTSL Kota Bitung; (C) Pengembangan perikanan bioflog; (D) Pengembangan wisata bahari	34
Gambar 8. Kegiatan exit strategy jangka panjang di KPHK Tangkoko: (A) Pemulihan ekosistem partisipatif; (B) Pembinaan habitat maleo; (C) Monitoring monyet Yaki; (D) Pemanfaatan sampah plastik	36
Gambar 9. Kegiatan exit strategy jangka pendek terkait pendanaan berkelanjutan: (A) Pemanfaatan air di TNLL; (B) Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di KPHK Tangkoko; (C) Pengembangan gula aren di TNBNW; (D) Ekowisata berbasis masyarakat di TNLL	38
Gambar 10. Pengaruh dan kepentingan <i>stakeholders</i> pada kegiatan <i>exit strategy capacity building</i> di TN Lore Lindu	45
Gambar 11. Pengaruh dan kepentingan <i>stakeholders</i> pada kegiatan <i>exit strategy</i> pengembangan ekowisata di TN Lore Lindu	47
Gambar 12. Pengaruh dan kepentingan stakeholders pada kegiatan exit strategy pengembangan agribisnis dan home industry di TN Lore Lindu	48
Gambar 13. Pengaruh dan kepentingan stakeholders pada kegiatan exit strategy usaha capacity building di TN Bogani Nani Wartabone	49
Gambar 14. Pengaruh dan kepentingan stakeholders pada kegiatan exit strategy usaha ekowisata, konservasi, home industry dan agribisnis di TN Bogani Nani Wartabone	50
Gambar 15. Pengaruh dan kepentingan stakeholders pada kegiatan exit strategy capacity building di KPHK Tangkoko	53
Gambar 16. Pengaruh dan kepentingan stakeholders pada kegiatan exit strategy pengembangan bidang usaha di KPHK Tangkoko	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisioner Exit Strategy Proyek Epass 2015-2020	71
Lampiran 2. Sustainability of The Sulawesi PA System	87
Lampiran 3. Penetapan kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> proyek E-PASS Unit : Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu	91
Lampiran 4. Penetapan kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> proyek E-PASS Unit : Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	94
Lampiran 5. Penetapan kegiatan prioritas <i>exit strategy</i> proyek E-PASS Unit : KPHK TANGKOKO	96
Lampiran 6. Penetapan kegiatan prioritas pendanaan berkelanjutan <i>exit strategy</i> proyek E-PASS	97

## I. PENDAHULUAN

Burung Maleo *Macrocephalon maleo*

Sumber : Ardin Mokodompit





## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejalan dengan peranan strategis biodiversitas untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (CBD, 2020; WWF, 2020), momentum konservasi biodiversitas Sulawesi sangat penting untuk menjamin pemanfaatan sumber daya hayati di masa depan secara lestari sejalan dengan paradigma pembangunan ekonomi hijau yang memfokuskan pembangunan berbasis daya dukung lingkungan (LIPI, 2013). Biodiversitas Sulawesi sebagai bagian dari Bioregion Wallacea, yang dikenal sangat kaya mulai tingkat ekosistem, spesies campuran Asia dan Australia, dan plasma nutfah dengan tingkat endemisitas yang tinggi (IBSAP, 2016), sudah terbukti dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, dan potensial untuk digunakan meningkatkan pembangunan regional Sulawesi yang berbasis sumber daya hayati. Kekayaan dan keunikan biodiversitas Sulawesi ini sudah sepatutnya dikelola secara berkelanjutan dan dicegah dari kepunahan (biodiversity loss).

Kenyataan menunjukkan bahwa tekanan terhadap kawasan hutan, termasuk kawasan konservasi di Sulawesi, masih cukup tinggi. Fenomena kerusakan hutan berupa perambahan hutan, penebangan liar, pertambangan liar, pencurian Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan bahkan perdagangan TSL di luar kawasan hutan masih sering terjadi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh *The Nature Conservancy* (TNC), hanya 30% hutan Sulawesi dalam kondisi baik sampai tahun 2008 dan 3,5 juta hektar hutan telah hilang dari tahun 1980 sampai tahun 2008 (TNC, 2010). Kerusakan hutan Sulawesi sangat mengkhawatirkan mengingat ekosistem hutan dengan endemisitas satwa yang tinggi tersebut sangat rentan terhadap kepunahan. Terlebih, sebagian kecil masyarakat di sekitar hutan masih mempunyai kebiasaan memanfaatkan daging satwa yang diburu dari hutan sebagai sumber pangan hewani. Oleh karena itu, deforestasi, degradasi hutan, fragmentasi habitat dan kepunahan biodiversitas harus dicegah, termasuk di KAWASAN KONSERVASI.

Tata kelola KAWASAN KONSERVASI belum sepenuhnya memadai merespon dinamika pembangunan sektor lain dan masyarakat sekitar hutan yang masih sangat



tergantung pada sumber daya hutan. Di samping itu, kapasitas pengelola KAWASAN KONSERVASI dan sumber pendanaan masih terbatas. Penguatan sistem KAWASAN KONSERVASI di Sulawesi, dengan demikian, menjadi sangat mendesak untuk mengatasi permasalahan pengelolaan KAWASAN KONSERVASI dan diharapkan dapat diterapkan ke KAWASAN KONSERVASI lain di Sulawesi.

Untuk itu, *United Nations Development Programme (UNDP) – Global Environment Facilities (GEF)* memfasilitasi Proyek *Enhancing the Protected Area System in Sulawesi (E-PASS) for Biodiversity Conservation* di tiga lokasi kawasan konservasi, yakni Taman Nasional Lore Lindu - Sulawesi Tengah, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone - Sulawesi Utara dan Gorontalo, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tangkoko - Sulawesi Utara, sebagai representasi kawasan konservasi di Sulawesi. Tujuan proyek ini adalah untuk memperkuat keefektifan dan keberlanjutan sistem finansial kawasan konservasi untuk merespon ancaman saat ini terhadap biodiversitas yang signifikan pengaruhnya secara global. Tujuan tersebut akan dicapai melalui tiga komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yakni: Komponen 1. Peningkatan kapasitas sistemik dan kelembagaan untuk perencanaan dan pengelolaan sistem kawasan konservasi di Sulawesi; Komponen 2. Keberlanjutan pendanaan sistem kawasan konservasi di Sulawesi; dan Komponen 3. Pengurangan ancaman dan pengelolaan bersama di kawasan konservasi dan Daerah Penyangga (UNDP-GEF, 2015). Ketiga komponen tersebut selanjutnya dielaborasi menjadi 15 indikator E-PASS, sejumlah 6 indikator untuk Komponen 1, 3 indikator untuk Komponen 2, dan 6 indikator untuk Komponen 3, sesuai dengan pelingkupan (coverage) dari masing-masing komponen untuk merespon isu- isu/permasalahan penguatan sistem kawasan konservasi. Berbagai kegiatan kemudian dirancang dan dilaksanakan untuk masing-masing indikator E-PASS tersebut dan capaian masing-masing kegiatan (output) diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan dibandingkan dengan baseline capaian. Kegiatan dapat berjangka satu tahun atau lebih (multiyears). Durasi proyek E-PASS ini selama lima tahun mulai dari Maret 2015 dan diperpanjang selama 9 bulan sehingga berakhir pada bulan Desember 2020.



Keberlanjutan kegiatan yang dinilai sangat strategis untuk mendukung keefektifan pengelolaan kawasan konservasi menjadi tantangan tersendiri setelah pengakhiran proyek E-PASS pada bulan Desember 2020. Exit strategy sebagai keberlanjutan proyek dapat dilanjutkan dengan memanfaatkan potensi yang ada menjadi sangat penting untuk proses pembangunan wilayah penyangga kawasan konservasi (Zelege, 2014). Begitu juga, pentingnya keberlanjutan pendanaan kegiatan untuk melindungi investasi yang telah dikeluarkan selama proyek perlu dirancang dalam exit strategy (Blinder et al. 2013). Sesungguhnya, proyek E-PASS telah meletakkan landasan yang kuat untuk penguatan sistem pengelolaan kawasan konservasi di Sulawesi. Dalam kurun waktu lima tahun, pelaksanaan proyek E-PASS dirasakan manfaatnya bagi perbaikan manajemen kawasan konservasi, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian kawasan konservasi dan peningkatan akses dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang usaha di daerah penyangga yang didukung oleh program hibah skala kecil (Micro Capital Grant). Beberapa kegiatan telah mencapai realisasi 100% namun masih diperlukan keberlanjutannya oleh pengelola kawasan konservasi. Di sisi lain, beberapa kegiatan belum dapat diselesaikan sepenuhnya, namun kegiatan tersebut sangat strategis untuk dilanjutkan.

Untuk melanjutkan kegiatan prioritas tanpa dukungan proyek merupakan tantangan tersendiri. Pemilihan kegiatan-kegiatan prioritas, penyiapan sumber daya manusia dan kondisi pemungkin (*enabling conditions*) yang dipadukan dengan dukungan stakeholders dan sumber daya, termasuk pendanaan menjadi faktor penentu peningkatan pengelolaan kawasan konservasi. Strategi pengakhiran proyek yang ditransformasikan menjadi program dan kegiatan mandiri yang berkelanjutan menjadi krusial dan perlu dipersiapkan dengan baik.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Strategi pengakhiran proyek E-PASS yang ditransformasikan menjadi program dan kegiatan mandiri yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi sebagai pendukung utama kelestarian kawasan konservasi tidak terlepas dari





dukungan para pihak dan ketersediaan pendanaan yang berkelanjutan. Untuk itu, tujuan *exit strategy* proyek E-PASS ini adalah:

1. Penetapan kegiatan prioritas yang perlu dilanjutkan setelah proyek E-PASS berakhir berdasarkan analisis capaian proyek dan hasil penapisan menggunakan kriteria dan indikator *exit strategy* yang dibangun;
2. Penentuan para pihak (stakeholders kunci) dalam keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi serta mengidentifikasi komitmen dan potensial dukungan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan pengelolaan kawasan konservasi mandiri;
3. Merekomendasikan bentuk-bentuk pendanaan berkelanjutan pengelolaan kawasan konservasi dan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan pendanaan tersebut.

Sasaran *exit strategy* proyek E-PASS ini adalah terwujudnya keberlanjutan yang sangat kuat (*very strong sustainability*) dalam sistem kawasan konservasi di Sulawesi di tiga lokasi proyek, yaitu TN Lore Lindu, TN Bogani Nani Wartabone, dan KPHK Tangkoko dengan tercapainya integritas ekosistem yang didukung oleh kohesi sosial dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Output *exit strategy* proyek E-PASS ini adalah: 1. perangkat kriteria dan indikator *exit strategy* proyek E-PASS yang digunakan sebagai alat (*tool*) untuk menapis kegiatan prioritas; 2. Daftar kegiatan prioritas jangka pendek (1-3 tahun) dan jangka panjang (1-5 tahun) untuk ke tiga kawasan konservasi; 3. Peta stakeholders dan bentuk komitmen/dukungan serta kontribusinya terhadap penguatan sistem kawasan konservasi; dan 4. Skema pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan ketiga kawasan konservasi.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup laporan *exit strategy* ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan proyek E-PASS tahun 2015-2020 yang prioritas untuk dilanjutkan setelah proyek E-PASS berakhir yang dinilai oleh pengelola ketiga kawasan konservasi, tim ahli dan panelis E-PASS. Keberlanjutan kegiatan-kegiatan prioritas E-PASS tersebut dapat memperkuat sistem pengelolaan kawasan konservasi di Sulawesi pada umumnya, dan di ketiga lokus proyek E-PASS. Di samping penguatan sistem pengelolaan kawasan



konservasi, transformasi kegiatan-kegiatan prioritas E-PASS tersebut menjadi program/ kegiatan mandiri di ketiga kawasan konservasi dapat meningkatkan kinerja institusi untuk mencapai tujuan konservasi biodiversitas.

Implementasi kegiatan-kegiatan prioritas E-PASS tidak dapat berlangsung tanpa dukungan pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik para pemangku kepentingan utama (*primary stakeholders*), internal pengelola kawasan konservasi dan pihak-pihak eksternal, maupun pemangku kepentingan lainnya (*secondary stakeholders*) yang memberi dukungan terhadap keberlangsungan pengelolaan kawasan konservasi. Memetakan pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interests*) dari keseluruhan pemangku kepentingan tersebut penting sebagai dasar untuk membangun komitmen para pemangku kepentingan dalam memformulasikan strategi pelaksanaan kegiatan kawasan konservasi. Analisis stakeholders, dalam hal ini, menjadi ruang lingkup laporan *exit strategy*.

Penguatan sistem pengelolaan kawasan konservasi tidak terlepas dari pendanaan berkelanjutan (*sustainable financing*), mencakup sumber pendanaan publik (pemerintah dan negara donor), pendanaan swasta (*private sectors financing*), dan pendanaan inisiatif dari masyarakat. Sumber-sumber pendanaan, model-model bisnis dikaitkan dengan perusahaan konservasi (*conservation enterprises*), dan kondisi-kondisi pemungkin (*enabling conditions*) pendanaan menjadi ruang lingkup laporan ini. Skema pendanaan lebih difokuskan pada penguatan bisnis masyarakat sekitar hutan yang telah terbentuk kelembagaan sosial dan ekonominya dalam bentuk Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM).

Mengartikulasikan ketiga fokus laporan *exit strategy* ini, outline laporan ini adalah sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN (A. Latar Belakang; B. Tujuan; dan C. Ruang Lingkup)
- II. METODE PENDEKATAN (A. Kerangka Pikir; B. Menetapkan Kriteria dan Indikator; C. Proses Identifikasi Kegiatan; D. Menetapkan Kegiatan Prioritas; dan E. Proses *Focus Group Discussion*)
- III. *HASIL DAN PEMBAHASAN* (A. Kriteria dan Indikator *Exit Strategy*; B. Kegiatan Prioritas; C. Stakeholderss Potensial; D. Sumber Pendanaan Alternatif)
- IV. SARAN DAN REKOMENDASI (A. Saran-saran; B. Rekomendasi)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## II. METODE PENDEKATAN

Monyet Yaki Sulawesi *Macaca nigra*

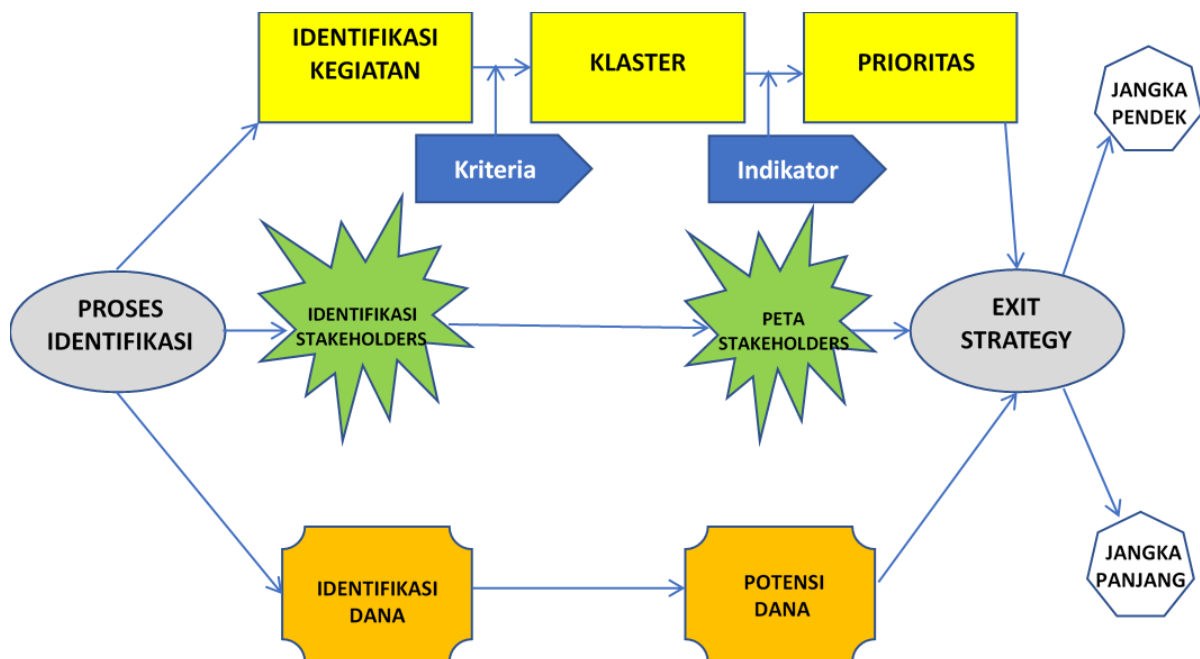
Sumber : Ardin Mokodompit



## II. METODE PENDEKATAN

### A. Kerangka Pikir

Kerangka pikir exit strategy proyek E-PASS diawali dengan proses identifikasi, mencakup identifikasi kegiatan, stakeholders dan pendanaan. Ketiga komponen tersebut saling terkait satu sama lain dan sangat menentukan keberhasilan exit strategy. Seluruh kegiatan yang dilakukan selama proyek E-PASS dikelompokkan berdasarkan rumpun (klaster) kegiatan yang mengacu pada salah satu kriteria exit strategy. Setiap kegiatan hanya mengacu pada satu kriteria exit strategy. Setelah pengklasteran kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan prioritas kegiatan yang didasarkan pada penilaian atas dasar indikator exit strategy yang dibangun dan dilanjutkan dengan pembobotan proses penyelesaian masalah dengan metode USG (Urgency, Seriousness and Growth). Setiap kriteria memiliki beberapa indikator yang digunakan sebagai parameter untuk menilai keberhasilan atau kinerja suatu kegiatan. Proses penentuan kegiatan prioritas ditampilkan dalam Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kerangka pikir penetapan *exit strategy* proyek E-PASS

Dalam metode USG, pembobotan dapat dilakukan pada setiap kegiatan/masalah atau kegiatan yang didasarkan pada tingkat kriteria. Untuk penilaian yang lebih







mendetail, pembobotan dapat dilakukan untuk masing-masing kegiatan pada tingkat indikator.

Sekali kegiatan prioritas ditentukan, proses identifikasi stakeholders potensial harus dilakukan untuk menilai kelompok, organisasi atau perorangan mana yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses identifikasi tersebut dilanjutkan dengan pemetaan stakeholders untuk memilah stakeholders kunci (primary stakeholders), baik internal maupun eksternal dan stakeholders pendukung (secondary stakeholders) atas dasar pengaruh (power) dan kepentingan (interests) yang diperoleh dari hasil analisis stakeholders. Dalam pemetaan tersebut juga memperhatikan potensi kolaborasi dan kemungkinan potensi konflik di antara stakeholders.

Kegiatan prioritas tidak dapat dilaksanakan jika sumber daya, utamanya dana, tidak tersedia. Identifikasi dana dan potensi dana tersebut menjadi penting mengingat kegiatan pengelolaan kawasan konservasi selama ini masih bertumpu pada dana APBN. Proyek E-PASS yang dibiayai oleh Hibah Luar Negeri (UNDP/GEF) mempunyai batas waktu, sementara kegiatan E-PASS yang telah berakhir secara keproyekan dan dinilai sangat strategis dan urgen untuk dilanjutkan menghadapi kendala pembiayaan. Oleh karena itu, pendanaan alternatif berkelanjutan perlu disediakan agar program/ kegiatan yang menunjang pengelolaan kawasan konservasi berlangsung. Pendanaan berkelanjutan tersebut dimaksudkan untuk membiayai kegiatan prioritas sehingga kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang mandiri.

Integrasi kegiatan prioritas terpilih, penetapan stakeholders kunci yang akan melaksanakan kegiatan tersebut serta dukungan pendanaan berkelanjutan menjadi exit strategy setelah berakhirnya proyek E-PASS. Pelaksanaan kegiatan exit strategy tersebut dikelompokkan menjadi dua jangka waktu pelaksanaan, yakni jangka pendek (1–3 tahun) dan jangka panjang (1–5 tahun). Penetapan kegiatan prioritas yang dilaksanakan untuk jangka pendek didasarkan pada pemilihan kegiatan-kegiatan prioritas yang mempunyai nilai pembobotan USG masuk pada kategori Prioritas Tinggi. Untuk beberapa kegiatan prioritas yang dirancang untuk jangka pendek diperoleh dari beberapa kegiatan yang mempunyai ranking nilai tertinggi, sedangkan untuk kegiatan prioritas jangka panjang dipilih dari kegiatan yang mempunyai bobot nilai yang lebih rendah dari kegiatan jangka pendek.





Kegiatan prioritas jangka pendek dimaksudkan bahwa kegiatan tersebut didukung (intervensi pendanaan) untuk periode waktu setidaknya dapat dilaksanakan pada tahun ketiga, sedangkan untuk kegiatan jangka panjang dilaksanakan paling lambat tahun kelima setelah proyek berakhir sampai benar-benar mandiri (self-financing) dan bahkan dapat menghasilkan income atau untuk kegiatan yang tidak menghasilkan income, misalnya pembinaan habitat atau kegiatan SMART Patrol, sudah dapat dilaksanakan oleh pengelola kawasan konservasi secara swadana. Pada umumnya, kegiatan-kegiatan prioritas jangka pendek pengelolaan kawasan konservasi sifatnya masih infant (bayi, tahap perkembangan awal setelah proyek berakhir) dan oleh karenanya perlu didukung pendanaan. Biasanya kegiatan tersebut cepat mencapai tahap maturitas (mandiri) dan menjadi alasan yang kuat memosisikan tersebut dalam kegiatan proyek jangka pendek.

Di sisi lain, kegiatan prioritas jangka panjang membutuhkan jangka waktu maturitas yang relatif lama. Kegiatan-kegiatan terpilih tersebut dinilai cukup strategis untuk dilanjutkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan konservasi, namun selama ini masih banyak mengalami hambatan dan keterbatasan untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kegiatan tersebut dibutuhkan waktu yang lebih lama dengan konsekuensi dukungan pendanaan dan pembinaan/pendampingan yang lebih intensif.

## **B. Menetapkan Kriteria dan Indikator**

Pelaksanaan proyek E-PASS pada Taman Nasional Lore Lindu, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan KPHK Tangkoko meningkatkan kinerja pengelolaan ke tiga kawasan konservasi tersebut karena proses pembelajaran pengelola kawasan konservasi bersama dengan masyarakat dan stakeholders lainnya yang difasilitasi proyek untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi secara signifikan mewujudkan konservasi keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana tujuan proyek untuk meningkatkan keefektifan pengelolaan dan keberlanjutan finansial sistem kawasan konservasi Sulawesi menghadapi ancaman kemerosotan keanekaragaman hayati yang direpresentasikan ketiga kawasan konservasi tersebut kegiatan proyek dirancang secara sistematis melalui tiga komponen, yakni: Komponen 1. Penguatan kapasitas



kelembagaan untuk perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi; Komponen 2. Keberlanjutan finansial untuk sistem kawasan konservasi; dan Komponen 3. Pengurangan ancaman dan tatakelola kolaborasi dengan masyarakat/para pihak. Untuk ketiga komponen tersebut ditetapkan 15 indikator E-PASS, yakni masing-masing 6 (enam) indikator untuk Komponen 1, 3 (tiga) indikator untuk Komponen 2, dan 6 (enam) indikator untuk Komponen 3. Keseluruhan indikator E-PASS merupakan kesatuan yang utuh untuk meningkatkan sistem pengelolaan kawasan konservasi di Sulawesi, khususnya pada ketiga lokus proyek E-PASS tersebut. Adapun kelimabelas indikator E-PASS adalah sebagai berikut:

Komponen 1:

- Indikator E-PASS No. 1: Skor pengembangan kapasitas institusi kawasan konservasi (*Institutional Capacity Development Scorecard*);
- Indikator E-PASS No. 2: Tingkat degradasi hutan tahunan (*Annual levels of forest degradation*);
- Indikator E-PASS No. 3: Perluasan penerapan Resort Based Management (RBM) (*Extent of implementation of RBM*);
- Indikator E-PASS No. 4: Keefektifan upaya anti perburuan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) (*Effectiveness of anti poaching efforts*);
- Indikator E-PASS No. 5: Monitoring biodiversitas pada tingkat pulau (*Operational island-wide biodiversity monitoring*); dan
- Indikator E-PASS No. 6: Representasi hutan dataran rendah untuk konservasi (*Representation of lowland forest*).

Komponen 2:

- Indikator E-PASS No. 7: Skor keberlanjutan pendanaan untuk kawasan konservasi Sulawesi (Financial sustainability score for the sub-system of Sulawesi's PAs);
- Indikator E-PASS No. 8: Anggaran tahunan yang dialokasikan untuk kawasan konservasi (Annual budget allocated to protected areas); dan
- Indikator E-PASS No. 9: Mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi (Sustainable financing mechanisms for PAs).

Komponen 3:

- Indikator E-PASS No. 10: Skor *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) untuk lokasi proyek (METT scores for demonstration sites);
- Indikator E-PASS No. 11: Indeks ancaman pada lokasi proyek (Threat indices at project demonstration sites);
- Indikator E-PASS No. 12: Indeks kesehatan ekosistem pada lokasi proyek (Ecosystem health indices at project demonstration sites);
- Indikator E-PASS No. 13: Populasi spesies indikator terancam punah terpilih pada lokasi proyek (Population of selected threatened indicator species at project sites);
- Indikator E-PASS No. 14: Areal-areal perambahan yang sedang berlangsung pada kawasan konservasi (Active encroachment areas in target PAs); dan
- Indikator E-PASS No. 15: Perluasan dan keefektifan tatakelola kerjasama (Existence and effectiveness of collaborative governances).

Berbagai kegiatan kemudian dirancang untuk kelimabelas indikator E-PASS tersebut dan pencapaian masing-masing kegiatan (output) diukur dengan parameter yang telah ditetapkan pada masing-masing indikator.

Keberlanjutan kegiatan yang penting yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan konservasi setelah proyek E-PASS berakhir bulan Desember 2020 menjadi krusial dan perlu diupayakan. Exit strategy tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan kelembagaan yang kuat, mobilisasi sumberdaya dan komitmen para pihak terkait. Pemilihan exit strategy yang rasional dan efektif mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan kriteria dan indikator untuk menguji, mengukur dan menetapkan beberapa kegiatan yang penting dilanjutkan. Proses penyusunan kriteria dan indikator tersebut sifatnya partisipatif di mana pengelola kawasan konservasi memberikan masukan substansi dan kerangka kerja pengembangan kriteria dan indikator dimaksud. Kriteria merupakan suatu standar kinerja untuk memutuskan keberhasilan. Dalam konteks kawasan konservasi, dapat diartikan sebagai unsur- unsur keberlanjutan teridentifikasi di mana melalui hal tersebut konservasi dapat dinilai. Selanjutnya, indikator merupakan variabel atau komponen parameter dari suatu kegiatan yang digunakan untuk menilai kriteria yang ditetapkan.





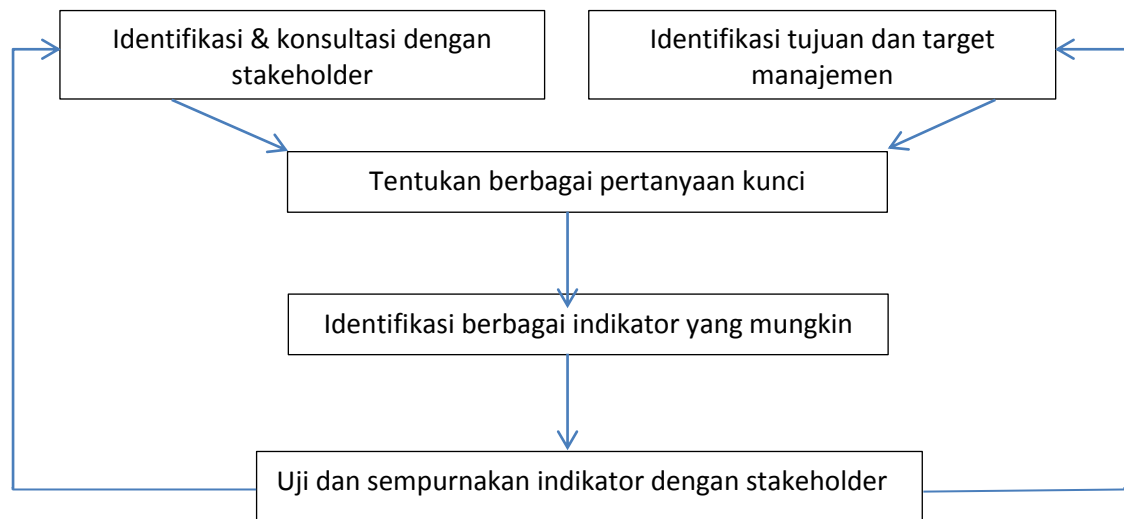


Kriteria dan indikator exit strategy dirancang untuk dapat mengartikulasikan sepenuhnya upaya penguatan sistem pengelolaan kawasan konservasi. Sebagaimana hierarki proyek E-PASS yang mencakup tujuan proyek, komponen proyek, indikator E-PASS dan kegiatan-kegiatan E-PASS, kriteria dan indikator exit strategy diupayakan mempunyai keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) yang kuat dengan proyek E-PASS. Sesuai dengan proyek E-PASS, kriteria dan indikator exit strategy mencakup aspek kebijakan, perencanaan, kelembagaan, capacity building, integritas ekosistem, integrasi pengelolaan kawasan konservasi dengan tata ruang, efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, pendanaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi dan pencapaian kohesi sosial dan manfaat ekonomi pengelolaan kawasan konservasi bagi masyarakat.

Kriteria dan indikator yang baik setidaknya memenuhi sifat-sifat: relevan; berhubungan erat dengan sasaran penilaian; spesifik; mudah dideteksi, dicatat dan diinterpretasikan; dapat dipercaya; dan harus peka terhadap fokus sistem pengelolaan, ekologi dan sosial. Pemilihan indikator sangat tergantung pada pertanyaan yang diajukan, atau tergantung pada maksud dan tujuan kegiatan (purpose-dependent). Suatu indikator yang baik setidaknya: 1. sah secara saintifik; 2. berdasarkan data yang tersedia; 3. mudah dipahami; 4. relevan kepada kebutuhan pengguna; dan 5. indikator tersebut efektif digunakan.

Partisipasi stakeholders kunci, dalam hal ini, sangat dibutuhkan untuk merancang indikator yang baik, sebagaimana digambarkan dalam skema berikut:





Gambar 2. Penetapan indikator kegiatan prioritas *exit strategy* berbasis *stakeholders*

### C. Proses Identifikasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan proyek E-PASS sudah hampir seluruhnya rampung dan secara periodik telah dilaporkan ke pihak manajemen proyek maupun pihak donor (UNDP/GEF). Proses monitoring dan evaluasi proyek tentu juga telah dilaksanakan untuk memberi feedback pada penyempurnaan pelaksanaan proyek guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari proses pelaksanaan, pembelajaran, pencapaian output (luaran), penilaian outcome (hasil) dan dampak serta manfaat proyek, baik yang dilakukan oleh pelaksana proyek (self-assessment) maupun pihak eksternal (audit) dapat dinilai kegiatan-kegiatan proyek E-PASS mana yang strategis dilanjutkan paska proyek E-PASS.

Identifikasi kegiatan proyek E-PASS menjadi sangat penting sebagai tahap awal untuk prioritasi kegiatan *exit strategy*. Proses identifikasi dilakukan dengan mencatat seluruh kegiatan yang telah dibiayai proyek. Pencatatan dilakukan oleh pihak manajemen di lapangan secara terstruktur sesuai dengan Komponen dan Indikator proyek E-PASS. Pencatatan harus sesuai dengan laporan bulanan dan tahunan proyek E-PASS untuk masing-masing kawasan konservasi. Pada proses identifikasi kegiatan tersebut juga dapat dilakukan pencatatan capaian proyek (realisasi fisik dan keuangan), gap/kesenjangan berupa hambatan dan permasalahan





yang dihadapi atas pencapaian kegiatan proyek tersebut dan saran solusi pemecahan masalah. Proses identifikasi kegiatan ini dibutuhkan untuk input penetapan kegiatan-kegiatan prioritas exit strategy. Proses identifikasi kegiatan tersebut dilakukan melalui pengisian kuisioner (Lampiran 1.). Kuisioner tersebut juga disusun untuk mengidentifikasi stakeholders dan dana untuk exit strategy.

#### **D. Menetapkan Kegiatan Prioritas**

Kegiatan prioritas exit strategy proyek E-PASS dilakukan dengan menggunakan perangkat kriteria dan indikator exit strategy yang telah disusun. Penilaian dilakukan berdasarkan pembobotan penyelesaian masalah menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness and Growth) (LAN, 2008), atau Kemendesakan, Keseriusan dan Perkembangan, untuk setiap kegiatan yang dipilih mempunyai potensi untuk menjadi kegiatan prioritas. Nilai pembobotan menggunakan skala Likert dengan nilai 5 (tinggi), 3 (sedang) dan 1 (rendah). Penilaian dilakukan oleh panelis yang mempunyai kompetensi dan menguasai permasalahan pengelolaan kawasan konservasi serta terbiasa menggunakan metode USG dengan jumlah panelis gasal (minimum jumlah panelis 3 orang).

Untuk panelis yang belum punya pengalaman menggunakan metode USG, berikut ini disampaikan pemaknaan USG.

##### Urgency (U):

Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas/diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tersebut.

##### Seriousness (S):

Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.

##### Growth (G):

Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan.





Dari hasil penilaian USG, panelis menentukan kegiatan Prioritas Tinggi (PT), Prioritas Sedang (PS) dan Prioritas Rendah (PR). Selang nilai untuk ketiga kegiatan prioritas tersebut adalah rata-rata nilai tertinggi USG dikurangi rata-rata nilai terendah USG dibagi 3 dan kemudian hasilnya ditambah 1 dan selanjutnya hasilnya dibagi 3. Rata-rata nilai tertinggi adalah total nilai tertinggi yang diberikan masing-masing panelis untuk setiap komponen USG dibagi 3. Hal yang sama, rata-rata nilai terendah merupakan total nilai terendah yang diberikan oleh masing-masing panelis untuk setiap komponen USG dibagi 3. Sebagai contoh, jika jumlah panelis sebanyak 5 orang, maka rata-rata nilai tertinggi adalah 25 yakni  $(5 \times 5 \times 3) : 3$  dan nilai terendah adalah 5, yakni  $(5 \times 1 \times 3) : 3$ . Dengan demikian nilai selang tersebut adalah 7, yakni  $(25 - 5 + 1) : 3$ . Secara berturut-turut, selang kegiatan Prioritas Tinggi, Prioritas Sedang dan Prioritas Rendah, masing-masing 19 - 25, 12 - 18 dan 5 - 11.

Keterlibatan stakeholders sangat strategis untuk mendukung keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu dilakukan analisis stakeholders dan selanjutnya membangun komitmen stakeholders untuk terlibat aktif dalam kegiatan exit strategy. Analisis stakeholders merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna menentukan para pihak yang mempunyai perhatian dan kepentingan bilamana dilakukan pengembangan dan/atau pelaksanaan suatu kebijakan atau program (Schmeer, 1999).

Untuk itu perlu dilakukan pemetaan pengaruh (power) dan kepentingan (interests) yang dilengkapi dengan identifikasi stakeholders, penjelasan perilaku stakeholders, analisis koalisi (bagaimana para pihak bekerjasama), manajemen stakeholders (kepada siapa menginformasikan, berkonsultasi, membangun kemitraan dan/atau pengendalian kegiatan) dan memberikan konsesi/bargaining (Bailur, 2006). Para pihak dapat dikelompokkan ke dalam pihak donor internasional, kalangan politisi nasional, publik (berbagai Kementerian), serikat buruh, NGOs, masyarakat madani dan para pengguna dan konsumen jasa/produk. Boleh jadi posisi stakeholders tersebut sebagai pendukung kegiatan (supporter), agak mendukung (moderate supporter), netral (neutral), agak menentang (moderate opponent) dan penentang (opponent) (Schmeer 1999).





Tahapan yang dilakukan untuk analisis stakeholders tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyelidiki siapa stakeholders yang dipengaruhi oleh kegiatan/proyek, kepentingan mereka, bagaimana mereka berperilaku dan mengapa, bagaimana sejarah dan perkembangan mereka dan kapan melakukan analisis koalisi/kerjasama, yakni menemukan bagaimana mereka berinteraksi dengan kelompok lain atau adakah kemungkinan konflik terjadi;
2. Rencanakan strategi bagaimana mengelola stakeholders, apa tanggungjawab yang akan mereka emban, haruskah mereka diinformasikan, dilibatkan dalam konsultasi untuk membangun kemitraan atau memberikan akses pengendalian terhadap kegiatan/proyek; dan
3. Menentukan apakah konsesi dibutuhkan jika strategi pengelolaan sebelumnya tidak berlangsung sebagaimana mestinya (Freeman 1984).

Pendanaan konservasi biodiversitas pada kawasan konservasi umumnya masih bertumpu pada APBN yang anggarannya sangat terbatas. Sementara pada skala global, upaya meningkatkan pendanaan pengelolaan kawasan konservasi di berbagai negara terus dilakukan dengan berbagai mekanisme pendanaan inovatif (innovative financing mechanisms), seperti Conservation Trust Funds, Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN), Forest Protection Contracts and Payment for Ecosystem Services (PES) schemes, Community Conservation Banks dan Debt for Nature Swaps (DNS) (Berhöfer et al. 2017) atau berbagai model bisnis konservasi dan conservation enterprise (Elliott dan Sumba 2011). Bagi Indonesia, inisiatif pendanaan alternatif kawasan konservasi terus berkembang seperti pendanaan dari kerjasama luar negeri berbentuk hibah (grant), kerjasama dalam negeri berbentuk Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah (BLU dan BLUD), Dana Desa dan pendanaan dalam bentuk kontribusi in kind dari masyarakat.

Pendanaan berkelanjutan untuk exit strategy proyek E-PASS ini lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan prioritas terpilih yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan usaha masyarakat yang telah terlembagakan dalam Kelompok Konservasi Masyarakat (kawasan konservasi). Penguatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan Daerah Penyangga,





akan berdampak positif terhadap keefektifan pengelolaan kawasan konservasi. Untuk itu, analisis pendanaan berkelanjutan kawasan konservasi dilakukan dengan metode semi-structured interviews dibantu dengan pengisian kuisioner terhadap pelaksana Komponen 2 proyek E-PASS (Bappenas) dan proses focus group discussion dengan para pelaksana proyek di ketiga kawasan konservasi.

### **E. Proses Focus Group Discussion**

Untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang potensial dilanjutkan, penapisan kegiatan-kegiatan prioritas melalui perangkat kriteria dan indikator exit strategy dan konfirmasi kegiatan-kegiatan prioritas, komitmen stakeholders yang akan terlibat dan mekanisme pendanaan berkelanjutan exit strategy dilakukan kegiatan focus group discussion secara virtual dengan para pelaksana proyek di lapangan, Bappenas sebagai penanggung jawab Komponen 2 dan pihak pengelola proyek E-PASS.

Beberapa event FGD yang dilakukan oleh Tim Ahli untuk memperoleh masukan guna memformulasikan exit strategy proyek E-PASS adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan exit strategy proyek E-PASS yang dilanjutkan dengan presentasi kemajuan pelaksanaan proyek E-PASS, tanggal 2 – 3 September 2020;
2. Penetapan kriteria dan indikator proyek E-PASS, 20 Oktober 2020; dan
3. FGD series (1 x 2 minggu) terkait konfirmasi kegiatan-kegiatan prioritas di masing-masing kawasan konservasi dan pendanaan berkelanjutan.





### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Babirusa Sulawesi *Babirusa celebensis*

Sumber : Ardin Mokodompit





### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan exit strategy dari keseluruhan kegiatan proyek E-PASS yang telah dilakukan sejak tahun 2015 - 2020 di TN. Lore Lindu, TN. Bogani Nani Wartabone dan KPHK Tangkoko mencakup empat aspek, yakni: 1. Penyusunan kriteria dan indikator exit strategy; 2. Kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh tujuh orang panelis menggunakan kriteria exit strategy dengan metode pembobotan USG; 3. Stakeholders potensial yang mempunyai komitmen dan akan berperan dalam implementasi kegiatan-kegiatan prioritas dengan fokus pada implementasi Kriteria 6 “Kelola Sosial dan Ekonomi kawasan konservasi Terwujud” yang didasarkan pada hasil stakeholders analysis; dan 4. Sumber pendanaan alternatif untuk pelaksanaan kegiatan prioritas.

#### A. Kriteria dan Indikator Exit Strategy

Kriteria dan indikator kegiatan exit strategy E-PASS didasarkan pada keterkaitan dan kesepadanan (link and match) yang kuat dengan substansi proyek E-PASS, yakni penguatan sistem pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi biodiversitas melalui penguatan kapasitas kelembagaan kawasan konservasi, keberlanjutan pendanaan kawasan konservasi, upaya pengurangan ancaman kelestarian ekosistem dan perbaikan tatakelola kolaborasi dengan masyarakat dan stakeholders. Seluruh kegiatan proyek E-PASS yang telah dilaksanakan masuk dalam ruang lingkup kriteria dan indikator exit strategy yang dibangun sehingga perangkat ini dapat digunakan sebagai alat yang efektif dan sah untuk menyeleksi kegiatan prioritas exit strategy. Kriteria sebagai suatu instrumen untuk menilai kinerja kegiatan yang dielaborasi dengan indikator yang merupakan variabel/parameter penilaian kriteria dan dapat menjawab maksud dan tujuan kegiatan (purpose-dependent) (CIFOR, 1996; Nuutinen dan Beltran, 2020) disusun dalam konteks penguatan sistem pengelolaan kawasan konservasi.

Komponen utama kriteria yang disusun mencakup: aspek kebijakan, perencanaan, kelembagaan dan capacity building pengelolaan kawasan konservasi; integritas ekosistem kawasan konservasi sebagai dasar keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi; integrasi pengelolaan kawasan konservasi dengan lanskap; efektifitas pengelolaan kawasan konservasi; sistem dan mekanisme pendanaan





berkelanjutan pengelolaan kawasan konservasi; dan perbaikan tatakelola dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Indikator yang dibangun untuk masing-masing kriteria lebih teknis dan merupakan ruang lingkup kriteria tersebut.

Dari hasil penelaahan substansi Project Document E-PASS, proses konsultasi dan diskusi kelompok terfokus dengan pengelola proyek di pusat dan di ketiga kawasan konservasi, maka disusun 6 kriteria dan masing-masing kriteria terdiri dari 5 indikator (Tabel 1).

Tabel 1. Kriteria dan indikator *exit strategy* proyek E-PASS

<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>
Mendukung perencanaan dan kelembagaan efektif dalam pelestarian kawasan konservasi (Kriteria 1)	1.1 Kebijakan kehutanan dan sektor lain mendukung pelestarian ekosistem kawasan konservasi
	1.2 Regulasi daerah mendukung pengelolaan Daerah Penyangga
	1.3 RPTN/RPHJP mendukung kegiatan/proyek pengelolaan kawasan konservasi
	1.4 Kapasitas kelembagaan kawasan konservasi dapat merespon kompleksitas pengelolaan kawasan konservasi
	1.5 <i>Capacity building</i> dilaksanakan untuk memperkuat kelembagaan kawasan konservasi
Terpeliharanya integritas pengelolaan ekosistem kawasan konservasi (Kriteria 2)	2.1 Kegiatan movev dan pelaporan gangguan dan ancaman kelestarian kawasan konservasi dilakukan
	2.2 Kegiatan identifikasi dan penurunan laju degradasi vegetasi hutan dilakukan
	2.3 Kegiatan pendataan, pencegahan dan penindakan pemantaatan serta perdagangan ilegal TSL dilakukan
	2.4 Pengelolaan habitat dan jenis-jenis flora dan fauna dilindungi, khususnya species kunci, dilakukan
	2.5 Peningkatan indeks kesehatan habitat, species dan lingkungan melalui restorasi ekosistem kawasan konservasi
Pengelolaan kawasan konservasi yang terintegrasi dengan tata ruang (Kriteria 3)	3.1 Pengalokasian hutan dataran rendah untuk pembentukan kawasan konservasi dilakukan
	3.2 Biodiversitas hutan dataran rendah di luar kawasan konservasi masih dipertahankan
	3.3 Rencana tata ruang kabupaten (RTRWK) menghargai keberadaan kawasan konservasi dan konsisten dilaksanakan
	3.4 Keberadaan hutan lindung, hutan produksi, Kawasan Ekosistem Esensial dan HCVF di sekitar kawasan konservasi mendukung fungsi konservasi keanekaragaman hayati
	3.5 Keberadaan koridor satwa di sekitar kawasan konservasi dan adanya jaminan keamanan satwa jika berada di luar kawasan konservasi
Efektifitas pengelolaan KAWASAN KONSERVASI tercapai (Kriteria 4)	4.1 Tujuan dan rencana pengelolaan kawasan konservasi dijabarkan secara jelas
	4.2 Manajemen adaptif dilakukan dalam pengelolaan kawasan konservasi
	4.3 Kegiatan identifikasi dan mitigasi ancaman terhadap kelestarian kawasan konservasi dilaksanakan
	4.4 Pengelolaan kawasan konservasi didesentralisasikan ke tapak melalui <i>Resort Based Management</i>
	4.5 Monitoring biodiversitas dilakukan untuk input peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
Mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk	5.1 Mendorong integritas pengelolaan biodiversitas
	5.2 Membantu penguatan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi



<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>
pengelolaan kawasan konservasi (Kriteria 5)	5.3 Membantu penguatan pengelolaan daerah penyangga kawasan konservasi (termasuk pemberdayaan masyarakat)
	5.4 Membantu penyelesaian (resolusi) konflik kepentingan
	5.5 Memperkuat kapasitas peningkatan pendanaan konservasi
Kelola sosial dan ekonomi kawasan konservasi terwujud (Kriteria 6)	6.1 Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan secara inklusif untuk mewujudkan keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat setempat
	6.2 Masyarakat lokal mempunyai akses terhadap pemanfaatan sumber daya kawasan konservasi
	6.3 Masyarakat lokal mengembangkan kelembagaan ekonomi dalam bentuk Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM)
	6.4 Adanya upaya peningkatan nilai tambah kegiatan ekonomi di sekitar kawasan konservasi
	6.5 Pendampingan dan peningkatan kapasitas KKM oleh pengelola kawasan konservasi

Keterangan: K1-....K6 = Kriteria 1 -....Kriteria 6

Kriteria 1 “Mendukung perencanaan dan kelembagaan efektif dalam pelestarian kawasan konservasi” memenuhi konteks kebijakan dan legislasi baik di tingkat pusat dan daerah, perencanaan strategis dan operasional, kelembagaan kawasan konservasi dan peningkatan kapasitas pengelolaan. Kriteria ini sangat penting untuk membangun landasan pengelolaan kawasan konservasi yang kuat. Berbagai kontradiksi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dengan sektor lain harus diatasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks global, Goal 15 SDGs “Live on Land atau Terrestrial Ecosystem” secara tegas menekankan pentingnya konservasi dan pemanfaatan ekosistem dan biodiversitas daratan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Komitmen global tersebut sudah seharusnya diikuti dengan komitmen dan penguatan kebijakan dan legislasi di tingkat nasional dan daerah.

Hal yang sama dengan perencanaan, pengelolaan kawasan konservasi dan kehutanan belum mendapat prioritas dalam pembangunan nasional. Kehutanan tidak masuk dalam Prioritas Nasional dan Program Prioritas. Sektor ini hanya masuk dalam level Kebijakan Prioritas dan Major Projects dalam RPJMN 2020 – 2024. Di level pemerintahan daerah, devolusi kehutanan tidak sampai di level kabupaten/kota. Peranan sumber daya hutan melalui upaya konservasi belum meyakinkan secara politis untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini mempunyai rentetan lemahnya posisi kawasan konservasi dan kehutanan dalam agenda dan pembiayaan pembangunan.



Penguatan organisasi, kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola penting untuk meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi. Capacity building, dengan demikian, sangat penting untuk pengembangan organisasi (organizational development), penguatan kelembagaan (institutional development) dan penguatan sumber daya manusia (human resources development) (IMF, 2000). Strategi penguatan ketiga komponen ini secara sistematis akan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi dan dapat beradaptasi dengan dinamika dan perubahan eksternal yang terjadi.

Kriteria 2" Terpeliharanya integritas pengelolaan ekosistem kawasan konservasi (Kriteria 2)" terkait dengan konteks keberlanjutan yang sangat kuat (very strong sustainability) dalam pengelolaan hutan, khususnya kawasan konservasi, dan pembangunan berkelanjutan. Memelihara integritas ekosistem akan menjamin kesehatan ekosistem dan keberlangsungan fungsi dan struktur komponen-komponen ekosistem terus berlangsung/terpelihara memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan yang akan datang. Fungsi merujuk pada keseluruhan aktivitas yang terdapat dalam ekosistem sedang struktur merujuk pada interkoneksi antara komponen-komponen dari ekosistem tersebut (Jorgensen et al. 2005). Integritas ekosistem tersebut sangat penting dalam konservasi biodiversitas karena dapat mempertahankan fungsi ekosistem, daya lenting ekosistem dan kelestarian spesies untuk keberlangsungan pembangunan (De Leo dan Levin 1997).

Dalam konteks penguatan sistem pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi biodiversitas di Sulawesi, pemeliharaan integritas ekosistem penting untuk mewujudkan kualitas habitat dan kelestarian species, khususnya species kunci, di Bioregion Wallacea tersebut. Untuk itu, perlu dikedepankan kegiatan monitoring dan evaluasi gangguan kepada ekosistem, identifikasi degradasi hutan, pencegahan pemanfaatan illegal Tumbuhan dan Satwa Liar, pengelolaan species kunci dan peningkatan indeks kesehatan habitat, species dan lingkungan melalui restorasi ekosistem kawasan konservasi.

Kriteria 3 "Pengelolaan kawasan konservasi yang terintegrasi dengan tata ruang" terkait dengan konteks pengelolaan lansekap multifungsi (multi-functional landscape) di mana pembangunan wilayah berbasis sumber daya lahan memperhatikan seluruh potensi modal alam yang ada untuk menunjang



pembangunan berkelanjutan dan dilakukan dengan pendekatan integratif dan mengesampingkan pendekatan segregatif (ego-sektoral). Dalam perencanaan spasial (RTRWP/RTRWK), keberadaan kawasan konservasi dihargai dan konsisten dipertahankan untuk mendukung pembangunan sektor lain. Di samping itu, kegiatan yang menyebabkan degradasi hutan dan deforestasi dihentikan. Fungsi konservasi biodiversitas di luar kawasan konservasi, khususnya untuk ekosistem hutan dataran rendah, di Sulawesi dirasakan sangat kurang. Oleh karena itu, pembangunan TN Gandang Dewata di Sulawesi Barat sebagai representasi ekosistem dataran rendah sangat strategis dan perlu diwujudkan. Di samping itu, peningkatan fungsi konservasi pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan High Conservation Value Forest (HCVF) untuk mendukung konservasi biodiversitas perlu diwujudkan dengan komitmen kuat dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Kriteria 4 "Efektifitas Pengelolaan kawasan konservasi tercapai" diwujudkan dalam konteks pencapaian tujuan pengelolaan kawasan konservasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efisien. Perangkat mewujudkan kriteria tersebut telah dibangun melalui desentralisasi kegiatan konservasi dalam Resort Based Management (RBM). Secara operasional, SMART Patrol dirancang untuk mengimplementasikan RBM dengan kegiatan mengidentifikasi dan memitigasi ancaman terhadap kelestarian kawasan konservasi. Kegiatan RBM yang baik didukung oleh sistem pelaporan dan evaluasi dari staf di tingkat resort dan kegiatan pembinaan dari atasan dari kantor TN/KPHK. Di samping itu, juga perlu dilakukan berbagai kegiatan monitoring biodiversitas, sebagai bagian dari efektifitas pengelolaan yang hasilnya digunakan sebagai input peningkatan pengelolaan kawasan konservasi. Kinerja kegiatan peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, dalam hal ini, diukur dengan METT (Management Effectiveness Tracking Tool).

Kriteria 5 "Mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan kawasan konservasi" perlu dibangun dalam konteks mengatasi masalah dana APBN yang sangat terbatas. Mobilisasi sumber-sumber finansial dibutuhkan untuk menggerakkan konservasi biodiversitas. Sumber pendanaan dalam negeri dan luar negeri sesungguhnya cukup banyak tetapi menuntut persyaratan dan jaminan



keberhasilan berupa output konservasi yang sifatnya tangible (Verweij, 2014). Lebih jauh, Verweij (2014) mengemukakan bahwa perlu membangun mekanisme pendanaan inovatif sebagai suatu pengaturan kelembagaan untuk memperoleh sumber pendanaan baru dengan merubah paradigma willing to pay untuk barang dan jasa lingkungan hutan yang dihasilkan menjadi willing to provide untuk barang dan jasa tersebut.

Penguatan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi, khususnya pada Daerah Penyangga, menjadi strategis untuk direalisasikan melalui pendanaan berkelanjutan. Jasa ekosistem hutan berupa biodiversitas, penyediaan air dan ekowisata dapat dikapitalisasi (Sari et al. 2020), begitu juga dengan usaha agribisnis dan home industry sangat layak dikembangkan. Pendanaan berkelanjutan tersebut akan memperkuat sistem pengelolaan kawasan konservasi.

Kriteria 6 “Kelola sosial dan ekonomi kawasan konservasi terwujud” perlu direalisasikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan kawasan konservasi. Pilar keberlanjutan sosial dan keberlanjutan ekonomi harus dibangun, karena masyarakat sekitar kawasan konservasi akan meningkat kesejahteraannya dan pada gilirannya akan mendukung terwujudnya kelestarian kawasan konservasi. Berbagai kegiatan ekonomi masyarakat harus dibangun melalui kelembagaan ekonomi yang kuat dan mandiri dan kohesi sosial perlu diciptakan.

Keenam kriteria exit strategy yang dibangun tersebut mempunyai keterkaitan dengan 15 indikator E-PASS (Tabel 2). Kriteria 4 mempunyai keterkaitan terbanyak dengan indikator E-PASS, sebanyak 6 indikator, meliputi penerapan RBM, monitoring biodiversitas, skor METT, indeks ancaman, populasi spesies indikator dan perambahan. Hal ini menandakan bahwa efektifitas pengelolaan merupakan kegiatan utama dalam manajemen TN/KPHK. Dua kegiatan utama yang perlu terus dilakukan dan ditingkatkan kualitasnya secara terus menerus adalah implementasi RBM dan monitoring biodiversitas.

Tabel 2. Keterkaitan antara kriteria *exit strategy* dengan indikator E-PASS

Kriteria <i>Exit Strategy</i>	Indikator E-PASS
<b>Kriteria 1:</b> Mendukung perencanaan dan kelembagaan efektif dalam pelestarian kawasan konservasi	<b>Indikator 1:</b> Skor pengembangan kapasitas institusi kawasan konservasi ( <i>Institutional Capacity Development Scorecard</i> )
<b>Kriteria 2:</b> Terpeliharanya integritas pengelolaan ekosistem kawasan konservasi	<b>Indikator 2:</b> Tingkat degradasi hutan tahunan ( <i>Annual levels of forest degradation</i> )
	<b>Indikator 4:</b> Keefektifan upaya anti perburuan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) ( <i>Effectiveness of anti-poaching efforts</i> )
	<b>Indikator 12:</b> Indeks kesehatan ekosistem pada lokasi proyek ( <i>Ecosystem health indices at project demonstration sites</i> )
<b>Kriteria 3:</b> Pengelolaan kawasan konservasi yang terintegrasi dengan tata ruang	<b>Indikator 6:</b> Representasi hutan dataran rendah untuk konservasi ( <i>Representation of lowland forest</i> )
<b>Kriteria 4:</b> Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi tercapai	<b>Indikator 3:</b> Perluasan penerapan <i>Resort Based Management</i> (RBM) ( <i>Extent of implementation of RBM</i> )
	<b>Indikator 5:</b> Monitoring biodiversitas pada tingkat pulau ( <i>Operational island-wide biodiversity monitoring</i> )
	<b>Indikator 10:</b> Skor <i>Management Effectiveness Tracking Tool</i> (METT) untuk lokasi proyek ( <i>METT scores for demonstration sites</i> )
	<b>Indikator 11:</b> Indeks ancaman pada lokasi proyek ( <i>Threat indices at project demonstration sites</i> )
	<b>Indikator 13:</b> Populasi spesies indikator terancam punah terpilih pada lokasi proyek ( <i>Population of selected threatened indicator species at project sites</i> )
	<b>Indikator 14:</b> Areal-areal perambahan yang sedang berlangsung pada kawasan konservasi ( <i>Active encroachment areas in target PAs</i> )
<b>Kriteria 5:</b> Mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan kawasan konservasi	<b>Indikator 7:</b> Skor keberlanjutan pendanaan untuk kawasan konservasi Sulawesi ( <i>Financial sustainability score for the sub-system of Sulawesi's PAs</i> )
	<b>Indikator 8:</b> Anggaran tahunan yang dialokasikan untuk kawasan konservasi ( <i>Annual budget allocated to protected areas</i> )
	<b>Indikator 9:</b> Mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi ( <i>Sustainable financing mechanisms for PAs</i> )
<b>Kriteria 6:</b> Kelola sosial dan ekonomi kawasan konservasi terwujud	<b>Indikator 15:</b> Perluasan dan keefektifan tatakelola kerjasama ( <i>Existence and effectiveness of collaborative governances</i> )

Keterangan: K1-....K6 = Kriteria 1 -....Kriteria 6

Keterkaitan Kriteria 2, integritas ekosistem, dengan tiga indikator E-PASS berhubungan dengan upaya mempertahankan kondisi ekosistem yang masih baik kondisinya dan merestorasi ekosistem yang rusak sehingga berfungsi seperti sediakala. Hal ini tampak jelas pada kegiatan pencegahan dan monitoring degradasi hutan, pencegahan pemanfaatan ilegal TSL dan monitoring indeks kesehatan ekosistem.

## B. Kegiatan Prioritas

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tujuh panelis terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai potensial untuk dilanjutkan oleh pihak manajemen TN. Lore Lindu diperoleh lima kegiatan prioritas yang mempunyai nilai skor USG tertinggi





dan masuk kategori Prioritas Tinggi (Lampiran 3.). Kelima kegiatan tersebut disarankan menjadi kegiatan prioritas exit strategy jangka pendek TN. Lore Lindu (Tabel 3.).

Tabel 3. Kegiatan prioritas *exit strategy* proyek E-PASS pada Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Prioritas Jangka Pendek (1 – 3 tahun)

Kriteria <i>Exit Strategy</i>	Kegiatan Prioritas
Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi tercapai (K.4)	1. Implementasi RBM
Kelola sosial dan ekonomi kawasan konservasi terwujud (K.6)	1. Kerjasama kemitraan konservasi dengan masyarakat sekitar
	2. Meningkatkan kegiatan pendampingan masyarakat di TNLL dan sekitarnya secara intensif
	3. Kegiatan pengembangan wisata air panas di Desa Lawua oleh LPKD Lawua
	4. Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kerajinan tangan, kue tradisional, gula aren dan turunannya (gula semut, baji beku)

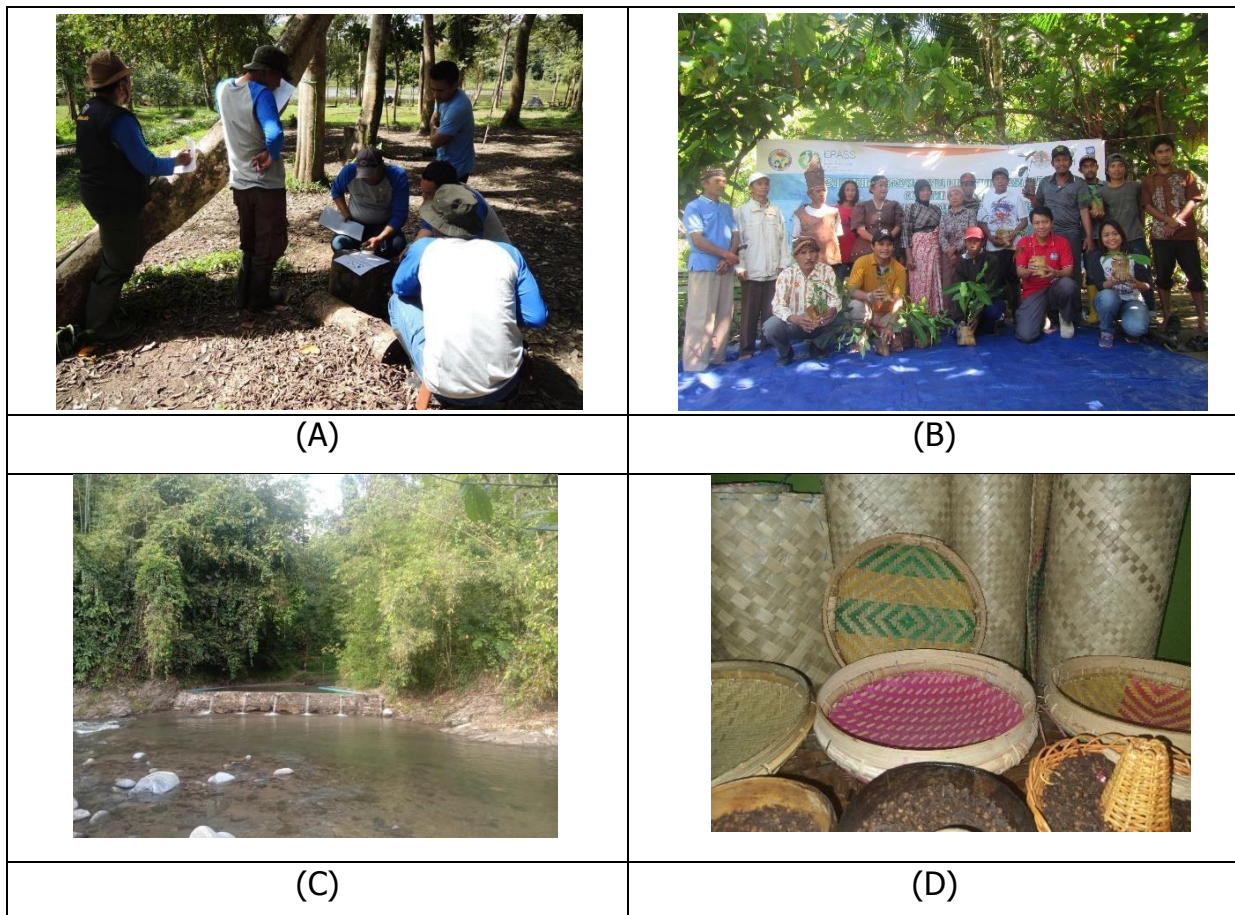
Keterangan: K1-....K6 = Kriteria 1 -....Kriteria 6

Penerapan RBM dalam pengelolaan TN. Lore Lindu merupakan kegiatan mendesak dan penting untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan TN. Sebelum proyek E-PASS berlangsung di lokus ini, RBM belum dilakukan. Oleh karena itu, implementasi RBM yang mencakup seluruh resort TN diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka pendek setelah proyek E-PASS berakhir. Peningkatan kapasitas staf untuk mengoperasikan sistem tersebut di kantor TN dan aplikasi sistem RBM di lapangan menjadi kegiatan utama TN tersebut.

Empat kegiatan prioritas TN lainnya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar TN dalam bentuk memperkuat kelembagaan kerjasama kemitraan konservasi, pendampingan masyarakat dalam aktifitas ekonomi, sosial dan lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat yang bergerak di home industry kerajinan tangan, kue tradisional dan gula semut serta ekowisata air panas di Desa Lawua sebagaimana disajikan pada Gambar 3. Kegiatan capacity building melalui penguatan organisasi kawasan KKM dan pelatihan teknis menjadi modal penting untuk kemajuan usaha ekonomi produktif dan kegiatan konservasi yang diperankan masyarakat. Kegiatan usaha home industry dan ekowisata yang ditekuni masyarakat merupakan bentuk perusahaan konservasi (*conservation enterprises*)



yang perlu terus menerus dikembangkan untuk menunjang kegiatan konservasi (Elliott dan Sumba 2011).



Gambar 3. Kegiatan exit strategy jangka pendek di TNLL: (A) Implementasi RBM; (B) Pendampingan masyarakat; (C) Wisata air panas Desa Lawua; (D) Usaha kerajinan tangan

Lima kegiatan potensial yang mempunyai nilai skor tertinggi berikutnya disarankan menjadi kegiatan prioritas exit strategy jangka panjang, yakni revisi RPJP TNLL, monitoring spesies kunci, patroli pengamanan dengan sistem grid, pengembangan wisata maleo dan usaha perikanan dan peternakan (Tabel 4.). Beberapa kegiatan exit strategy jangka panjang tersebut disajikan pada Gambar 4. Tiga kegiatan pertama terkait dengan kegiatan internal balai (dilakukan oleh staf TN sendiri). Kegiatan tersebut membutuhkan dukungan pendanaan. Meskipun kegiatan tersebut murni kegiatan yang mengeluarkan biaya (spending) tetapi dapat diakomodasi dalam skema kegiatan pendanaan inovatif (Sari et al. 2020). Dua kegiatan terakhir berkaitan langsung dengan keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat.

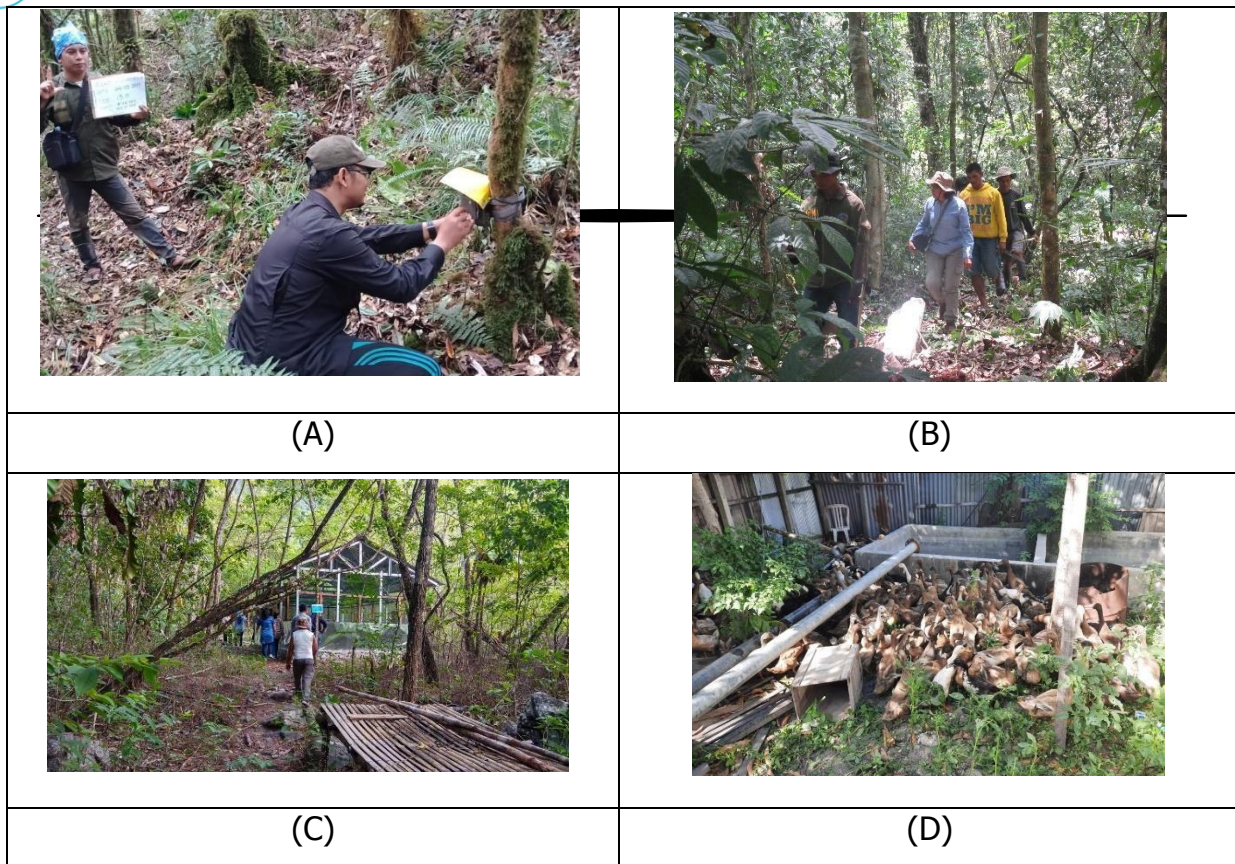


Tabel 4. Kegiatan prioritas *exit strategy* proyek E-PASS pada Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Prioritas Jangka Panjang (1 – 5 tahun)

Kriteria <i>Exit Strategy</i>	Kegiatan Prioritas
Mendukung perencanaan dan kelembagaan efektif dalam pelestarian kawasan konservasi (K.1)	1. Revisi RPJP BBTNLL berdasarkan hasil revisi zonasi dan hasil pendampingan kepada masyarakat 16 desa di kawasan TNLL
Terpeliharanya integritas pengelolaan ekosistem kawasan konservasi (K.2)	1. Monitoring species kunci/species prioritas secara berkala
	2. Patroli pengamanan kawasan TNLL berdasarkan sistem grid
Kelola sosial dan ekonomi kawasan konservasi terwujud (K.6)	1. Pengembangan wisata maleo di Desa Pakuli Utara yang dilakukan oleh LPKD Singgani
	2. Pengembangan usaha perikanan dan peternakan kelompok masyarakat

Keterangan: K1-....K6 = Kriteria 1 -....Kriteria 6

Destinasi wisata maleo dapat berkembang bila didukung dengan strategi pemasaran yang intensif melalui saluran sosial media yang menjangkau pasar domestik dan global dan pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana yang baik untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik (*attractiveness*) ekowisata tersebut. Kontribusi sektor pariwisata Indonesia, khususnya destinasi wisata portofolio alam, terhadap Gross Domestic Product (GDP) sangat tinggi, nomor dua setelah minyak dan gas bumi, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per tahun dan menjadi alasan yang kuat untuk meningkatkan pembangunan sektor pariwisata di Indonesia. Destinasi ekowisata yang mengandalkan fenomena keindahan alam dan biodiversitas dapat mengambil pangsa pasar dari bangkitnya pariwisata di Indonesia. Ekowisata maleo di Desa Pakuli Utara yang dilakukan oleh LPKD Singgani dapat berkembang sepanjang memenuhi faktor 3 A (*Amenity, Attractiveness, and Accesibility*) sebagaimana karakteristik destinasi wisata portofolio alam. Ekowisata maleo tersebut sebaiknya dirancang terintegrasi dengan destinasi wisata lain di Provinsi Sulawesi Tengah dan mempunyai jejaring (*networking*) dengan sektor pendukung, berupa travel pariwisata dengan moda transportasinya, pemandu wisata, hotel, cottage atau ecolodge dan kuliner yang khas, lezat dan menarik.



**Gambar 4. Kegiatan exit strategy jangka panjang di TNLL: (A) Monitoring spesies kunci; (B) Patroli pengamanan kawasan; (C) Ekowisata maleo Desa Pakuli Utara; (D) Pengembangan peternakan**

Pengembangan usaha perikanan dan peternakan oleh kelompok masyarakat sekitar TN. Lore Lindu juga dapat didorong sebagai suatu kegiatan exit strategy untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mendukung kelestarian kawasan konservasi. Bidang agribisnis ini pada umumnya mempunyai tingkat profitabilitas yang cukup tinggi sepanjang tidak mengandalkan pakan pabrik yang biasanya pada bisnis ini biaya produksi terbesar adalah pembelian pakan. Kemurahan alam taman nasional akan menyediakan air dan pakan yang berkualitas dan cukup untuk menunjang usaha perikanan dan peternakan ini. Produk ikan dan ternak organik ini akan semakin disukai dan mempunyai pangsa pasar lokal yang baik.

Berdasarkan penapisan 18 kegiatan yang dinilai sangat potensial di TN. Bogani Nani Wartabone yang dilakukan oleh tujuh orang panelis diperoleh 15 kegiatan yang termasuk Prioritas Tinggi (skor 27 – 35) (Lampiran 4.). Namun demikian, lima kegiatan dengan nilai tertinggi diusulkan untuk menjadi kegiatan prioritas jangka pendek sebagaimana disajikan pada Tabel 5 dan Gambar 5.

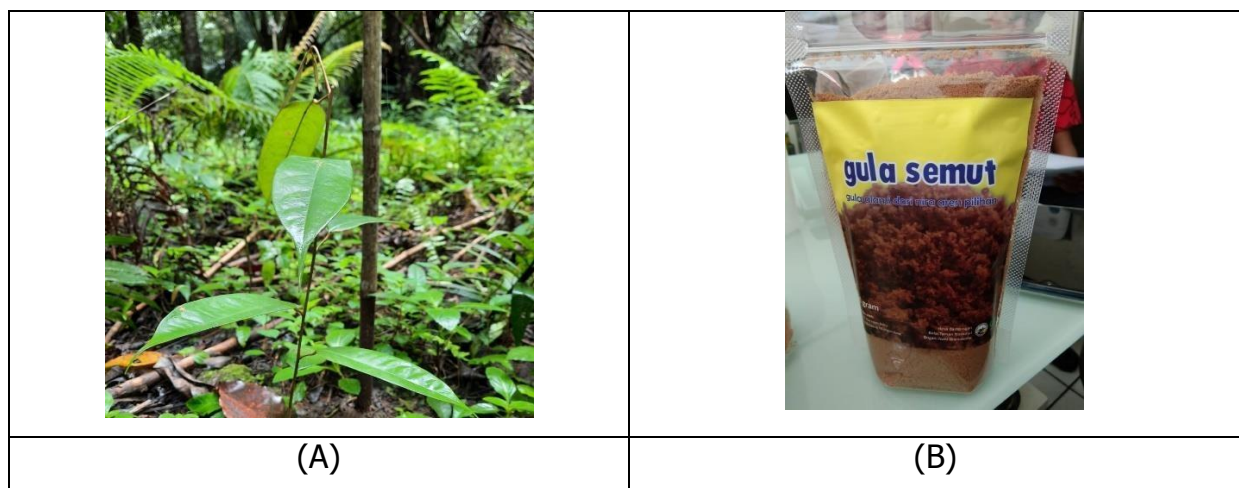


Tabel 5. Kegiatan prioritas *exit* strategy proyek E-PASS pada Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Prioritas Jangka Pendek (1 – 3 tahun)

Kriteria <i>Exit Strategy</i>	Kegiatan Prioritas
Kelola sosial dan ekonomi kawasan konservasi terwujud (K.6)	1. Penanaman pohon buah-buahan pada batas kawasan
	2. Pengembangan aren, kemiri, dan pala sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan kawasan melalui skema pemulihan ekosistem kolaboratif
	3. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kawasan konservasi KKM dan diikuti dengan replikasi kegiatan di kelompok lain
	4. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat
	5. Melanjutkan skema kontribusi masyarakat terhadap kegiatan konservasi (a.l. pemulihan ekosistem, ekowisata, pengendalian kebakaran hutan)

Keterangan: K1-....K6 = Kriteria 1 - ....Kriteria 6

Kelima kegiatan prioritas *exit* strategy jangka pendek di TN. Bogani Nani Wartabone merupakan bagian dari upaya mewujudkan keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar taman nasional, khususnya di Daerah Penyangga. Dua pilar keberlanjutan ini sangat mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang konservasi hutan. Mengakomodir kebutuhan masyarakat sekitar TN yang umumnya pada tingkat subsisten dan pemenuhan jaring pengaman sosial (*social safety net*) untuk beranjak naik status menjadi tingkat sejahtera melalui kegiatan produktif agribisnis dan ekowisata perlu terus didorong oleh pihak pengelola TN dan stakeholders.







**Gambar 5. Kegiatan exit strategy jangka pendek di TNBNW: (A) Penanaman pohon buah-buahan di batas kawasan; (B) Pengembangan aren secara kolaboratif; (C) Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat; (D) Pemulihan ekosistem oleh masyarakat**

Penguatan kelembagaan Kelompok Konservasi Masyarakat (KKM) juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam bidang usaha agribisnis dan industri rumah tangga. Khusus untuk kawasan KKM yang bergerak dalam pemanfaatan dan pengolahan HHBK, penguatan lembaga rumah tangga, pembinaan relasi sosial, pembinaan sumber daya hutan penghasil HHBK dan peningkatan pemasaran menjadi faktor kunci keberhasilan usaha kawasan KKM tersebut (Cunningham, 2006) dan siap direplikasikan secara luas di desa-desa sekitar TN. Bogani Nani Wartabone. Pengelolaan HHBK di kawasan konservasi perlu dilakukan secara cermat karena dapat terjadi trade off antara pemanfaatan HHBK dan upaya konservasi (Cunningham, 2006). Pemanenan HHBK sebaiknya tidak melebihi daya dukung dan daya pulih penghasil HHBK tersebut.

Salah satu kegiatan exit strategy yang menarik adalah skema kontribusi masyarakat terhadap kegiatan konservasi. Inisiatif dan keterlibatan masyarakat tersebut secara sukarela terhadap pemulihan ekosistem dan pengendalian kebakaran hutan harus diapresiasi dan diberi insentif, baik insentif berupa honorarium maupun insentif non fiskal berupa kemudahan, fasilitasi dan akses seperti pengembangan ekowisata.

Lima kegiatan prioritas exit strategy jangka panjang yang diusulkan di TN. Bogani Nani Wartabone bervariasi satu sama lain, yakni memenuhi lima dari enam kriteria exit strategy (kecuali Kriteria 2, Terpeliharanya integritas pengelolaan



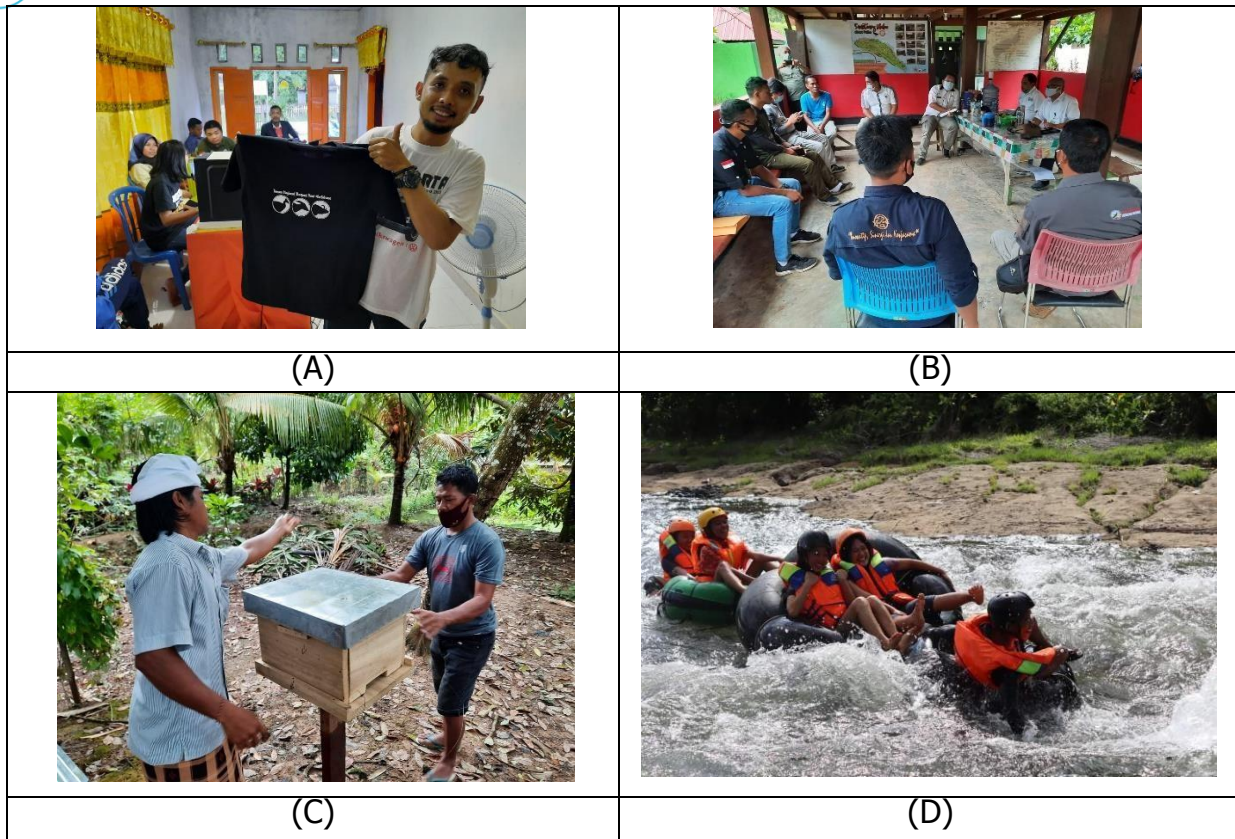
ekosistem kawasan konservasi) sebagaimana disajikan pada Tabel 6. Kegiatan exit strategy tersebut didominasi oleh kegiatan internal Taman Nasional dalam rangka menguatkan perencanaan, fungsi Daerah Penyangga untuk mendukung konservasi, implementasi RBM dan akses pendanaan. Hanya satu kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, yakni penguatan BUMDES untuk mendukung bisnis HHBK/ekowisata. Pembentukan kelembagaan ekonomi BUMDES sangat strategis untuk meningkatkan status usaha informal menjadi usaha formal berbadan hukum yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan masyarakat, kemudahan pemasaran dan daya saing produk. Pembentukan BUMDES melibatkan beberapa stakeholders, yakni Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten yang menerbitkan legal status BUMDES (Dinas yang menangani investasi dan usaha), kelompok masyarakat dan pengelola Taman Nasional. Upaya ini juga perlu ditunjang dengan pembenahan manajemen BUMDES yang lebih profesional, yang mempunyai kewirausahaan yang tinggi, inovatif mengembangkan berbagai produk dan jasa layanan dan akuntabel. Sebagai gambaran kegiatan exit strategy jangka panjang di TNBNW disajikan pada Gambar 6 berikut.

Tabel 6. Kegiatan prioritas *exit strategy* proyek E-PASS pada Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Prioritas Jangka Panjang (1 – 5 tahun)

Kriteria <i>Exit Strategy</i>	Kegiatan Prioritas
Mendukung perencanaan dan kelembagaan efektif dalam pelestarian kawasan konservasi (K.1)	1. Peningkatan kapasitas perencanaan untuk mengurangi kesenjangan antara rencana jangka panjang dan implementasi jangka pendek
Pengelolaan kawasan konservasi yang terintegrasi dengan tata ruang (K.3)	1. Penguatan fungsi ruang DP yang mendukung kawasan konservasi, a.l. di Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Efektifitas pengelolaan ekosistem kawasan konservasi tercapai (K.4)	1. Implementasi RBM
Sumber pendanaan berkelanjutan (K.5)	1. Mengupayakan akses APBD dan Dana Desa untuk membiayai kegiatan konservasi
Kelola sosial dan ekonomi kawasan konservasi terwujud (K.6)	1. Penguatan BUMDES sebagai organisasi pengelola bisnis komoditas HHBK/ekowisata

Keterangan: K1-.....K6 = Kriteria 1 -.....Kriteria 6





**Gambar 6. Kegiatan exit strategy jangka panjang di TNBNW: (A) Pelatihan Sablon di TNBNW; (B) Implementasi RBM; (C) HHBK yang dapat dikembangkan BUMDES; (D) Ekowisata yang dapat dikembangkan BUMDES**

Penapisan 28 kegiatan yang dinilai oleh pihak manajemen KPHK Tangkoko potensial untuk dilanjutkan diperoleh hasil 23 kegiatan masuk kategori Prioritas Tinggi (Lampiran 5). Dari ke 23 kegiatan tersebut dipilih 5 kegiatan prioritas exit strategy jangka pendek (Tabel 7.) dan 5 kegiatan prioritas jangka panjang (Tabel 8.) yang merupakan nilai tertinggi dari ke 23 kegiatan tersebut.

Kegiatan prioritas exit strategy jangka pendek didominasi oleh kegiatan yang memenuhi kriteria 6 yakni pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pendampingan kegiatan Lembaga Pengelola Konservasi Desa/LPKD dan memfasilitasi akses pasar produk-produk LPKD (Gambar 7). Bidang usaha yang digeluti oleh masyarakat di Daerah Penyangga cukup bervariasi dan ini membutuhkan bimbingan dan pendampingan dari pihak KPHK Tangkoko. Agribisnis perikanan dan peternakan dinilai sangat prospektif dan pangsa pasar lokal cukup tinggi untuk menyerap produk dari masyarakat tersebut. Lain halnya dengan industri rumah tangga pembuatan arang aktif masih membutuhkan informasi pasar, intervensi pasar, kerjasama dan pemenuhan standar kualitas produk sehingga dapat



diserap konsumen yang biasanya terbatas. Upaya pembinaan usaha arang aktif ini perlu mendapat perhatian dan bantuan, khususnya untuk pemasaran.

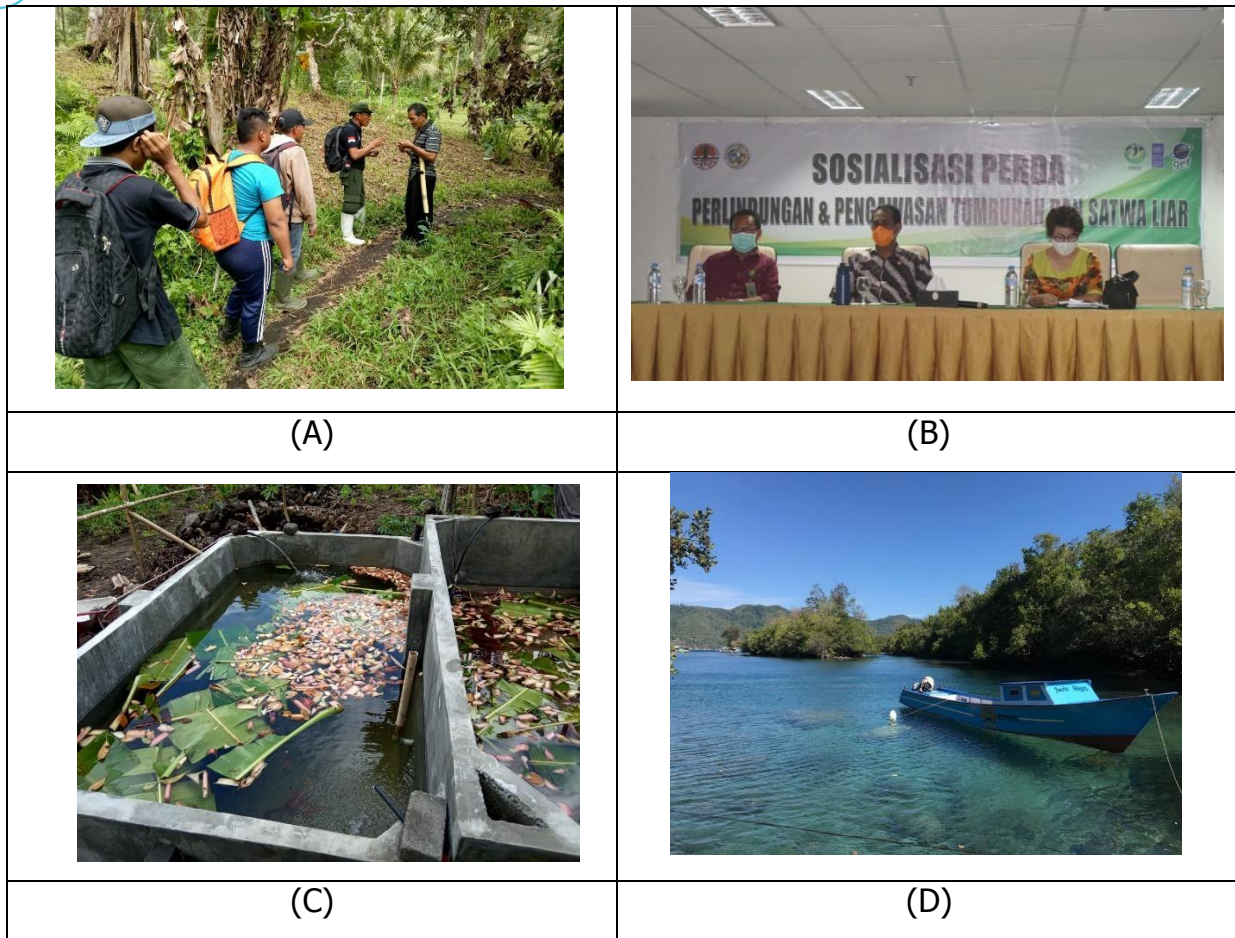
Lain halnya dengan bidang usaha wisata bahari, promosi dan pemasaran wisata ini perlu gencar dilakukan sembari membenahi internal perusahaan melalui penciptaan budaya perusahaan yang berorientasi pelayanan, kenyamanan dan keselamatan wisata bahari. Bidang usaha ini perlu ditunjang penyewaan peralatan yang memenuhi standar keamanan, penginapan serta kuliner seafood yang halal, lezat dan higienis.

Tabel 7. Kegiatan prioritas *exit strategy* proyek E-PASS pada KPHK Tangkoko Prioritas Jangka Pendek (1 – 3 tahun)

Kriteria <i>Exit Strategy</i>	Kegiatan Prioritas
Terpeliharanya integritas pengelolaan ekosistem kawasan konservasi (K.2)	1. Implementasi SMART Patrol RBM
	2. Pelaksanaan operasi peredaran TSL sesuai Ranperda PPTSL Kota Bitung
Kelola sosial dan ekonomi kawasan konservasi terwujud (K.6)	1. Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat Daerah Penyangga (arang aktif, perikanan bioflog, peternakan, wisata bahari)
	2. Pendampingan kegiatan Lembaga Pengelola Konservasi Desa/LPKD
	3. Memfasilitasi akses pasar produk-produk Lkawasan konservasi

Keterangan: K1-....K6 = Kriteria 1 -....Kriteria 6

Dua kegiatan *exit strategy* yang sangat diprioritaskan adalah SMART Patrol RBM dan operasi peredaran TSL. Implementasi RBM dinilai sangat urgen dilakukan, khususnya untuk memelihara keutuhan ekosistem KPHK Tangkoko yang sangat khas dengan kekayaan fauna khususnya (monyet Yaki dan maleo). Seiring dengan implementasi RBM tersebut operasi peredaran TSL perlu digalakkan karena sudah mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Bitung. Hal yang terpenting dari upaya mitigasi perburuan TSL, khususnya satwa yang bisa dikonsumsi dan diperdagangkan sebagai binatang peliharaan (pet) adalah peningkatan kesadaran masyarakat melalui jalur komunikasi pemimpin agama, pemimpin informal dan tokoh masyarakat, kampanye yang terus menerus dan terlebih pendidikan lingkungan hidup di sekolah.



Gambar 7. Kegiatan exit strategy jangka pendek di KPHK Tangkoko: (A) Implementasi SMART Patrol RBM; (B) Pembahasan Ranperda PPTSL Kota Bitung; (C) Pengembangan perikanan bioflog; (D) Pengembangan wisata bahari

Empat dari lima kegiatan prioritas jangka panjang exit strategy yang diusulkan di KPHK Tangkoko merupakan kegiatan internal dengan penekanan pada restorasi ekosistem, pembinaan habitat dan species, monitoring satwa dan patroli. Kegiatan internal KPHK Tangkoko ini dinilai perlu dilanjutkan karena permasalahan dan ancaman terhadap kelestarian satwa yang dilindungi satwa Yaki dan maleo sangat tinggi dan begitu juga dengan kegiatan restorasi ekosistem perlu ditingkatkan untuk pemulihan ekosistem. Khusus untuk patroli, pihak pengelola KPHK mendorong partisipasi Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD) dan hal ini sudah melembaga di wilayah tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat ini perlu terus dipelihara dengan membangun komunikasi dan saling percaya antara pihak KPHK Tangkoko dengan LPKD. Di samping itu, pihak KPHK harus senantiasa menyediakan insentif terhadap LPKD, agar kegiatan tersebut tetap berlanjut.





Kegiatan exit strategy inovatif berupa bank sampah perlu diwujudkan oleh pihak KPHK Tangkoko karena sangat efektif untuk mengurangi limbah sampah plastik dari kegiatan ekowisata dan sekaligus menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Kegiatan ini bisa menarik minat masyarakat sekitar KPHK sepanjang dilakukan sosialisasi dengan gencar dan pengaturan insentif dilakukan dengan transparan. Penanganan polusi sampah di wilayah ekowisata sangat strategis untuk mencegah kerusakan ekosistem kawasan konservasi dan meningkatkan citra KPHK Tangkoko sebagai destinasi ekowisata yang bebas polusi dan berkesan bagi para turis. Stigmatisasi *mesh tourism* dengan demikian tidak terjadi karena dapat mengatasi polusi sampah plastik melalui pengembangan bank sampah.

Tabel 8. Kegiatan prioritas *exit strategy* proyek E-PASS pada KPHK Tangkoko Prioritas Jangka Panjang (1 – 5 tahun)

Kriteria Exit Strategy	Kegiatan Prioritas
Terpeliharanya integritas pengelolaan ekosistem kawasan konservasi (K.2)	1. Melanjutkan kegiatan pemulihan ekosistem sesuai dengan RPE tahun 2019-2024 yang telah disusun
Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi tercapai (K.4)	1. Patroli partisipatif dengan melibatkan LKK dan LPKD
	2. Pembinaan habitat satwa kunci maleo
	3. Monitoring satwa kunci (monyet Yaki dan maleo)
Sumber pendanaan berkelanjutan bagi kawasan konservasi (K.5)	1. Pemanfaatan sampah plastik melalui bank sampah

Keterangan: K1-....K6 = Kriteria 1 - ....Kriteria 6





Gambar 8. Kegiatan exit strategy jangka panjang di KPHK Tangkoko: (A) Pemulihan ekosistem partisipatif; (B) Pembinaan habitat maleo; (C) Monitoring monyet Yaki; (D) Pemanfaatan sampah plastik

Penetapan kegiatan prioritas exit strategy pendanaan berkelanjutan diawali dengan studi valuasi ekonomi di ketiga kawasan konservasi tersebut yang dilaksanakan oleh Bappenas, dengan aspek yang dikaji mencakup: 1. hasil hutan; 2. polinasi tanaman dan pengendalian hama; 3. penyediaan air; dan 4. ekowisata serta penelitian. Hasil valuasi ekonomi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan prioritas yang perlu dikedepankan di TN. Lore Lindu dan TN. Bogani Nani Wartabone adalah penyediaan air, sedang di KPHK Tangkoko adalah destinasi ekowisata dan penelitian. Sebenarnya penelitian nilai total ekonomi jauh melampaui ke empat aspek tersebut yakni dengan menghitung secara cermat Nilai Guna Langsung, Nilai Guna Tidak Langsung, Nilai Pilihan, Nilai Warisan dan Nilai Keberadaan (Subarudi, 2009). Kalau dikaitkan dengan mekanisme pendanaan dan pengembangan institusi, aspek ekonomi yang perlu dikaji mencakup konservasi biodiversitas, penyerapan karbon, penyediaan air, bioprospeksi dan ekoturisme (Wunder et al. 2005; Verweij, 2014). Di samping itu, mewujudkan pemanfaatan jasa lingkungan dalam pembangunan ekonomi hijau perlu dilakukan eliminasi proxy (asumsi) dan menciptakan enabling conditions.

Terkait dengan studi Bappenas tersebut, 29 kegiatan yang dinilai potensial oleh Bappenas ditapis oleh tujuh panelis dan dihasilkan 23 kegiatan masuk dalam kategori Prioritas Tinggi dan 6 kegiatan masuk dalam Prioritas Sedang (Lampiran 6.). Dari ke 23 kegiatan tersebut diusulkan 5 kegiatan yang mempunyai nilai bobot USG





tertinggi yang diusulkan menjadi kegiatan prioritas exit strategy jangka pendek (Tabel 9.), dan 5 kegiatan yang mempunyai nilai bobot USG tertinggi kedua yang diusulkan menjadi kegiatan prioritas exit strategy jangka panjang (Tabel 10.). Hasil penapisan ini sama dengan dua kegiatan hasil studi Bappenas, yakni pemanfaatan air berkelanjutan di TN Lore Lindu dan pengembangan ekowisata di KPHK Tangkoko. Namun untuk TN Bogani Nani Wartabone, kegiatan prioritas bukan pemanfaatan air tetapi pengembangan model gula aren. Di samping pemanfaatan air, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat juga diusulkan di TN. Lore Lindu. Untuk ketiga kawasan konservasi, membangun komitmen pelaksanaan dan dukungan anggaran publik juga diusulkan sebagai kegiatan prioritas exit strategy. Sebagai gambaran kegiatan prioritas exit strategy jangka pendek terkait dengan pendanaan berkelanjutan disajikan pada Gambar 9.

Tabel 9. Kegiatan prioritas *exit strategy* pendanaan berkelanjutan proyek E-PASS Prioritas Jangka Pendek (1 – 3 tahun)

Kriteria <i>Exit Strategy</i>	Kegiatan Prioritas
Mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan kawasan konservasi	1. Pemanfaatan air berkelanjutan di TN Lore Lindu
	2. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di KPHK Tangkoko
	3. Pengembangan model gula aren di TN Bogani Nani Wartabone
	4. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di TN. Lore Lindu
	5. Membangun komitmen pelaksanaan & dukungan anggaran publik untuk implementasi model bisnis

Keterangan: K1-....K6 = Kriteria 1 -....Kriteria 6





**Gambar 9. Kegiatan exit strategy jangka pendek terkait pendanaan berkelanjutan: (A) Pemanfaatan air di TNLL; (B) Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di KPHK Tangkoko; (C) Pengembangan gula aren di TNBNW; (D) Ekowisata berbasis masyarakat di TNLL**

Untuk kegiatan prioritas exit strategy jangka panjang yang terkait dengan pendanaan berkelanjutan yang dilakukan Bappenas yang kemudian ditapis oleh Tim Ahli beserta panelis yang ditunjuk, diusulkan lima kegiatan terkait dengan: pengusulan pendanaan bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pembangunan sarpras ekowisata dan interpretasi ekowisata di KPHK Tangkoko serta penguatan kapasitas staf TN/KPHK. Peluang pendanaan SBSN untuk penguatan sistem pengelolaan kawasan konservasi sangat tinggi sebagaimana telah diperoleh beberapa unit Taman Nasional di Indonesia.

**Tabel 10. Kegiatan prioritas exit strategy pendanaan berkelanjutan proyek E-PASS Prioritas Jangka Panjang (1–5 tahun)**

Kriteria Exit Strategy	Kegiatan Prioritas
Mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan kawasan konservasi (K.5)	1. Penguatan dukungan persiapan pengusulan SBSN dan pemulihan investasi SBSN
	2. Pembangunan sarpras ekowisata di KPHK Tangkoko
	3. Pengembangan interpretasi edukasi wisata di KPHK Tangkoko
	4. Dukungan SBSN untuk pembangunan infrastruktur di kawasan konservasi
	5. Pendampingan dan penguatan kapasitas staf TN/KPHK dan jejaring kerja untuk pemberdayaan masyarakat

Keterangan: K1-....K6 = Kriteria 1 -....Kriteria 6



Pendanaan tersebut dapat diperoleh sepanjang kegiatan yang diusulkan sangat layak secara ekonomi dan finansial. Di samping itu, kegiatan yang diusulkan harus mempunyai tujuan yang jelas dan mempunyai dampak ekonomi berganda (multiplier effects) terhadap kegiatan ekonomi lain dan penghidupan masyarakat yang berada dalam lansekap obyek wisata tersebut. Untuk merealisasikan tersebut, perlu disusun proposal pengajuan SBSN yang menarik dan berkualitas. Penguatan kapasitas staf TN/KPHK untuk menyusun proposal tersebut menjadi suatu keharusan.

Pembangunan ekowisata di KPHK Tangkoko merupakan kegiatan prioritas exit strategy yang perlu didukung pendanaan yang memadai. Dengan sarana prasarana ekowisata yang baik dan dilengkapi dengan petugas interpretasi edukasi wisata yang berkualitas niscaya ekowisata di KPHK Tangkoko akan maju. Kontribusi ekowisata terhadap perekonomian, baik dampak langsung (direct), dampak tidak langsung (indirect) dan ikutan /lanjutan (induced) (Lindberg 1996) di wilayah ini perlu dirancang untuk lebih menguntungkan bagi kelestarian kawasan konservasi dan masyarakat. Fasilitas penginapan, restoran/rumah makan dan toko penjual cinderamata perlu dikembangkan dan dikelola dengan baik.

Untuk mewujudkan pendanaan SBSN dan pengembangan ekowisata di kawasan konservasi tersebut perlu didukung oleh kapasitas staf TN/KPHK yang memadai. Oleh karena itu, penyelenggaraan berbagai pelatihan dan memperluas jejaring (networking) terkait dengan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan. Hubungan kerja dan sosial yang harmonis antara staf kawasan konservasi dengan masyarakat perlu senantiasa ditingkatkan.

### **C. Stakeholders Potensial**

Identifikasi stakeholders dalam kegiatan exit strategy proyek E-PASS dilakukan untuk dua hal yakni untuk mendukung pendanaan berkelanjutan exit strategy dan mendukung kegiatan-kegiatan prioritas exit strategy jangka pendek (1 – 3 tahun) dan jangka panjang (1 – 5 tahun). Kegiatan-kegiatan prioritas exit strategy yang akan diidentifikasi dan dipetakan peranan stakeholders-nya adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat sekitar TN/KPHK dalam kerangka Kriteria 6 “Kelola sosial dan ekonomi kawasan konservasi terwujud”. Keberlanjutan sosial dan ekonomi dalam pengelolaan kawasan konservasi ini sangat strategis untuk



menunjang integritas ekosistem dan umumnya melibatkan para pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Khusus untuk kegiatan-kegiatan prioritas exit strategis yang berkaitan dengan teknis pengelolaan TN/KPHK, seperti pelaksanaan patroli, aplikasi RBM dan monitoring biodiversitas tidak dianalisis peran stakeholdersnya karena merupakan kegiatan internal TN/KPHK. Namun demikian, kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan secara sukarela melalui patroli partisipatif, pengendalian kebakaran hutan dan restorasi ekosistem dianalisis sebagai kontribusi (in-kind contributions) yang masuk dalam skema pembiayaan berkelanjutan sistem pengelolaan kawasan konservasi.

Berdasarkan hasil analisis pendanaan berkelanjutan yang dilakukan Bappenas, salah satu sumber pendanaan yang mempunyai peluang yang tinggi adalah mekanisme pendanaan SBSN. Tiga stakeholders kunci untuk merealisasikan SBSN tersebut adalah Kementerian LHK, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dengan peran yang saling mendukung sebagaimana disajikan pada Tabel 11.

Kementerian LHK mempunyai peran strategis untuk mengajukan proposal yang berkualitas sesuai dan persyaratan teknis minimum yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Proposal tersebut harus menguraikan secara eksplisit latar belakang, tujuan, prospek bisnis dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berikut uraian pendanaan yang dibutuhkan. Peran selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan SBSN tersebut secara profesional dengan tata kelola bisnis yang baik.

Kementerian PPN/Bappenas berada pada peran menilai proposal yang diajukan secara substantif apakah telah sesuai dengan Prioritas Nasional dan menilai kesiapan manajemen TN/KPHK untuk melaksanakan SBSN tersebut. Jika proposal sudah memenuhi persyaratan teknis tersebut dan kapasitas pengusul sudah memenuhi persyaratan teknis tersebut maka selanjutnya Kementerian PPN/Bappenas menyusun Daftar Kegiatan Prioritas dan pada saatnya setelah pembiayaan SBSN diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas akan memantau pelaksanaan SBSN.

Tabel 11. Peran *stakeholders* dalam implementasi SBSN

STAKEHOLDER	PERAN
Kementerian LHK	Penyiapan rencana proyek/kegiatan dan studi kelayakannya
	Pengajuan usulan proyek/kegiatan
	Pelaksanaan proyek/pengelolaan <i>pasca</i> konstruksi
Kementerian Keuangan	Memberikan pertimbangan terkait aspek fiskal
	Melakukan penelaahan usulan proyek SBSN
	Memberikan dukungan dan pendampingan pengusulan pembiayaan melalui mekanisme SBSN
	Mengalokasikan dalam APBN/P
	Melaksanakan penerbitan SBSN
Kementerian PPN/Bappenas	Memberikan pertimbangan terkait dengan Prioritas Nasional
	Melakukan penilaian/penelaahan kelayakan dan kesiapan proyek/kegiatan
	Menyusun Daftar Kegiatan Prioritas
	Memantau pelaksanaan SBSN

Pembiayaan SBSN harus dilihat dari perspektif bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi keuangan. Kementerian Keuangan melakukan penelaahan usulan secara detail, apakah layak didukung dari segi pembiayaan. Aspek-aspek keberlanjutan bisnis dengan tingkat penghasilan yang memadai serta menggerakkan kegiatan ekonomi lain menjadi pertimbangan utama pendanaan SBSN tersebut. Jika proposal sudah layak secara finansial dan ekonomi, maka Kementerian Keuangan akan mengalokasikan anggaran dalam APBN/P dan selanjutnya menerbitkan SBSN.

Segera setelah anggaran SBSN dianggarkan dalam APBN/P, kegiatan mulai dilaksanakan mulai dari proses pelelangan, pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan/bisnis SBSN yang terkait dengan pelayanan jasa konservasi. Pada tahap pelaksanaan ini, *stakeholders* utama terdiri dari pihak manajemen TN/KPHK, Ditjen KSDAE, Setjen KLHK, Itjen KLHK, Kementerian Keuangan (Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPN), Kementerian PPN/Bappenas (monitoring dan evaluasi), mitra kerja pemborong yang memenangkan lelang, konsumen yang menggunakan jasa yang disediakan oleh TN/KPHK melalui skema SBSN dan masyarakat sekitar TN/KPHK yang terlibat dalam





operasionalisasi sehari-hari SBSN tersebut. Pihak TN/KPHK harus melibatkan masyarakat dalam proses bisnis SBSN tersebut sehingga masyarakat mendapat manfaat berupa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan. Pelibatan masyarakat (community engagement) ini sangat strategis untuk keberlanjutan usaha/bisnis konservasi karena masyarakat merupakan salah satu faktor penentu keberlanjutan yang sangat kuat (very strong sustainability) dari pembangunan melalui penciptaan kohesi sosial dan inklusi sosial (social inclusiveness) dalam praktek bisnis konservasi. Dengan demikian, bisnis konservasi yang dibiayai oleh SBSN akan berkembang dan berkelanjutan karena didukung sepenuhnya oleh masyarakat dan pada akhirnya berdampak positif pada penguatan sistem pengelolaan TN/KPHK.

Sumber pendanaan alternatif lain yang dinilai dapat diperoleh TN/KPHK adalah pendanaan berasal dari Badan Layanan Umum (BLU), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagaimana SBSN, skema pembiayaan ini juga mempunyai persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi pemohon. Hal ini dilakukan karena pendanaan ini dilihat dari perspektif investasi/bisnis dengan mengantisipasi dan memitigasi risiko kegagalan investasi yang akan terjadi. Sebagai suatu investasi, pengelola harus mempunyai budaya kewirausahaan yang kuat, etika dan kejujuran bisnis dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Untuk itu, kegiatan pendanaan ini perlu dirancang dengan seksama mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya dengan peran multistakeholders yang saling memperkuat sebagaimana disajikan pada Tabel 12. berikut ini.

Tabel 12. Peran *stakeholders* dalam implementasi BLU, BPDLH dan BLUD

STAKEHOLDER	PERAN
Kementerian LHK	Penentuan tipologi kawasan konservasi untuk menilai kelayakan penerapan pola pengelolaan keuangan BLU, BPDLH dan BLUD
	Diskusi dan masukan dari pengelola kawasan konservasi untuk sumber-sumber pendanaan potensial kawasan konservasi
	Pembentukan Dewan Pengawas dan Pembina BLU dalam rangka mensukseskan implementasi BLU Mandiri pada kawasan konservasi yang sudah memenuhi prasyarat
	Revisi P.03/Menhut-II/2007 untuk menambahkan Tusi pengembangan bisnis dan penyesuaian struktur organisasi dan tata kelola pada satuan kerja yang menerapkan BLU



STAKEHOLDER	PERAN
	dengan unit pelaksanaannya TN/KPHK
	Meninjau kegiatan prioritas berdasarkan dokumen rencana pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan secara komprehensif sebagai dasar pengelolaan pendanaan
Pengelola TN/KPHK	Menyiapkan tim khusus untuk persiapan pemenuhan persyaratan pembiayaan melalui jendela pendanaan BPD LH, persyaratan TN/KPHK menjadi BLU Mandiri atau KS kemitraan melalui dukungan BLUD
	Integrasi program bersama antara TN/KPHK dengan Pemda dan aktif bekerjasama dengan lembaga non pemerintah dalam pengembangan dan promosi potensi TN/KPHK
	Memastikan jenis layanan yang akan dikembangkan dalam pengelolaan pendanaan baik melalui jendela pendanaan BPD LH, BLU Mandiri maupun bermitra dengan BLUD Pemerintah Daerah
	Pembinaan dan pengembangan SDM dalam rangka peningkatan profesionalisme manajemen di bidang bisnis konservasi melalui kegiatan diklat yang lebih intens
Kementerian Keuangan	Penerapan SOP TN/KPHK sebagai bagian dari jendela pendanaan BPD LH
	Memberikan pendampingan kepada KLHK dan TN/KPHK terkait proses administrasi perubahan status BLU berdasarkan tahapan PMK 180/2016
	Memberikan dukungan dan pendampingan pengusulan pembiayaan melalui mekanisme jendela yang ada di BPD LH
Kementerian PPN/Bappenas	Memastikan bahwa Kebijakan, Rencana dan Program Nasional, memasukkan bisnis atau jenis layanan TN/KPHK sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	Membuat panduan terkait akses pembiayaan bagi TN/KPHK melalui jendela pendanaan yang tersedia dan melakukan sosialisasi ke tingkat tapak
	Menjaga profesionalitas, akuntabilitas, transparansi dalam hal tata kelola dan penempatan investasi untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan donor
Pemerintah Daerah	Fungsi koordinasi dan mekanisme <i>benefit-sharing</i> . Jika kawasan lintas kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, jika lintas provinsi dilakukan oleh forum koordinasi
	Dukungan dan komitmen untuk konservasi
	Integrasi program yang berpotensi dilakukan bersama-sama dengan berbagi biaya-manfaat
	Menyusun dan menetapkan Perda (Gubernur/Bupati) sebagai payung hukum pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi melalui dukungan BLUD di bawah instansi/SKPD yang telah ditetapkan

Pemenuhan persyaratan dan ketentuan mulai dari penyusunan proposal, pembahasan dan perbaikan proposal, pencatatan dalam administrasi keuangan atau instansi yang mengelola skema pendanaan tersebut, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan untuk ketiga skema pendanaan ini sangat ketat dan menuntut kualifikasi pelaksana kegiatan yang profesional dan taat aturan. Risiko investasi dalam skema pendanaan berkelanjutan untuk mendukung penguatan sistem pengelolaan kawasan konservasi tidak akan terjadi sepanjang



pihak pengelola sudah memenuhi kualifikasi dan saling mendukung dalam kerja tim yang baik.

Dalam kaitannya dengan mempromosikan kegiatan-kegiatan prioritas exit strategy yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memitigasi ancaman terhadap kelestarian kawasan konservasi, perlu pemahaman yang komprehensif tentang karakteristik stakeholders, situasi sosial ekonomi dan biofisik kawasan konservasi, tingkat ancaman terhadap integritas ekosistem saat ini dan isu-isu yang berkaitan dengan interaksi dan dampak masyarakat terhadap kelestarian kawasan konservasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan stakeholders analysis secara mendalam dan strategi pelibatan stakeholders (stakeholders engagement strategy), utamanya masyarakat melalui identifikasi stakeholders utama, perilaku stakeholders terhadap kegiatan konservasi, relasi di antara stakeholders, konflik di antara stakeholders dan kerjasama yang ada saat ini di antara stakeholders (Rode dan Wittmer, 2015). Hal ini digambarkan dalam relasi pengaruh (power) dan kepentingan (interests) serta pemetaan stakeholders (stakeholders mapping).

Kegiatan prioritas exit strategy di Taman Nasional Lore Lindu yang perlu didukung oleh stakeholders utama sebanyak enam kegiatan. Tiga dari enam kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan capacity building untuk menyiapkan LPKD meraih kemandirian dalam menjalankan usaha/bisnis terkait konservasi keanekaragaman hayati. Kegiatan tersebut meliputi: Kerjasama kemitraan dengan masyarakat sekitar; Meningkatkan kegiatan pendampingan masyarakat secara intensif dan; Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kerajinan tangan, kue tradisional dan gula aren dan turunannya (Tabel 13).

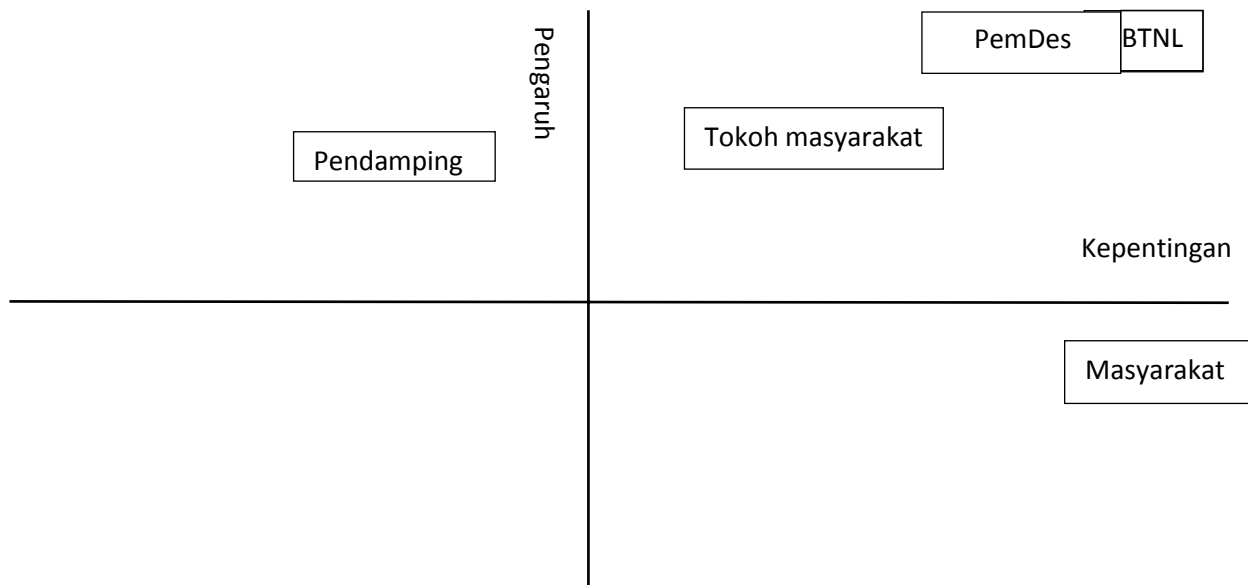
Tabel 13. Kegiatan prioritas *exit strategy* dan *stakeholders* untuk pemberdayaan masyarakat di TN. Lore Lindu

No.	Kegiatan prioritas exit strategy	Stakeholders
1.	KS Kemitraan dengan masyarakat sekitar	BBTNLL, masyarakat, Pemdes, Pendamping, tokoh masyarakat
2.	Meningkatkan kegiatan pendampingan masyarakat secara intensif	BBTNLL, masyarakat, Pemdes, Pendamping, tokoh masyarakat
3.	Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kerajinan tangan, kue tradisional, gula aren dan turunannya	BBTNLL, LPKD, Pemdes, BUMDES, Dinas Perindustrian/Perdagangan Kab., Trainer home industry
4.	Kegiatan pengembangan wisata air panas di Desa	BBTNLL, LPKD Lawua, PemDes. Pendamping,



No.	Kegiatan prioritas exit strategy	Stakeholders
	Lawua	Kel. Bisnis wisata air, Dinas Pariwisata Kab. PHRI/Travel, Dinas PU Kab., BUMDES, BKSDA Sulteng
5.	Pengembangan wisata maleo di Desa Pakuli Utara	BBTNLL, LPKD Singgani, PemDes. Pendamping, Kel. Bisnis maleo, Dinas Pariwisata Kab. PHRI/Travel, Dinas PU Kab., BUMDES, BKSDA Sulteng
6.	Pengembangan usaha perikanan dan peternakan kelompok masyarakat	BBTNLL, LPKD setempat, PemDes. Pendamping, Kel. Bisnis perikanan/peternakan, Dinas Perikanan /Peternakan Kab.,BUMDES, Trainer perikanan/ peternakan

Berikut ini disajikan pengaruh dan kepentingan para stakeholders kegiatan prioritas exit strategy tersebut (Gambar 10.).



Gambar 10. Pengaruh dan kepentingan *stakeholders* pada kegiatan *exit strategy capacity building* di TN Lore Lindu

Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dan Pemerintah Desa mempunyai pengaruh dan kepentingan yang sangat kuat terhadap kegiatan exit strategy capacity building di wilayah sekitar taman nasional ini. Hal ini terkait dengan otoritas dan kepentingan akan suksesnya kegiatan capacity building tersebut. Bagi pihak Balai, hal ini akan menjadi ukuran kinerja keberhasilan Balai dalam menerapkan pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat dan bagi Kepala Desa menjadi prestasi bagi individu Kepala Desa dan pendorong pembangunan di wilayah desa yang dipimpinnya. Masyarakat sebagai salah satu subyek kegiatan ini



mempunyai pengaruh yang lemah tetapi kepentingannya sangat tinggi. Hal ini terkait dengan perkembangan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat yang masih relatif baru di wilayah tersebut namun kepentingan yang sangat tinggi terkait dengan harapan masyarakat akan tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat melalui kegiatan Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD). Lain halnya dengan tokoh masyarakat sebagai informal leader mempunyai pengaruh sedikit di bawah Balai TNLL dan Pemdes dan kepentingan termasuk tingkat sedang karena tokoh masyarakat tidak terlibat langsung dalam kegiatan Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD). Pendamping dalam posisi pengaruh tingkat sedang dan kepentingan yang rendah, karena sifatnya sebagai tenaga kontrak pada kegiatan proyek E-PASS yang berfungsi memperlancar pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan kegiatan prioritas exit strategy terkait dengan pemberdayaan masyarakat di TNLL, baik kegiatan capacity building maupun kegiatan bidang usaha ekowisata, konservasi, agribisnis dan home industry, perlu dilakukan pemetaan stakeholders (stakeholders mapping) guna mendayagunakan modal sosial yang ada secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian kawasan konservasi.

Dalam pemetaan stakeholders perlu diidentifikasi siapa stakeholders utama (key stakeholders) baik internal maupun eksternal. Sering sekali daftar stakeholders menjadi sangat panjang karena mengakomodir berbagai pertimbangan. Misalnya instansi pusat dan provinsi dimasukkan sebanyak-banyaknya padahal keterlibatannya pada kegiatan/proyek sangat kecil. Dalam hal ini, para stakeholders tersebut digolongkan sebagai stakeholders pelengkap (secondary stakeholders). Pembatasan pada stakeholders utama dengan perilakunya terhadap konservasi keanekaragaman hayati, situasi konflik dan kerjasama menjadi sangat penting dalam analisis ini.

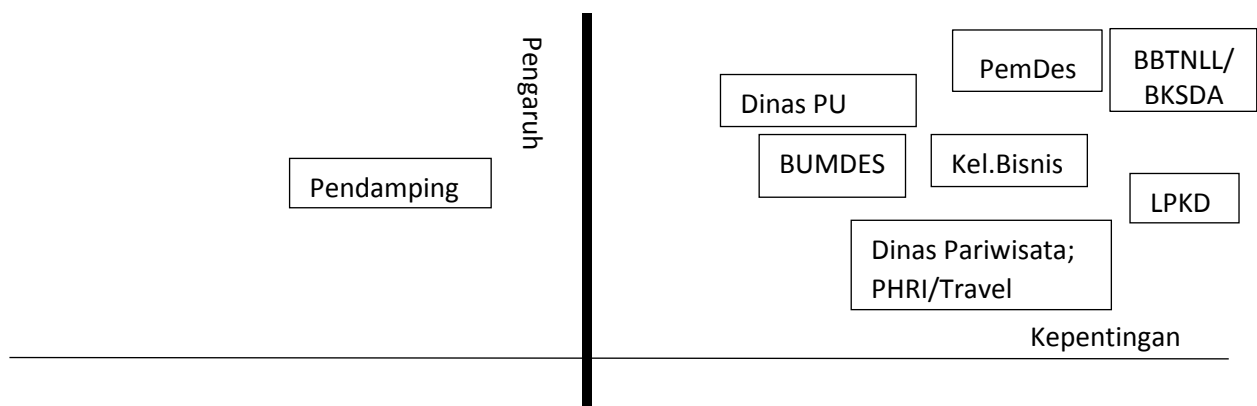
Tabel 14. *Stakeholder mapping* kegiatan prioritas exit strategy di TN Lore Lindu

Stakeholder	Perilaku thdp tujuan konservasi	Konflik di antara stakeholders	Kerjasama di antara stakeholders	Tingkat pelibatan yg diinginkan	Status keterlibatan
BBTNLL	Mandat, mewujudkan konservasi	Dgn perusak hutan, al. tambang, pemburu TSL	Dgn NGOs, Pemda dan LPKD	Sangat tinggi	Pelibatan kuat
LPKD	Kesadaran konservasi	Mulai anti pd pemburu	Dgn TNLL, Pemdes dan	Tinggi	Pelibatan



	berkembang	TSL	Dinas Kab. terkait		kuat
PemDes	Mendukung konservasi	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, Dinas Kab terkait. LPKD, PemKec	Tinggi	Pelibatan kuat
PemKec	Mendukung konservasi	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, Dinas Kab terkait. LPKD, PemDes	Tinggi	Pelibatan kuat
Pendamping	Mendukung konservasi	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LPKD, PemDes. Tokoh masy.	Tinggi	Pelibatan kuat
Tokoh masy.	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LPKD, PemDes. Pendamping	Tinggi	Pelibatan kuat
Kelompok bisnis	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LPKD, PemDes. PemKec. Dinas2	Tinggi	Pelibatan kuat
Dinas Perindustrian	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LPKD, PemDes. PemKec. Dinas2	Tinggi	Pelibatan kuat
Dinas Perdagangan	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LPKD, PemDes. PemKec. Dinas2	Tinggi	Pelibatan kuat
Dinas Pariwisata	Mendukung konservasi	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LPKD, PemDes. PemKec. Dinas2	Tinggi	Pelibatan kuat
Dinas PUPR	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LPKD, PemDes. PemKec. Dinas2	Tinggi	Pelibatan kuat
BKSDA Sulteng	Mandat, mewujudkan konservasi	Dgn perusak hutan, al. tambang, pemburu TSL	Dgn BBTNLL, PemDes. PemKec. Dinas2	Sangat Tinggi	Pelibatan kuat
PHRI/Travel	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LKPD. PemDes, Dinas Pariwisata	Tinggi	Pelibatan kuat
Trainer	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LKPD. PemDes.	Tinggi	Pelibatan kuat

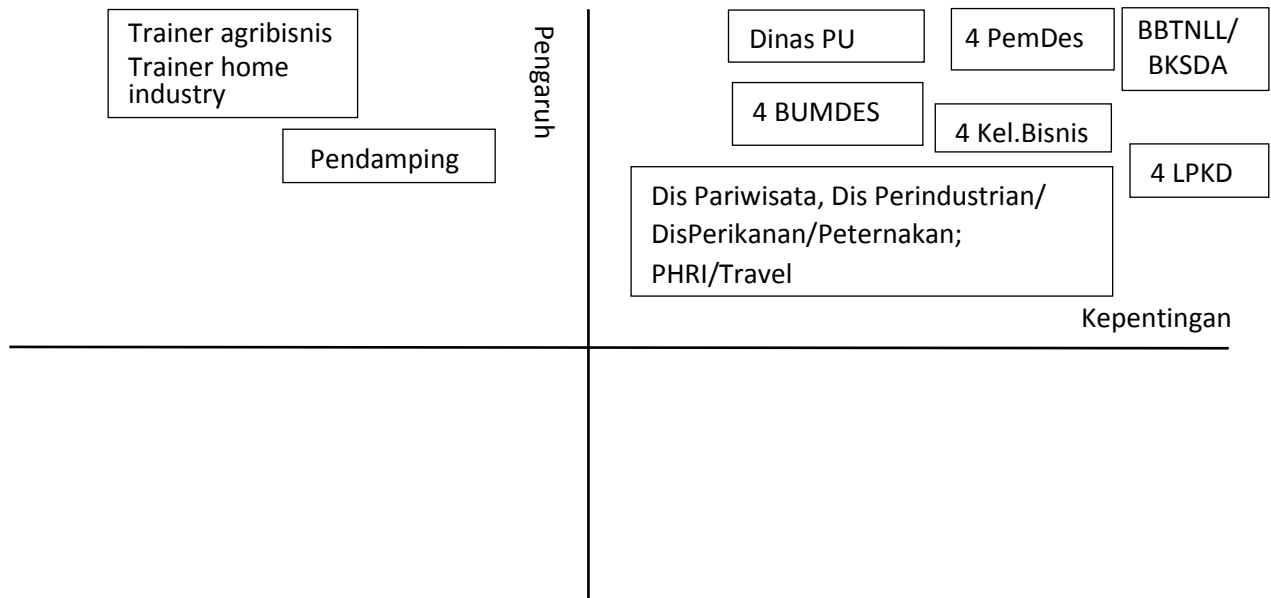
Pengembangan ekowisata perlu didukung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten dan PHRI/Travel untuk menyiapkan destinasi wisata masuk dalam pemasaran dan promosi pariwisata. Dinas PU diharapkan meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata dengan membangun infrastruktur jalan yang memadai. Pemerintah Desa mempunyai pengaruh yang kuat untuk mendorong ekowisata dan dapat memfasilitasi pembiayaan ekowisata melalui BUMDES. Pengaruh LPKD belum kuat, karena secara kelembagaan masih baru terbentuk, namun kepentingannya sangat tinggi. Oleh karena itu perlu mengundang kelompok menanamkan investasinya di bidang ini. Berikut ini disajikan pengaruh dan kepentingan para stakeholders kegiatan prioritas exit strategy tersebut (Gambar 11.).



Gambar 11. Pengaruh dan kepentingan *stakeholders* pada kegiatan *exit strategy* pengembangan ekowisata di TN Lore Lindu



Untuk pengembangan agribisnis dan home industry perlu melibatkan stakeholders yang mempunyai pengaruh terhadap kemajuan ke dua usaha tersebut (Gambar 12).



Gambar 12. Pengaruh dan kepentingan stakeholders pada kegiatan exit strategy pengembangan agribisnis dan home industry di TN Lore Lindu

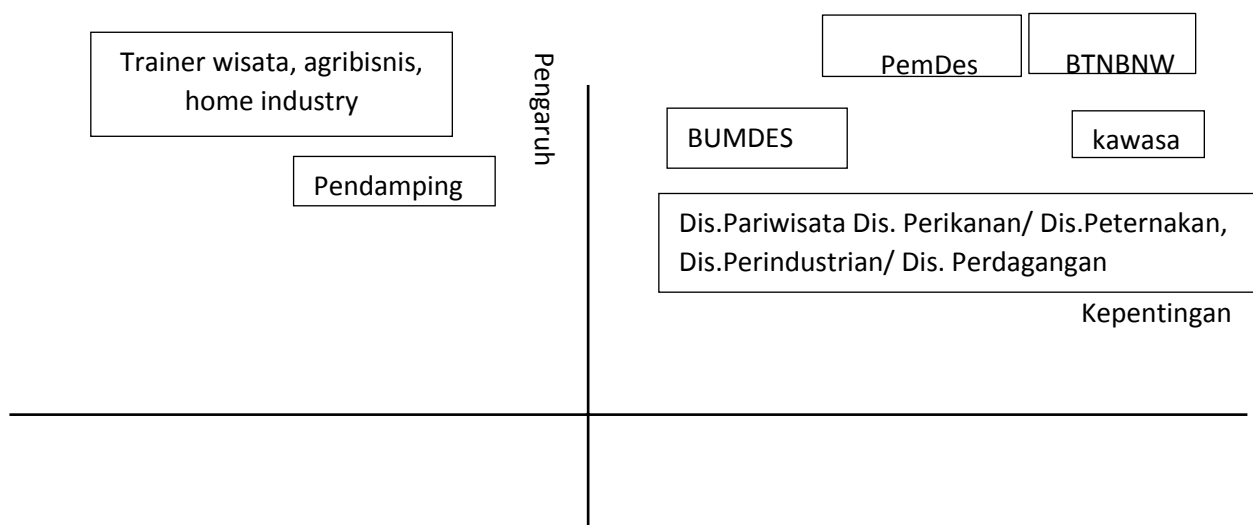
Kegiatan prioritas exit strategy di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang perlu didukung stakeholders utama sebanyak enam kegiatan. Dua dari enam kegiatan tersebut difokuskan pada kegiatan capacity building untuk menyiapkan LPKD menjadi lembaga yang tangguh dan mandiri dalam menjalankan usaha/bisnis pemanfaatan dan pengelolaan modal alam dan kekayaan sumber daya hayati serta kegiatan inovatif lainnya yang berdampak pada kelestarian kawasan konservasi. Kegiatan tersebut adalah: Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Kesepakatan Konservasi Masyarakat/ KKM dan diikuti dengan replikasi kegiatan di kelompok lain; dan Penguatan BUMDES sebagai organisasi pengelola bisnis komoditas HHBK/ekowisata (Tabel 15).



Tabel 15. Kegiatan prioritas exit strategy dan stakeholders untuk pemberdayaan masyarakat di TN. Bogani Nani Wartabone

No.	Kegiatan prioritas exit strategy	Stakeholders
1.	Penanaman pohon buah-buahan pada batas kawasan	BTNBNW, masyarakat, Pemdes, tokoh masyarakat
2.	Pengembangan aren, kemiri, dan pala sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan kawasan melalui skema pemulihan ekosistem kolaboratif	BTNBNW, masyarakat, Pemdes, tokoh masyarakat
3.	Pemberdayaan masyarakat melalui Kesepakatan Konservasi Masyarakat/KKM dan diikuti dengan replikasi kegiatan di kelompok lain	BTNBNW, Kesepakatan Masyarakat/KKM, Pemdes, Dinas Perindustrian/Perdagangan Kab., Trainer home industry
4.	Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat	BTNBNW, Kesepakatan Masyarakat/KKM, Pendamping, Dinas Pariwisata Kab. PHRI/Travel, Dinas PU Kab., BUMDES, BKSDA Sulut dan BKSDA Gorontalo
5.	Melanjutkan skema kontribusi masyarakat terhadap kegiatan konservasi (a.l. pemulihan ekosistem, ekowisata, pengendalian kebakaran hutan)	BTNBNW, Kesepakatan Masyarakat/KKM, BUMDES, Pendamping, Dinas Pariwisata Kab. PHRI/Travel, Dinas PU Kab., BKSDA Sulut dan BKSDA Gorontalo
6.	Penguatan BUMDES sebagai organisasi pengelola bisnis komoditas HHBK/ekowisata	BTNBNW, Kesepakatan Masyarakat/KKM, BUMDES, Pendamping, Dinas Perikanan/Peternakan, Dinas Pariwisata Kab., Trainer agribisnis/home industry/ekowisata

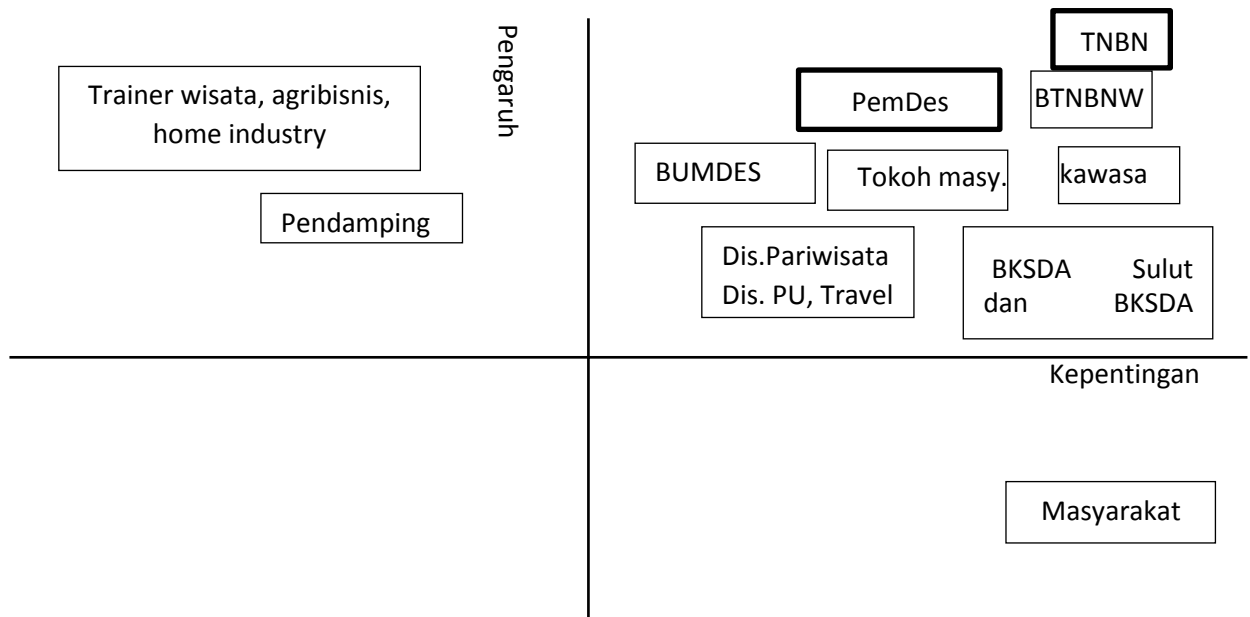
Balai TN. Bogani Nani Wartabone mempunyai pengaruh dan kepentingan yang paling tinggi, kemudian diikuti oleh Kesepakatan Konservasi Masyarakat/KKM. Pemerintah Desa mempunyai pengaruh yang kuat namun kepentingannya termasuk kategori sedang karena tidak terlibat dalam bisnis KKM dimaksud. Pengaruh Pemerintah Desa yang sangat kuat tersebut terkait dengan legalitas dan kewenangan yang dimilikinya sebagai pejabat desa yang dipilih langsung oleh warga desa dan kemudian disahkan oleh Pemerintah Daerah (Bupati).



Gambar 13. Pengaruh dan kepentingan stakeholders pada kegiatan exit strategy usaha capacity building di TN Bogani Nani Wartabone



Empat kegiatan lainnya terkait dengan bidang usaha ekowisata, home industry, agribisnis dan kegiatan konservasi, sebagaimana disajikan pada Gambar 14.



**Gambar 14.** Pengaruh dan kepentingan stakeholders pada kegiatan exit strategy usaha ekowisata, konservasi, home industry dan agribisnis di TN Bogani Nani Wartabone

Seluruh stakeholders saling mendukung untuk pemberdayaan masyarakat untuk menjalankan roda bisnis dimaksud. Kegiatan prioritas exit strategy yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di TNBNW, baik capacity building maupun usaha ekowisata, restorasi dan konservasi, agribisnis (perikanan dan peternakan) dan home industry, perlu dipetakan fungsi, peran, potensi konflik dan kerjasama di antara stakeholders sebagai dasar untuk menetapkan langkah-langkah prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian kawasan konservasi.

Tabel 16. *Stakeholders mapping* kegiatan prioritas *exit strategy* di TN Bogani Nani Wartabone

Stakeholder	Perilaku thdp tujuan konservasi	Konflik di antara stakeholders	Kerjasama di antara stakeholders	Tingkat pelibatan yg diinginkan	Status keterlibatan
BTNBNW	Mandat, mewujudkan konservasi	Dgn perusak hutan, al. tambang, pemburu TSL	Dgn NGOs, Pemda dan LPKD	Sangat tinggi	Pelibatan kuat
kesepakatan konservasi masyarakat/ KKM	Kesadaran konservasi berkembang	Mulai anti pd pemburu TSL	Dgn TNLL, Pemdes dan Dinas Kab. terkait	Tinggi	Pelibatan kuat
PemDes	Mendukung konservasi	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, Dinas Kab terkait. LPKD, PemKec	Tinggi	Pelibatan kuat
PemKec	Mendukung konservasi	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, Dinas Kab terkait. LPKD, PemDes	Tinggi	Pelibatan kuat
Pendamping	Mendukung konservasi	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LPKD, PemDes. Tokoh masy.	Tinggi	Pelibatan kuat
Tokoh masy.	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LPKD, PemDes. Pendamping	Tinggi	Pelibatan kuat
Kelompok bisnis	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LPKD, PemDes. PemKec. Dinas2	Tinggi	Pelibatan kuat
Dinas Perindustrian	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LPKD, PemDes. PemKec. Dinas2	Tinggi	Pelibatan kuat
Dinas Perdagangan	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LPKD, PemDes. PemKec. Dinas2	Tinggi	Pelibatan kuat
Dinas Pariwisata	Mendukung konservasi	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LPKD, PemDes. PemKec. Dinas2	Tinggi	Pelibatan kuat
Dinas PUPR	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LPKD, PemDes. PemKec. Dinas2	Tinggi	Pelibatan kuat
BKSDA Sulut	Mandat, mewujudkan konservasi	Dgn perusak hutan, al. tambang, pemburu TSL	Dgn BBTNLL, PemDes. PemKec. Dinas2	Sangat Tinggi	Pelibatan kuat
BKSDA Gorontalo	Mandat, mewujudkan konservasi	Dgn perusak hutan, al. tambang, pemburu TSL	Dgn BBTNLL, PemDes. PemKec. Dinas2	Sangat Tinggi	Pelibatan kuat
PHRI/Travel	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LKPD. PemDes, Dinas Pariwisata	Tinggi	Pelibatan kuat
Trainer	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn BBTNLL, LKPD. PemDes.	Tinggi	Pelibatan kuat

Secara umum, relasi antara stakeholders sangat baik dan menjadi modal untuk menggalang kerjasama. Kerjasama menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan sinergitas sehingga dampak positif dari kegiatan bisnis tersebut dapat meningkat. Konflik hanya terjadi antara pihak pengelola TN. Bogani Nani Wartabone dengan para petambang ilegal dan pemburu TSL. Para anggota kawasan KKM juga mulai tumbuh kesadarannya untuk menentang kegiatan ilegal tersebut di wilayah TN. Bogani Nani Wartabone. Sebagian anggota KKM sebelumnya melakukan berbagai praktek merusak ekosistem kawasan konservasi berupa perburuan satwaliar, perambahan dan pertambangan liar namun para anggota KKM tersebut sekarang telah sadar dan berubah menjadi pendukung konservasi kawasan dan biodiversitas dan bahkan secara sukarela ikut dalam kegiatan patroli dan pemulihan ekosistem.





Kegiatan prioritas exit strategy capacity building untuk meningkatkan kinerja Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD) di KPHK Tangkoko hanya satu kegiatan, yakni pendampingan kegiatan LPKD (Tabel 17.). Pendampingan kegiatan LPKD ini diarahkan untuk memajukan kegiatan ekowisata maleo dan wisata air terjun dan air panas. Melalui pendampingan ini diharapkan kinerja LPKD semakin meningkat dan profitabilitas bidang bisnis ini semakin baik dan upaya pelestarian ekosistem kawasan konservasi yang terintegrasi dalam kegiatan ekowisata sehari-hari terwujud. Posisi pendamping ini sesungguhnya sangat strategis untuk Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) yang baru tahap perkembangan awal, terlebih anggota KKM belum terbiasa dengan urusan administrasi. Pendamping yang ditugaskan pada ekowisata tersebut akan membantu pengelola dalam pelaksanaan administrasi dan manajemen ekowisata yang secara regular dilaporkan kepada Kepala KPHK Tangkoko, BKSDA Sulawesi Utara dan Dinas Pariwisata Kabupaten. Pendamping juga akan membantu membenahi aspek pelayanan, penyediaan perangkat SOP ekowisata, penyediaan perangkat keamanan (safety) turis, penguatan kapasitas petugas interpretasi obyek ekowisata dan sarana/peralatan ekowisata yang memenuhi standar keamanan. Di samping itu, pendamping diharapkan dapat membangun sinergi dengan stakeholders kunci yakni Dinas Pariwisata Kabupaten, PHRI/Travel agent, tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kecamatan. Di bidang pemasaran ekowisata, pendamping senantiasa aktif memasarkan obyek-obyek ekowisata melalui saluran-saluran sosial media yang ada untuk pasar nasional dan mancanegara, leaflet, poster dan booklet di hotel-hotel atau tempat-tempat strategis di Manado dan Gorontalo.

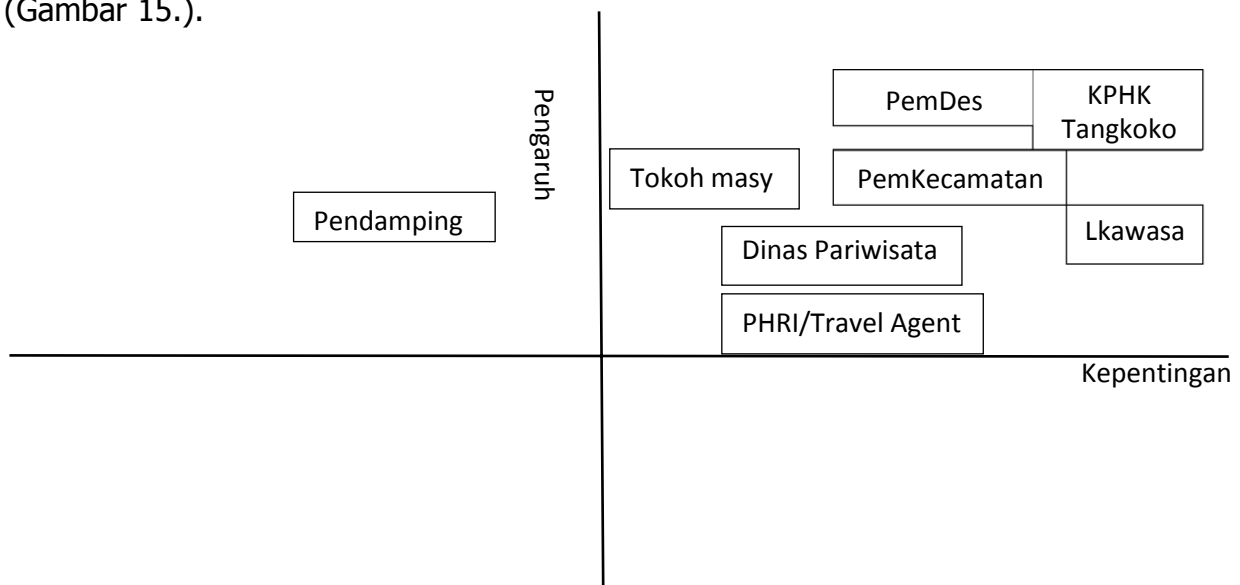
Tabel 17. Kegiatan prioritas *exit strategy* dan *stakeholders* untuk pemberdayaan masyarakat di KPHK Tangkoko

No.	Kegiatan prioritas exit strategy	Stakeholder
1.	Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat Daerah Penyangga (arang aktif, perikanan bioflog, peternakan, wisata bahari)	KPHK Tangkoko, LPKD, PemKecamatan, Pemdes, tokoh masyarakat, Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan/Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UMKM Kab, NGOs
2.	Pendampingan kegiatan LPKD	KPHK Tangkoko, LPKD. Dinas Pariwisata,



		PHRI/Travel agent, Pendamping, Pemdes, PemKecamatan, tokoh masyarakat
3.	Memfasilitasi akses pasar produk-produk LPKD	KPHK Tangkoko, LPKD, Pemdes, BUMDES, Pem Kecamatan, Dinas Perdagangan Kab.
4.	Pemanfaatan sampah plastik melalui bank sampah	KPHK Tangkoko, NGOs, LPKD, Pemdes, Pendamping, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup Kab. BUMDES,

Untuk meningkatkan kapasitas pengelola ekowisata di KPHK Tangkoko perlu diidentifikasi pengaruh dan kepentingan para stakeholders terkait. Berdasarkan hasil identifikasi hampir seluruh stakeholders mempunyai pengaruh dan kepentingan (Gambar 15.).

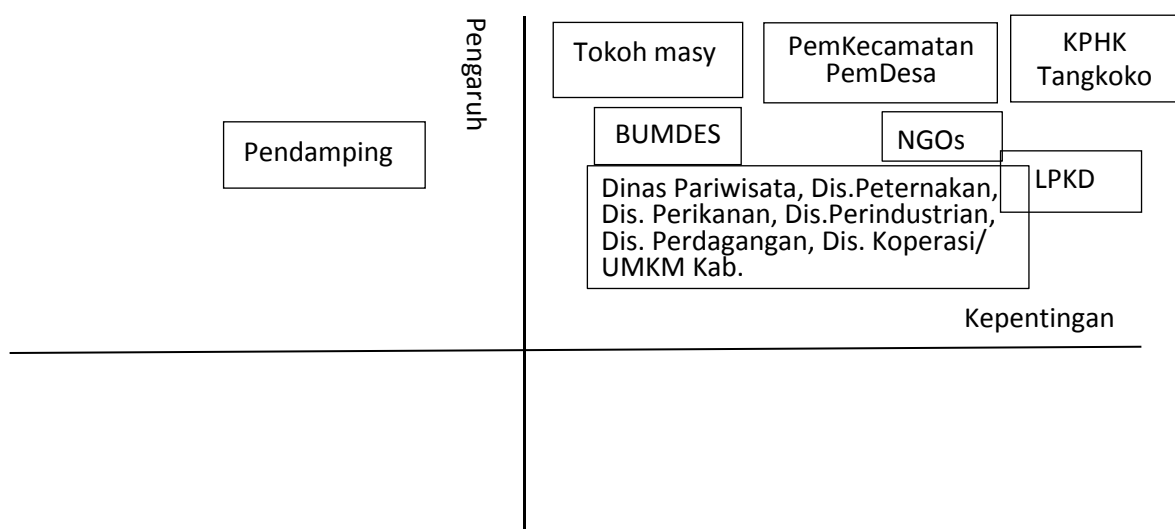


**Gambar 15.** Pengaruh dan kepentingan stakeholders pada kegiatan exit strategy capacity building di KPHK Tangkoko

Posisi pengaruh dan kepentingan terkuat diduduki oleh KPHK Tangkoko. Posisi LPKD sebagai kelembagaan masyarakat yang baru berkembang mempunyai pengaruh yang sedang tetapi kepentingannya sama dengan pihak manajemen KPHK Tangkoko. Pengaruh ini diharapkan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kinerja LPKD ke depan. Posisi Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan sudah cukup tepat yakni punya pengaruh sesuai dengan legalitas dan kompetensi yang dimilikinya tetapi kepentingannya sedang karena tidak terlibat dalam menjalankan bisnis ekowisata sehari-hari. Kedua lembaga pemerintahan ini diharapkan tidak terlibat dalam manajemen dan kepemilikan bidang usaha ekowisata tersebut karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berujung pada merosotnya perkembangan ekowisata di wilayah ini. Posisi pengaruh dan kepentingan Dinas Pariwisata dan PHRI/Travel agent cukup kuat dan diharapkan

*Exit Strategy Project: Enhancing the Protected Area System in Sulawesi (EPASS) for Biodiversity Conservation 2015-2020* dapat membina LPKD lebih intens lagi. Tokoh masyarakat melalui pengaruh yang dimilikinya dapat menciptakan iklim kondusif pengembangan ekowisata di wilayah ini. Pendamping dapat meningkatkan skill meskipun kepentingannya rendah.

Tiga kegiatan strategis exit strategy lainnya di KPHK Tangkoko berkaitan dengan pembangunan usaha ekonomi produktif masyarakat Daerah Penyangga, fasilitasi akses pasar produk-produk LKPD dan pemanfaatan sampah plastik melalui bank sampah. Posisi pengaruh dan kepentingan KPHK Tangkoko tetap paling tinggi karena mandat yang diembannya untuk pengelolaan kawasan konservasi termasuk pembinaan masyarakat sekitarnya. Posisi pengaruh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan juga sama dengan pengelola KPHK Tangkoko tetapi kepentingannya termasuk sedang. Tokoh masyarakat mempunyai pengaruh dan kepentingan yang lebih rendah dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan. Posisi pengaruh BUMDES relatif tinggi tetapi kepentingannya rendah. Untuk mewujudkan kehadiran BUMDES di wilayah ini bisa juga ditempuh kerjasama antar desa dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa sehingga BUMDES Antar Desa terbentuk. Kepentingan BUMDES akan semakin tinggi jika bidang usaha ini semakin prospektif. Keseluruhan instansi Dinas-dinas yang terlibat mempunyai pengaruh dan kepentingan dengan tingkat sedang. Posisi ini ke depan dapat meningkat jika interaksi antara Dinas-dinas dengan pihak KPHK Tangkoko dan LPKD semakin intensif dan bidang usaha ini semakin berkembang. Pengaruh tenaga pendamping termasuk kategori sedang tetapi kepentingannya rendah (Gambar 16.).



**Gambar 16.** Pengaruh dan kepentingan stakeholders pada kegiatan exit strategy pengembangan bidang usaha di KPHK Tangkoko



Pengembangan usaha ekonomi produktif di KPHK Tangkoko dapat berhasil jika dilakukan upaya peningkatan produktivitas dan kualitas produk serta pemasaran yang inovatif dengan produk yang ditawarkan sesuai dengan standar dan selera konsumen. Khusus untuk usaha wisata bahari, pengelola dapat meningkatkan pelayanan termasuk perekrutan petugas dan guide yang menguasai obyek ekowisata dimaksud serta bersikap ramah serta penyediaan sarana dan peralatan yang aman dan nyaman. Pemasaran produk dan jasa LPKD ini senantiasa perlu ditingkatkan melalui informasi pasar, peningkatan kualitas branding dan packaging (kemasan) dan kerjasama pemasaran. Pengembangan bank sampah perlu terus didorong karena dapat meningkatkan kelestarian kawasan konservasi dan kesejahteraan masyarakat.

Stakeholder exit strategy KPHK Tangkoko mendukung konservasi, saling bekerjasama dan keterlibatan yang tinggi, sebagaimana disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. *Stakeholders mapping* kegiatan prioritas *exit strategy* di KPHK Tangkoko

Stakeholder	Perilaku thdp tujuan konservasi	Konflik di antara stakeholders	Kerjasama di antara stakeholders	Tingkat pelibatan yg diinginkan	Status keterlibatan
KPHK Tangkoko	Mandat, mewujudkan konservasi	Dgn pemburu TSL	Dgn NGOs, Pemda, Dinas-2 terkait dan LPKD	Sangat tinggi	Pelibatan kuat
LPKD	Kesadaran konservasi berkembang	Mulai anti pd pemburu TSL	Dgn KPHK Tangkoko, NGOs, PemKec, Pemdes dan Dinas2 terkait	Tinggi	Pelibatan kuat
PemKecamatan	Mendukung konservasi	Tidak ada konflik	Dgn KPHK Tangkoko, PemDes, Dinas2 terkait. LPKD,	Tinggi	Pelibatan kuat
PemDesa	Mendukung konservasi	Tidak ada konflik	Dgn KPHK Tangkoko, Dinas2 terkait. LPKD, PemKec	Tinggi	Pelibatan kuat
Pendamping	Mendukung konservasi	Tidak ada konflik	Dgn KPHK Tangkoko, LPKD, PemDes. Dinas2 terkait, Tokoh masy.	Tinggi	Pelibatan kuat
Tokoh masy.	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn KPHK Tangkoko, LPKD, PemDes. Pendamping	Tinggi	Pelibatan kuat
NGOs	Kesadaran konservasi tinggi	Dgn pemburu TSL	Dgn KPHK Tangkoko, LPKD, PemDes., PemKec	Tinggi	Pelibatan kuat
BUMDES	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn KPHK Tangkoko, LPKD. PemDes.	Tinggi	Pelibatan kuat
Dinas Pariwisata	Mendukung konservasi	Tidak ada konflik	Dgn KPHK Tangkoko, LPKD, PemDes. PemKec. Dinas2 terkait	Tinggi	Pelibatan kuat



Stakeholder	Perilaku thdp tujuan konservasi	Konflik di antara stakeholders	Kerjasama di antara stakeholders	Tingkat pelibatan yg diinginkan	Status keterlibatan
Dinas Perindustrian	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn KPHK Tangkoko, LPKD, PemDes. PemKec. Dinas2 terkait	Tinggi	Pelibatan kuat
Dinas Perikanan	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn KPHK Tangkoko, LPKD, PemDes. PemKec. Dinas2 terkait	Tinggi	Pelibatan kuat
Dinas Peternakan	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn KPHK Tangkoko, LPKD, PemDes. PemKec. Dinas2 terkait	Tinggi	Pelibatan kuat
Dinas Perdagangan	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn KPHK Tangkoko, LPKD, PemDes. PemKec. Dinas2 terkait	Tinggi	Pelibatan kuat
Dinas Koperasi/UMKM	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn KPHK Tangkoko, LPKD, PemDes. PemKec. Dinas2 terkait	Tinggi	Pelibatan kuat
PHRI/Travel	Kesadaran konservasi berkembang	Tidak ada konflik	Dgn KPHK Tangkoko, LPKD. PemDes, Dinas Pariwisata	Tinggi	Pelibatan kuat

Pengelola KPHK Tangkoko diberikan mandat mengelola kawasan konservasi, dengan demikian, KPHK Tangkoko berperan mewujudkan konservasi. Mayoritas stakeholders memiliki tingkat kesadaran konservasi yang berkembang, kecuali Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pendamping posisinya mendukung konservasi. Di antara stakeholders terjalin kerjasama dan diharapkan tingkat pelibatan terhadap pengelolaan kawasan konservasi tinggi. Pihak KPHK Tangkoko dan NGOs menghadapi konflik dengan para pemburu TSL, sedang LPKD mulai anti terhadap pemburu TSL.

#### D. Sumber Pendanaan Alternatif

Pendanaan berkelanjutan kegiatan prioritas exit strategy proyek E-PASS sangat ditentukan oleh analisis ekonomi dan finansial dari kegiatan yang diprioritaskan. Sebelum dilakukan prioritas kegiatan, dipandang perlu melakukan valuasi ekonomi untuk melihat sejauh mana modal alam (natural capital) kawasan konservasi dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi riil. Hal ini dilakukan dengan menghitung Nilai Ekonomi Total (Total Economic Value, TEV). Penghitungan TEV untuk ketiga kawasan konservasi telah selesai dilakukan dengan menekankan pada empat produk/jasa ekosistem hutan (forest products and ecosystem services), yakni hasil hutan, polinasi tanaman dan pengendalian hama, penyediaan air dan ekowisata





serta penelitian). Sesungguhnya, hutan yang mempunyai integritas ekosistem yang baik, khususnya hutan tropika basah, atau hutan sehat (health forests), dapat menghasilkan banyak produk dan jasa ekosistem hutan secara berkelanjutan dengan produk/jasa yang sangat beragam namun dalam kuantitas yang terbatas (polivalen). Sebaliknya, hutan monokultur hanya menghasilkan satu produk namun jumlahnya sangat masif (monovalen). Mengelola sifat polivalen menjadi barang ekonomi membutuhkan kompleksitas pengelolaan yang relatif lebih rumit dibanding produk monovalen, karena harus memanfaatkan secara seimbang dan berkelanjutan dengan pendekatan integrasi (integration) dibanding dengan sifat monovalen yang dapat fokus dan tersegmentasi mengelola satu produk dengan pendekatan segregasi (segregation). Namun demikian, potensi kawasan konservasi sebagai ekosistem hutan tropika basah masih sangat potensial dikelola untuk menggerakkan pembangunan ekonomi hijau dalam skala lokal/regional. Dalam hal ini, ketiga kawasan konservasi dapat menghasilkan berbagai komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan hutan (air, karbon, ekowisata, dsb,). Pemanfaatan kayu dari kawasan konservasi tidak diperkenankan karena akan merusak ekosistem dan ancaman kehilangan biodiversitas. Pemanfaatan sumber daya hutan, dalam hal ini, tidak dilakukan secara ekstraktif tetapi lebih ditekankan pada pemanfaatan jasa ekosistem hutan, atau pemungutan HHBK secara selektif dengan tetap memprioritaskan kelestarian hutan.

Nilai valuasi ekonomi tertinggi di TN. Lore Lindu dan TN. Bogani Nani Wartabone adalah penyediaan air. Untuk mewujudkan nilai ekonomi potensial air di kedua TN tersebut perlu dilakukan:

1. Penyusunan neraca air;
2. Pemetaan areal yang diprioritaskan untuk restorasi ekosistem untuk memastikan run off semakin kecil;
3. Pengembangan sistem monitoring air;
4. Penjajakan kolaborasi multipihak untuk restorasi ekosistem; dan
5. Pemanfaatan air berkelanjutan untuk masyarakat.

Nilai ekonomi jasa air sangat menonjol pada beberapa kawasan konservasi dan kawasan hutan, seperti penelitian yang dilakukan di TN Gunung Gede Pangrango, TN. Gunung Ceremai, kawasan hutan Cidaun yang memasok air ke Cilegon dan



KPHL Rinjani Timur. Nilai ekonominya sangat tinggi, namun sebagaimana sifat studi TEV, masih banyak proxy (asumsi/anggapan) dan enabling conditions yang harus dituntaskan. Kegiatan pemanfaatan air dari hulu (hutan) ke bagian hilir (permukiman dan kawasan industri) menjadi barang ekonomi sudah dapat diwujudkan dengan mekanisme imbal jasa ekosistem hutan (Payment for Ecosystem Services, PES). Setidaknya, hal ini sudah dilakukan untuk jasa air DAS Cidaun, Cilegon dan KPHL Rinjani Timur. Khusus untuk TN. Lore Lindu dan TN. Bogani Nani Wartabone, elaborasi lebih spesifik dan detail dalam bentuk business plan dan mekanisme PES yang sifatnya lebih operasional terhadap konsumen air harus dilakukan. Namun demikian, potensi ekonomi penyediaan air ini di masa yang akan datang sangat tinggi sepanjang perlindungan terhadap DAS dan sumber mata air dilakukan. Secara lokal, kebutuhan air masyarakat sekitar kedua taman nasional ini sudah tercukupi dan bahkan dapat digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) untuk meningkatkan elektrifikasi dan menggerakkan kegiatan ekonomi di kedua wilayah tersebut.

Untuk KPHK Tangkoko, nilai valuasi ekonomi tertinggi adalah ekowisata dan penelitian. Untuk itu, kegiatan yang perlu dilakukan untuk memperkuat posisi KPHK Tangkoko sebagai destinasi ekowisata dan penelitian adalah:

1. Pembangunan sarana dan prasarana ekowisata dan pendukungnya;
2. Pengembangan interpretasi edukasi wisata KPHK Tangkoko;
3. Pengembangan dan implementasi SOP pelayanan ekowisata; dan
4. Pengembangan model kerja sama pengelolaan ekowisata.

Pengembangan destinasi pariwisata menjadi salah satu Prioritas Nasional dan senantiasa terus dikembangkan karena telah terbukti sebelum pandemi Covid-19 merebak menjadi penyumbang GDP terbesar setelah minyak dan gas bumi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per tahun. Pengembangan destinasi pariwisata portofolio alam sangat prospektif dan semakin diminati, khususnya yang berkaitan dengan hutan dan kawasan konservasi. Namun permasalahan utama seputar ekowisata tersebut belum memenuhi salah satu unsur A dari 3A (Amenity, Attractiveness, and Accessibility), yakni accessibility, di mana infrastruktur destinasi ekowisata biasanya masih terbatas. Namun demikian, keindahan hutan dan atraksi alam dari monyet Yaki dan burung maleo merupakan modal yang sangat berharga



bagi pengembangan ekowisata dimaksud. Tinggal bagaimana memasarkan destinasi ekowisata tersebut dan mengundang investor pariwisata alam yang mempunyai komitmen mengkomodifikasi kelangsungan hidup masyarakat sekitar hutan dalam bentuk kerjasama (misalnya membangun community-based ecolodge dan melibatkan masyarakat dalam layanan ekowisata).

Kekayaan dan keunikan biodiversitas KPHK Tangkoko juga dapat menjadi ajang riset biodiversitas dan ekologi hutan bereputasi internasional. Kegiatan ini sangat potensial menjadi sumber penghasilan (revenue) melalui pembayaran tarif SIMAKSI dan fasilitas lain yang dibangun untuk mendukung kegiatan riset. Di samping itu, upaya kerjasama dalam bioprospeksi kekayaan hayati dan benefit sharing dalam Material Transfer Agreement (MTA) yang diatur dalam Aichi Target dapat menjadi sumber penghasilan yang tinggi. Kegiatan riset internasional harus diatur dengan protokol dan SOP yang jelas dan tidak merugikan kepentingan bangsa.

Untuk melakukan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan pembinaan masyarakat diperlukan sumber pendanaan alternatif berkelanjutan, selain APBN. Dirasakan selama ini dana APBN sangat terbatas untuk mewujudkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi. Sebagian besar anggaran APBN hanya untuk Belanja Pegawai (gaji dan honor), sedang untuk pengelolaan kawasan konservasi di lapangan, relatif sangat kecil. Sesungguhnya, sumber pendanaan untuk kegiatan pengelolaan kawasan konservasi cukup banyak. Tinggal bagaimana penerima dana dapat memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang diminta oleh donor/pemberi dana. Misalnya membuat TOR dan proposal kerjasama atau pendanaan yang menarik minat pemberi dana. Atau menyediakan dana pendamping (counter budget) yang bisa diwujudkan dalam bentuk inkind contributions.

Sumber pendanaan alternatif berkelanjutan dapat diimplementasikan dalam jangka pendek (mendesak) dan jangka panjang (5 tahun). Untuk jangka pendek, tahun 2021, dapat dipersiapkan akses pembiayaan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan penguatan PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan mitra Balai yang telah dipersiapkan selama ini. Untuk jangka panjang, 5 tahun (2021 – 2025), dapat diperoleh dari implementasi model bisnis yang telah disusun oleh ketiga kawasan konservasi, akses pembiayaan dari BPDH melalui pembukaan jendela baru



konservasi, pembentukan TN/KPHK sebagai BLU Pusat dan dukungan pembiayaan BLUD.

Untuk merealisasikan pendanaan tersebut diperlukan enabling conditions (kebijakan atau legalitas) yang sangat prioritas dilakukan, yakni:

1. SBSN, perlu penguatan dukungan persiapan pengusulan SBSN dan pemulihan investasi SBSN;
2. Implementasi model bisnis, perlu komitmen pelaksanaan dan dukungan anggaran publik untuk implementasi model bisnis; dan
3. BLU, BPDHL dan BLUD, perlu penetapan tipologi TN/KPHK untuk menilai kelayakan penerapan PPK BLU, BPDHL dan BLUD, dukungan terhadap pengelola TN/KPHK dalam menyusun dan mengelola model bisnis, koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan para pihak di tingkat tapak, dan kajian mekanisme pembagian biaya - manfaat dari Balai atau BLU TN/KPHK selaku pihak pengelola kawasan TN/KPHK kepada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan dana konservasi.

Model bisnis yang dapat dijadikan pilot proyek setelah E-PASS berakhir untuk masing-masing kawasan konservasi adalah:

1. TNLL : Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat
2. TNBNW : Pengembangan model gula aren
3. KPHK Tangkoko : Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat

Untuk menghasilkan legacy proyek E-PASS perlu dibangun 2 mekanisme pendanaan berkelanjutan pada sistem kawasan konservasi yang diperkirakan dapat menghasilkan US\$ 3 juta per tahun. Mekanisme tersebut adalah:

1. Dukungan SBSN untuk pembangunan infrastruktur di kawasan konservasi;
2. Pengarusutamaan konservasi ke dalam prioritas pembangunan nasional/penguatan peran konservasi dalam pembangunan sosial ekonomi.

Untuk percepatan implementasi mekanisme pendanaan dimaksud, kegiatan-kegiatan prioritas yang perlu dilakukan adalah:

1. Penguatan dukungan persiapan pengusulan SBSN dan pemulihan investasi SBSN;
2. Penguatan peran kawasan konservasi yang ditunjukkan melalui penajaman output kegiatan TN/KPHK yang dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi, khususnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga berimplikasi pada peningkatan anggaran TN/KPHK;



3. Monitoring/pengukuran dampak pemberdayaan kepada masyarakat (ekonomi) dan kelestarian kawasan konservasi;
4. Pendampingan dan penguatan kapasitas staf TN/KPHK termasuk melalui jejaring, kemitraan dengan LSM dan mitra pembangunan agar lebih efektif, efisien dan strategis dalam melakukan pemberdayaan masyarakat; dan
5. Dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk konservasi.

Badan Layanan Umum (BLU) kawasan konservasi dipandang sebagai salah satu alternatif mekanisme pendanaan berkelanjutan yang potensial untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Untuk mempercepat pembentukan BLU kawasan konservasi, kegiatan prioritas yang perlu dilakukan oleh pengelola kawasan konservasi adalah:

1. Identifikasi tingkat kesesuaian pelaksanaan BLU TN/KPHK berdasarkan tipologi karakteristik TN/KPHK yang ada di Indonesia;
2. Dukungan terhadap pengelola TN/KPHK dalam menyusun dan mengelola model bisnis;
3. Koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan para pihak di tingkat tapak, termasuk dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk konservasi; dan
4. Kajian mekanisme biaya manfaat dari TN/KPHK atau BLU TN/KPHK selaku pihak pengelola kawasan TN/KPHK kepada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan dana konservasi.

Dalam perjalanan proyek E-PASS selama 5 tahun (2015-2020) sudah banyak yang dilakukan untuk peningkatan pengelolaan kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa kegiatan telah menjadi legacy dan sangat layak untuk dilanjutkan dan direplikasi di wilayah ketiga kawasan konservasi yang menjadi lokus proyek E-PASS ini dan kawasan konservasi lainnya. Adapun legacy proyek E-PASS ini adalah sebagai berikut:

1. Mendorong minimum 50% resort mengimplementasikan RBM secara penuh (data dan informasi sudah menjadi basis perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi di tiga site project);
2. Telah tersusunnya RANPERDA Kota Bitung tentang perlindungan dan pengendalian TSL (insitu dan exsitu);





3. Sudah terbangunnya sistem money biodiversitas pada tiga site project;
4. Teridentifikasi valuasi ekonomi untuk masing-masing pemanfaatan jasa air (TNLL dan TNBNW) dan pengembangan wisata spesies (KPHK Tangkoko);
5. Terbangunnya model pendanaan konservasi melalui pemanfaatan HHBK aren di TNBNW;
6. Terbangunnya model pendanaan konservasi melalui pengembangan ekonomi alternatif masyarakat Daerah Penyangga di tiga site project;
7. Terbangunnya model pendanaan konservasi melalui pemanfaatan limbah plastik di KPHK Tangkoko (sistem bank sampah);
8. Terbentuknya mekanisme partisipatif penegasan batas kawasan dengan penanaman MPTS di tiga site project;
9. Penurunan tren gangguan di kawasan konservasi (TNLL 15%, TNBNW 20%, KPHK Tangkoko (Batuangus) 20%);
10. Peningkatan Environment Health Index (EHI) di tiga site project sebesar 75%;
11. Ditetapkannya satu Perdes dan tersusunnya 10 Ranperdes Daerah Penyangga;
12. Terbentuknya minimal 35% KKM mandiri dari 46 kawasan KKM; dan
13. Mendorong pendidikan konservasi melalui Sekolah Alam Ngata Toro di TNLL.

Untuk menginternalisasikan ke tigabelas legacy tersebut ke dalam penguatan sistem pengelolaan ketiga kawasan konservasi yang menjadi lokus proyek E-PASS tersebut perlu ditetapkan langkah-langkah prioritas yang diimplementasikan untuk jangka pendek. Langkah-langkah strategis ini juga menjadi bahan kerja untuk TNLL, TNBNW dan KPHK Tangkoko untuk terus mempromosikan dan mensosialisasikan kegiatan prioritas exit strategy E-PASS kepada Pemda dan stakeholders lainnya. Untuk itu, perlu dibangun sistem komunikasi yang efektif dan efisien untuk keberlanjutan exit strategy ini. Adapun langkah-langkah prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Replikasi implementasi RBM terhadap 50% sisa resort lainnya (3 site project);
2. Mendorong RANPERDA menjadi PERDA dan mengimplementasikannya sesuai dengan PERDA yang telah terbit;
3. Integrasi sistem money biodiversitas ke dalam sistem database kawasan;



4. Peningkatan kapasitas untuk akses pendanaan SBSN dan Dana Lingkungan Hidup yang dikelola BDLH;
5. Pembangunan ekowisata (sarpras) berbasis masyarakat di KPHK Tangkoko;
6. Pengembangan NSPK terkait dengan pendanaan alternatif untuk konservasi yang berasal dari pemanfaatan HHBK kawasan konservasi dan sumber pendanaan dari kegiatan ekonomi masyarakat DP;
7. Implementasi disain tapak wisata maleo Pakuli Utara berbasis masyarakat di TNLL;
8. Peningkatan status kawasan konservasi (penguatan legalitas kelembagaan);
9. Pemandirian 70% dari 46 KKM yang sudah dibangun selama periode proyek E-PASS (antara lain penguatan pendampingan di tingkat tapak); dan
10. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan air berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar TNLL.



## IV. SARAN DAN REKOMENDASI

Anoa Dataran Rendah *Bubalus depressicornis*

Sumber : Ardin Mokodompit



## IV. SARAN-SARAN DAN REKOMENDASI

### A. Saran-saran

1. Penguatan sistem pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati di Sulawesi yang difasilitasi oleh proyek E-PASS di bawah UNDP/GEF sangat strategis dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja pengelolaan TN. Lore Lindu, TN. Bogani Nani Wartabone dan KPHK Tangkoko. Oleh karena itu, beberapa kegiatan yang dinilai prioritas untuk dilanjutkan perlu dirancang menjadi kegiatan exit strategy setelah proyek E-PASS berakhir.
2. Pemilihan kegiatan exit strategy perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan stakeholders dan pendanaan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan perangkat kriteria dan indikator exit strategy sebagai alat (tools) penyeleksi kegiatan prioritas yang mempunyai keterkaitan dan kesepadanan dengan substansi proyek E-PASS, yakni tujuan proyek, tiga komponen E-PASS, lima belas indikator E-PASS dan output/capaian kegiatan pada masing-masing indikator.
3. Kriteria exit strategy untuk menapis kegiatan yang dianggap potensial dilanjutkan adalah: 1. Mendukung perencanaan dan kelembagaan efektif dalam pelestarian kawasan konservasi; 2. Terpeliharanya integritas pengelolaan ekosistem kawasan konservasi; 3. Pengelolaan kawasan konservasi yang terintegrasi dgn tata ruang; 4. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi tercapai; 5. Mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan kawasan konservasi; dan 6. Kelola sosial dan ekonomi kawasan konservasi terwujud.
4. Kegiatan prioritas exit strategy untuk masing-masing kawasan konservasi disarankan:

Kegiatan prioritas *exit strategy* TN. Lore Lindu Jangka Pendek (1 – 3 tahun)

Kriteria <i>Exit Strategy</i>	Kegiatan Prioritas
Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi tercapai (K.4)	1. Implementasi RBM
Kelola sosial dan ekonomi kawasan konservasi terwujud (K.6)	1. Kerjasama kemitraan konservasi dengan masyarakat sekitar
	2. Meningkatkan kegiatan pendampingan masyarakat di TNLL dan sekitarnya secara intensif
	3. Kegiatan pengembangan wisata air panas di Desa Lawua oleh





	LPKD Lawua
	4. Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kerajinan tangan, kue tradisional, gula aren dan turunannya (gula semut, baji beku)

Keterangan: K1-...K6 = Kriteria 1 - ... Kriteria 6

#### Kegiatan prioritas *exit strategy* TN. Lore Lindu Jangka Panjang (1 – 5 tahun)

Kriteria <i>Exit Strategy</i>	Kegiatan Prioritas
Mendukung perencanaan dan kelembagaan efektif dalam pelestarian kawasan konservasi (K.1)	1. Revisi RPJP BBTNLL berdasarkan hasil revisi zonasi dan hasil pendampingan kepada masyarakat 16 desa di kawasan TNLL
Terpeliharanya integritas pengelolaan ekosistem kawasan konservasi (K.2)	1. Monitoring species kunci/species prioritas secara berkala 2. Patroli pengamanan kawasan TNLL berdasarkan sistem grid
Kelola sosial dan ekonomi kawasan konservasi terwujud (K.6)	1. Pengembangan wisata maleo di Desa Pakoli Utara yang dilakukan oleh LPKD Singgani 2. Pengembangan usaha perikanan dan peternakan kelompok masyarakat

Keterangan: K1-...K6 = Kriteria 1 - ... Kriteria 6

#### Kegiatan prioritas *exit strategy* TN. Bogani Nani Wartabone Jangka Pendek(1 – 3 tahun)

Kriteria <i>Exit Strategy</i>	Kegiatan Prioritas
Kelola sosial dan ekonomi kawasan konservasi terwujud (K.6)	1. Penanaman pohon buah-buahan pada batas kawasan
	2. Pengembangan aren, kemiri, dan pala sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan kawasan melalui skema pemulihan ekosistem kolaboratif
	3. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KKM dan diikuti dengan replikasi kegiatan di kelompok lain
	4. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat
	5. Melanjutkan skema kontribusi masyarakat terhadap kegiatan konservasi (a.l. pemulihan ekosistem, ekowisata, pengendalian kebakaran hutan)

Keterangan: K1-...K6 = Kriteria 1 - ... Kriteria 6

#### Kegiatan prioritas *exit strategy* TN. Bogani Nani Wartabone Jangka Panjang (1 – 5 tahun)

Kriteria <i>Exit Strategy</i>	Kegiatan Prioritas
Mendukung perencanaan dan kelembagaan efektif dalam pelestarian kawasan konservasi (K.1)	1. Peningkatan kapasitas perencanaan untuk mengurangi kesenjangan antara rencana jangka panjang dan implementasi jangka pendek
Pengelolaan kawasan konservasi yang terintegrasi dengan tata ruang (K.3)	1. Penguatan fungsi ruang DP yang mendukung kawasan konservasi, a.l. di Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Efektifitas pengelolaan ekosistem kawasan konservasi tercapai (K.4)	1. Implementasi RBM
Sumber pendanaan berkelanjutan (K.5)	1. Mengupayakan akses APBD dan Dana Desa untuk membiayai kegiatan konservasi
Kelola sosial dan ekonomi kawasan konservasi terwujud (K.6)	1. Penguatan BUMDES sebagai organisasi pengelola bisnis komoditas HHBK/ekowisata

Keterangan: K1-...K6 = Kriteria 1 - ... Kriteria 6





### Kegiatan prioritas *exit strategy* KPHK Tangkoko Jangka Pendek (1 – 3 tahun)

Kriteria <i>Exit Strategy</i>	Kegiatan Prioritas
Terpeliharanya integritas pengelolaan ekosistem kawasan konservasi (K.2)	1. Implementasi SMART Patrol RBM
	2. Pelaksanaan operasi peredaran TSL sesuai Ranperda PPTSL Kota Bitung
Kelola sosial dan ekonomi kawasan konservasi terwujud (K.6)	1. Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat Daerah Penyangga (arang aktif, perikanan <i>bioflog</i> , peternakan, wisata bahari)
	2. Pendampingan kegiatan LKK/LPKD
	3. Memfasilitasi akses pasar produk-produk LKK

Keterangan: K1-....K6 = Kriteria 1 -....Kriteria 6

### Kegiatan prioritas *exit strategy* KPHK Tangkoko Jangka Panjang (1 – 5 tahun)

Kriteria <i>Exit Strategy</i>	Kegiatan Prioritas
Terpeliharanya integritas pengelolaan ekosistem kawasan konservasi (K.2)	1. Melanjutkan kegiatan pemulihan ekosistem sesuai dengan RPE tahun 2019-2024 yang telah disusun
Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi tercapai (K.4)	1. Patroli partisipatif dengan melibatkan LKK dan LPKD
	2. Pembinaan habitat satwa kunci maleo
	3. Monitoring satwa kunci (monyet Yaki dan maleo)
Sumber pendanaan berkelanjutan bagi kawasan konservasi (K.5)	1. Pemanfaatan sampah plastik melalui bank sampah

Keterangan: K1-....K6 = Kriteria 1 -....Kriteria 6

- Implementasi kegiatan prioritas *exit strategy* tersebut membutuhkan dukungan stakeholders. Keterlibatan stakeholders disarankan untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kelembagaan kawasan konservasi. Stakeholder utama untuk kegiatan ini adalah Pengelola TN/KPHK, KKM/LPKD, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, pendamping dan trainer.
- Kegiatan-kegiatan prioritas agribisnis, home industry dan ekowisata memerlukan keterlibatan stakeholders kunci, yakni pengelola TN/KPHK, KKM/LPKD, masyarakat sekitar kawasan konservasi, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Dinas-dinas Kabupaten yang menangani pariwisata, agribisnis, home industry, koperasi/UMKM dan perdagangan, kelompok bisnis (swasta termasuk PHRI/travel agent), pendamping dan trainer.
- Untuk menghindari jebakan ketergantungan pada proyek, kelembagaan KKM/CCA/LPKD perlu diperkuat pada periode *exit strategy* dengan:
  - meningkatkan status lembaga informal menjadi formal melalui perolehan badan hukum koperasi atau usaha kecil (Dinas Koperasi/UMKM Kabupaten), izin usaha (Dinas yang menangani penanaman modal/investasi) atau bentuk yayasan atau perkumpulan yang mempunyai akta notaris dari Kementerian Hukum dan HAM;



2. Penyimpanan dana diubah dari kas menjadi tabungan; 3. Penguatan administrasi dan roda bisnis melalui pendampingan dan training secara berkala; dan 4. Membangun nilai-nilai kewirausahaan (enterpreunership) melauai pembelajaran bersama anggota.
5. Penguatan kelembagaan dan bisnis kawasan KKM/LPKD diharapkan lebih mengedepankan keterlibatan masyarakat (community engagement) dalam kerangka kemitraan P4 (Public, Private, People Partnership) yang lebih luas. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi stakeholders yang lebih spesifik dan potensial terlibat untuk mengungkit kinerja kawasan KKM/LPKD yang tidak semata-mata menyediakan pendanaan tetapi lebih pada mendorong kemandirian lembaga.
6. Prakarsa individu dan kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kawasan konservasi (pemulihan ekosistem dan patroli) seyogyanya dilihat sebagai sumber pendanaan berkelanjutan dalam bentuk kontribusi in-kind dari masyarakat. Pengelola TN/KPHK dapat mendorong keberlanjutan prakarsa tersebut untuk menghasilkan champion-champion di bidang konservasi.
7. Untuk kegiatan penyediaan air dari TN. Lore Lindu dan TN. Bogani Nani Wartabone dapat diproyeksikan jangka panjang dengan menyiapkan enabling conditions dan meningkatkan kapasitas pengelola TN/KPHK.
8. Sumber pendanaan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan TN/KPHK disarankan dari mekanisme SBSN, BLU, Dana Desa dan BLUD. Untuk sumber pendanaan lain agar pengelola dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diminta penyedia dana. Pendanaan dari hibah, CSR dan trust fund dapat diusahakan.
9. Pihak pengelola TN/KPHK perlu merealisasikan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah ada selama ini untuk mendukung kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Di samping itu, perlu mengajukan kerjasama dengan mitra potensial lainnya, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional, khususnya dari kalangan dunia usaha yang mempunyai skema CSR (Corporate Social Responsibility).



10. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengelola TN/KPHK dan kelembagaan KKM untuk dapat melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi yang lebih baik dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Legacy proyek E-PASS dalam best practices RBM, Ranperda PPTSL Kota Bitung, monev biodiversitas, Peraturan Desa Ekowisata Maleo Tulabelo dan model-model bisnis KKM perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah prioritas di ketiga kawasan konservasi dan direplikasi ke kawasan konservasi lainnya di Sulawesi maupun di luar Pulau Sulawesi.
12. Penyiapan pengelola TN/KPHK dalam mengajukan proposal kegiatan SBSN, BLU, Dana Desa dan BLUD perlu dilakukan oleh pihak Kementerian LHK c.q, pengelola TN/KPHK. Untuk itu, kegiatan pelatihan dari instansi berwenang, pihak-pihak yang telah memperoleh fasilitas pendanaan tersebut perlu dilakukan untuk ketiga kawasan konservasi tersebut.
13. Pendayagunaan tenaga pendamping desa untuk kegiatan KKM di TN Lore Lindu akan dilanjutkan melalui mekanisme pendanaan dari Forest Programme 3.
14. Exit strategy ini dapat dilanjutkan dengan uji indikator masing-masing kriteria serta dilanjutkan dengan menjalin strategi komunikasi yang lebih intensif dengan lembaga struktural di pusat dan daerah, kalangan swasta dan kelompok masyarakat, terutama untuk memperoleh kepastian dukungan komitmen sehingga stakeholders dapat sangat berperan dalam implementasi exit strategy.
15. Keterkaitan antara kegiatan prioritas, stakeholders kunci dan alternatif pendanaan dapat dirangkum Tabel 19.

## **B. Rekomendasi**

1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengelola TN/KPHK dan kelembagaan KKM untuk dapat melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi yang lebih baik dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kepala Balai Besar TNLL, Kepala Balai KSDA Sulut, Kepala Balai TN Bogani Nani Wartabone agar mengawal dan mengimplementasikan kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel 19.



Tabel 19. Keterkaitan antara Prioritas Kegiatan, Stakoholders Kunci dan Alternatif Pendanaan Project EPASS

No	Prioritas Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Alternatif Pendanaan	Stakeholders Kunci
1	Pemanfaatan jasa air berkelanjutan di TN Lore Lindu dan TN Bogani Nani Wartabone	Pemandian air panas, <i>river tubing</i> dan <i>mikro hydro</i>	Swadaya kelompok dan swadaya masyarakat	KKM, Pendamping Kelompok, BBTN Lore Lindu, BTN Bogani Nani Wartabone, dan Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Koperasi, Pendamping Lapangan Desa (PLD/ Kemendes)
2	Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di KPHK Tangkoko	Wisata bahari (penyewaan perahu, snorkling), pemandu wisata YAKI	Swadaya kelompok dan swadaya masyarakat	KKM, Pendamping Kelompok, KPHK Tangkoko, dan Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Koperasi, Pendamping Lapangan Desa (PLD/ Kemendes)
3	Pengembangan model gula aren di TN. Lore Lindu dan TN Bogani Nani Wartabone	Pembuatan gula semut dan pembuatan kue tradisional	Swadaya kelompok dan swadaya masyarakat	KKM, Pendamping Kelompok, BBTN Lore Lindu, BTN Bogani Nani Wartabone, dan Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Koperasi, Pendamping Lapangan Desa (PLD/ Kemendes), Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
4	Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di TN. Lore Lindu dan TN Bogani Nani Wartabone	Peningkatan kualitas akses menuju obyek wisata (jalan, jembatan, dll)	Dana Desa dari Kementerian Desa	KKM, Pendamping Kelompok, BBTN Lore Lindu, BTN Bogani Nani Wartabone, dan Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Koperasi, Pendamping Lapangan Desa (PLD/ Kemendes), Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
		Pengembangan sarana prasarana wisata berbasis masyarakat ( <i>homestay</i> , dll)	Dana swadaya kelompok, APBD Dinas Pariwisata, SBSN, Dinas Pemberdayaan	KKM, BBTN Lore Lindu, BTN Bogani Nani Wartabone, dan Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas



No	Prioritas Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Alternatif Pendanaan	Stakeholders Kunci
			Masyarakat dan Desa	Koperasi, Pendamping Lapangan Desa (PLD/ Kemendes)
5	Membangun komitmen pelaksanaan & dukungan anggaran publik untuk implementasi model bisnis	Koordinasi antar kementerian/Lembaga dan Pemda;	APBN, APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	KKM, BBTN Lore Lindu, BTN Bogani Nani Wartabone, dan Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Koperasi, Pendamping Lapangan Desa (PLD/ Kemendes)
6	Pemandirian 70% dari 46 KKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kelembagaan</li> <li>2. Pendampingan</li> <li>3. Peningkatan kapasitas</li> </ol>	Dana swadaya kelompok, APBN, APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	KKM, Pendamping Kelompok, BBTN Lore Lindu, BTN Bogani Nani Wartabone, dan Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi, Pendamping Lapangan Desa (PLD/ Kemendes), Dinas Perindustrian dan Perdagangan.





## LAMPIRAN



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Exit Strategy Proyek Epass 2015-2020

### KUESIONER

# EXIT STRATEGY PROYEK EPASS 2015-2020

UNIT KERJA : .....

**JAKARTA, DESEMBER 2020**





## KUESIONER EXIT STRATEGY PROYEK EPASS 2015-2020

Kuesioner ini merupakan bagian dari bottom up proses penyusunan exit strategy EPASS Project yang akan berakhir Desember 2020. Melalui kuesioner ini diharapkan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan suatu kegiatan prioritas yang perlu dilanjutkan pasca project berakhir dapat dijamin validitas dan kelengkapannya.

Sesuai Dokumen Proyek PIMS No. 4392 Enhancing the Protected Area System in Sulawesi (Peningkatan Sistem Kawasan Konservasi di Sulawesi / EPASS) 2015-2020 disebutkan bahwa tujuan utama proyek adalah untuk memperkuat efektivitas dan keberlanjutan keuangan dari sistem kawasan konservasi di Sulawesi untuk menanggapi ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Karena itu exit strategy perlu disusun untuk mengarahkan dan meyakinkan agar kegiatan-kegiatan prioritas terkait dengan tujuan dan sasaran proyek dapat berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi itu sendiri (pendekatan program). Guna memperoleh ketepatan kegiatan-kegiatan utama yang dipandang urgen, penting, dan perlu dilanjutkan, dimohon kepada responden dapat melengkapi kuesioner ini dengan benar dan sesuai dengan tipologi kawasan konservasi masing-masing :

### BAGIAN I

1. Finalisasi RPTN/RPHJP KPHK :
  - a. Apakah RPTN/RPHJP di unit kerja saudara sudah tuntas disusun ?
  - b. Apabila sudah tuntas disusun, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan dalam rangka efektifitas implementasi RPTN/RPHJP tersebut :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - c. Apabila belum tuntas disusun, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan untuk menuntaskan penyusunan RPTN/RPHJP tersebut :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - d. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas, baik dalam rangka implementasi atau penyusunan RPTN/RPHJP, menurut saudara siapa yang merupakan stakeholders utama yang memiliki peran pokok dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud :
    - 1)(sebutkan juga perannya)
    - 2)(sebutkan juga perannya)
    - 3) dst






- e. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas, baik dalam rangka implementasi atau penyusunan RPTN/RPHJP, menurut saudara darimana sumber pendanaan yang rasional yang dapat mendukung implementasi kegiatan prioritas dimaksud (sebutkan secara berurutan sesuai prioritas sumber pendanaan) :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst
2. Kebijakan daerah (regulasi) terhadap pengelolaan daerah penyangga :
  - a. Apakah sudah ada penetapan daerah penyangga di unit kerja saudara dalam bentuk regulasi daerah ?
  - b. Apabila sudah ada, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan dalam rangka efektifitas implementasi regulasi tersebut :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - c. Apabila belum ada atau belum disusun, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan untuk membantu percepatan penyusunan regulasi daerah tersebut :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - d. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas, baik dalam rangka implementasi atau penyusunan regulasi daerah, menurut saudara siapa yang merupakan stakeholders utama yang memiliki peran pokok dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud :
    - 1)(sebutkan juga perannya)
    - 2)(sebutkan juga perannya)
    - 3) dst
  - e. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas, baik dalam rangka implementasi atau penyusunan regulasi daerah tersebut, menurut saudara darimana sumber pendanaan yang rasional yang dapat mendukung implementasi kegiatan prioritas dimaksud (sebutkan secara berurutan sesuai prioritas sumber pendanaan) :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst





3. Penurunan laju tahunan degradasi hutan atau kawasan :
  - a. Apakah target penurunan laju degradasi 25% tahun 2020 dibanding baseline data 2000-2010 di unit kerja saudara sudah tercapai ?
  - b. Apabila sudah tercapai, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan dalam rangka lebih meningkatkan laju penurunan (>25%) degradasi tersebut :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - c. Apabila target (25%) belum tercapai, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan untuk membantu percepatan penurunan degradasi hutan atau kawasan tersebut :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - d. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas dimaksud di atas, baik dalam rangka meningkatkan target penurunan (>25%) atau menuju target penurunan (25%) degradasi tersebut, menurut saudara siapa yang merupakan stakeholders utama yang memiliki peran pokok dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud :
    - 1)(sebutkan juga perannya)
    - 2)(sebutkan juga perannya)
    - 3) dst
  - e. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas, baik dalam rangka meningkatkan target penurunan (>25%) atau menuju target penurunan (25%) degradasi tersebut, menurut saudara darimana sumber pendanaan yang rasional yang dapat mendukung implementasi kegiatan prioritas dimaksud (sebutkan secara berurutan sesuai prioritas sumber pendanaan) :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
4. Pengembangan pedoman operasionalisasi RBM :
  - a. Apakah sudah ada pedoman operasionalisasi RBM khusus (disusun) untuk unit kerja saudara ?
  - b. Apabila sudah ada, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan dalam rangka efektifitas implementasi pedoman tersebut :  
\_\_\_\_\_ 
    - 1) .....
    - 2) .....





- 3) dst
  - c. Apabila belum ada atau belum disusun, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan untuk membantu percepatan penyusunan pedoman tersebut :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - d. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas, baik dalam rangka implementasi atau penyusunan pedoman operasionalisasi RBM, menurut saudara siapa yang merupakan stakeholders utama yang memiliki peran pokok dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud :
    - 1)(sebutkan juga perannya)
    - 2)(sebutkan juga perannya)
    - 3) dst
  - e. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas, baik dalam rangka implementasi atau penyusunan pedoman tersebut, menurut saudara darimana sumber pendanaan yang rasional yang dapat mendukung implementasi kegiatan prioritas dimaksud (sebutkan secara berurutan sesuai prioritas sumber pendanaan) :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
5. Efektifitas operasionalisasi RBM
- a. Untuk meningkatkan kinerja operasionalisasi RBM, kegiatan prioritas mana di bawah ini yang menurut saudara paling penting (boleh pilih lebih dari satu pilihan) :
    - 1) Melengkapi infrastruktur dan memenuhi kebutuhan personil di resort;
    - 2) Kehadiran secara rutin petugas di resort untuk melakukan penjagaan dan pengawasan;
    - 3) Kehadiran secara rutin petugas di resort dan melaksanakan semua tugas terkait dengan pengelolaan kawasan di wilayah resort;
    - 4) Semua kebutuhan data dan informasi guna penyiapan rencana pengelolaan dan kebijakan dapat diwujudkan dengan menggunakan hasil kinerja resort;
    - 5) Adanya dukungan pendanaan yang memadai sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas di resort.
  - b. Dalam rangka optimalisasi operasionalisasi RBM, menurut saudara siapa yang merupakan stakeholders utama yang memiliki peran pokok dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud :





- 1)(sebutkan juga perannya)
  - 2)(sebutkan juga perannya)
  - 3) dst
- c. Dalam rangka optimalisasi operasionalisasi RBM, menurut saudara darimana sumber pendanaan yang rasional yang dapat mendukung kegiatan prioritas dimaksud dimaksud (sebutkan secara berurutan sesuai prioritas sumber pendanaan) :
- 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst
- d. Apabila menurut saudara di salah satu resort telah melaksanakan operasionalisasi RBM dengan baik, apakah perlu dilakukan replikasi di resort yang lain di wilayah saudara ?
- 1) Apabila perlu dilakukan replikasi, di resort mana saja yang dipandang perlu diimplementasikan (sebutkan) ?
  - 2) Apabila tidak perlu, sebutkan alasan saudara !
6. Unit intelijen pengawasan peredaran TSL :
- a. Apakah sudah ada unit intelijen pengawasan peredaran TSL khusus (dibentuk) untuk unit kerja saudara ?
- b. Apabila sudah ada, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan dalam rangka efektifitas unit intelijen pengawasan peredaran TSL tersebut :
- 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst
- c. Apabila belum ada atau belum dibentuk, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan untuk membentuk unit intelijen pengawasan peredaran TSL di unit kerja saudara tersebut :
- 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst
- d. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas, baik dalam rangka implementasi atau pembentukan unit intelijen pengawasan peredaran TSL, menurut saudara siapa yang merupakan stakeholders utama yang memiliki peran pokok dalam kegiatan dimaksud :
- 1)(sebutkan juga perannya)
  - 2)(sebutkan juga perannya)
  - 3) dst





- e. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas, baik dalam rangka implementasi atau pembentukan unit intelijen pengawasan peredaran TSL , menurut saudara darimana sumber pendanaan yang rasional yang dapat mendukung kegiatan prioritas dimaksud (sebutkan secara berurutan sesuai prioritas sumber pendanaan) :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst
- 7. Sistem pelaporan perdagangan dan pemanfaatan illegal TSL :
  - a. Apakah sudah ada sistem pelaporan perdagangan dan pemanfaatan illegal TSL khusus (dibuat) untuk unit kerja saudara ?
  - b. Apabila sudah ada, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan dalam rangka efektifitas sistem pelaporan perdagangan dan pemanfaatan illegal TSL tersebut :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - c. Apabila belum ada atau belum dibuat, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan untuk membuat sistem pelaporan perdagangan dan pemanfaatan illegal TSL di unit kerja saudara tersebut :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - d. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas, baik dalam rangka implementasi atau pembuatan sistem pelaporan perdagangan dan pemanfaatan illegal TSL, menurut saudara siapa yang merupakan stakeholders utama yang memiliki peran pokok dalam kegiatan dimaksud :
    - 1)(sebutkan juga perannya)
    - 2)(sebutkan juga perannya)
    - 3) dst
  - e. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas, baik dalam rangka implementasi atau pembuatan sistem pelaporan perdagangan dan pemanfaatan illegal TSL, menurut saudara darimana sumber pendanaan yang rasional yang dapat mendukung kegiatan prioritas dimaksud (sebutkan secara berurutan sesuai prioritas sumber pendanaan) :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst





8. Juknis monitoring dan desiminasi biodiversity :
  - a. Apakah sudah ada juknis monitoring dan desiminasi biodiversity, species kunci dan kondisi habitat untuk unit kerja saudara ?
  - b. Apabila sudah ada, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan dalam rangka efektifitas pelaksanaan juknis monitoring dan desiminasi biodiversity, species kunci dan kondisi habitat tersebut :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - c. Apabila belum ada atau belum dibuat, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan untuk membuat juknis monitoring dan desiminasi biodiversity, species kunci dan kondisi habitat di unit kerja saudara tersebut :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - d. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas, baik dalam rangka implementasi atau pembuatan juknis monitoring dan desiminasi biodiversity, species kunci dan kondisi habitat, menurut saudara siapa yang merupakan stakeholders utama yang memiliki peran pokok dalam kegiatan dimaksud :
    - 1)(sebutkan juga perannya)
    - 2)(sebutkan juga perannya)
    - 3) dst
  - e. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas, baik dalam rangka implementasi atau pembuatan juknis monitoring dan desiminasi biodiversity, species kunci dan kondisi habitat, menurut saudara darimana sumber pendanaan yang rasional yang dapat mendukung kegiatan prioritas dimaksud (sebutkan secara berurutan sesuai prioritas sumber pendanaan) :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
9. Representasi low land forest di luar kawasan konservasi :
  - a. Bahwa sebaran biodiversity di low land foret di luar kawasan konservasi diduga masih cukup tinggi (target 2020 seluas 210.000 ha untuk Sulawesi). Untuk mencapai target tersebut, kegiatan prioritas apa menurut saudara yang perlu dilakukan :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst





- b. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas tersebut, menurut saudara siapa yang merupakan stakeholders utama yang memiliki peran pokok dalam kegiatan dimaksud :
  - 1)(sebutkan juga perannya)
  - 2)(sebutkan juga perannya)
  - 3) dst
- c. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas tersebut, menurut saudara darimana sumber pendanaan yang rasional yang dapat mendukung kegiatan prioritas dimaksud (sebutkan secara berurutan sesuai prioritas sumber pendanaan) :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst

10. Valuasi ekonomi sumber daya alam :

- a. Apakah sudah pernah dilakukan valuasi ekonomi terhadap potensi kawasan konservasi di unit kerja saudara ?
- b. Apabila sudah dilakukan, potensi kegiatan-kegiatan apa yang sangat potensial untk dikembangkan untuk mendukung ketersediaan dan keberlanjutan pendanaan konservasi di unit kerja saudara :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst
- c. Untuk mewujudkan potensi kegiatan-kegiatan tersebut menjadi "tangible" (terukur), kegiatan-kegiatan prioritas apa yang menurut saudara perlu dilakukan :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst

11. Rencana bisnis konservasi :

- a. Apakah unit kerja saudara sudah memiliki (hasil studi atau kajian) rencana bisnis konservasi yang direncanakan sebagai sumber pendanaan konservasi yang disusun secara partisipatif ?
- b. Apabila sudah ada, sebutkan kegiatan-kegiatan bisnis tersebut, baik yang sedang direncanakan, sudah dilaksanakan, sedang berjalan maupun yang akan dikerjakan :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst







- c. Diantara kegiatan-kegiatan bisnis yang sudah atau sedang dilaksanakan, sebutkan satu kegiatan yang layak untuk dijadikan pilot proyek (model) untuk dikembangkan lebih lanjut. Untuk tujuan tersebut, kegiatan-kegiatan prioritas apa yang perlu dilakukan :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - d. Dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas pengembangan pilot proyek tersebut, menurut saudara siapa yang merupakan stakeholders utama yang memiliki peran pokok dalam kegiatan dimaksud :
    - 1)(sebutkan juga perannya)
    - 2)(sebutkan juga perannya)
    - 3) dst
  - e. Dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas pengembangan pilot proyek tersebut, menurut saudara darimana sumber pendanaan yang rasional yang dapat mendukung kegiatan prioritas dimaksud (sebutkan secara berurutan sesuai prioritas sumber pendanaan) :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
12. Penguatan efektifitas pengelolaan kawasan :
- a. Apakah unit kerja saudara sudah memiliki Rencana Aksi Penguatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan ?
  - b. Apabila sudah ada, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan dalam rangka efektifitas pelaksanaan rencana aksi tersebut :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - c. Apabila belum ada atau belum dibuat, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan untuk membuat Rencana Aksi Penguatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan di unit kerja saudara tersebut :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - d. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas tersebut, menurut saudara siapa yang merupakan stakeholders utama yang memiliki peran pokok dalam kegiatan dimaksud :
    - 1)(sebutkan juga perannya)





2)(sebutkan juga perannya)

3) dst

e. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas tersebut, menurut saudara darimana sumber pendanaan yang rasional yang dapat mendukung kegiatan prioritas dimaksud (sebutkan secara berurutan sesuai prioritas sumber pendanaan) :

1) .....

2) .....

3) dst

13. METT scores :

a. Untuk lebih meningkatkan METT scores (>70), kegiatan-kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan di unit kerja saudara :

1) .....

2) .....

3) dst

b. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas tersebut, menurut saudara siapa yang merupakan stakeholders utama yang memiliki peran pokok dalam kegiatan dimaksud :

1)(sebutkan juga perannya)

2)(sebutkan juga perannya)

3) dst

c. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas tersebut, menurut saudara darimana sumber pendanaan yang rasional yang dapat mendukung kegiatan prioritas dimaksud (sebutkan secara berurutan sesuai prioritas sumber pendanaan) :

1) .....

2) .....

3) dst

d. Implementasi METT tidak selamanya sesuai 100% dengan kondisi atau tipologi permasalahan suatu kawasan. Menurut saudara aspek-aspek apa yang menjadi kelemahan atau belum cukup diatur dalam METT yang saat ini dipakai untuk mengukur efektifitas pengelolaan kawasan :

1) .....

2) .....

3) dst





14. Gangguan atau ancaman kawasan :

- a. Apakah unit kerja saudara sudah memiliki prosedur atau mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan gangguan atau ancaman kawasan (Smart Patrol) ?
- b. Apabila sudah ada, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan dalam rangka efektifitas pelaksanaan Smart Patrol dimaksud :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst
- c. Apabila belum ada atau belum dikembangkan, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan untuk pengembangan Smart Patrol di unit kerja saudara tersebut :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst
- d. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas tersebut, menurut saudara siapa yang merupakan stakeholders utama yang memiliki peran pokok dalam kegiatan dimaksud :
  - 1)(sebutkan juga perannya)
  - 2)(sebutkan juga perannya)
  - 3) dst
- e. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas tersebut, menurut saudara darimana sumber pendanaan yang rasional yang dapat mendukung kegiatan prioritas dimaksud (sebutkan secara berurutan sesuai prioritas sumber pendanaan) :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst
- f. Untuk secara terus-menerus menurunkan laju gangguan atau ancaman kawasan, kegiatan-kegiatan prioritas apa yang perlu dilakukan di unit kerja saudara :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst

15. Ecosystem health index :

- a. Apakah di unit kerja saudara sudah terdapat suatu lokasi (resort) yang sudah layak dikategorikan sebagai "best practices RBM" :
  - 1) .....





- 2) .....
  - 3) dst
  - b. Untuk mengembangkan "best practices RBM", kegiatan-kegiatan prioritas apa yang perlu dilakukan di unit kerja saudara :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - c. Untuk lebih meningkatkan Ecosystem Health Index/EHI (>75%), kegiatan-kegiatan prioritas apa yang perlu dilakukan di unit kerja saudara :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
16. Pengukuran kinerja pengelolaan jenis :
- a. Apakah unit kerja saudara sudah memiliki Pedoman Pengelolaan Jenis untuk mengukur kinerja pengelolaan jenis flora dan fauna ?
  - b. Apabila sudah ada, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan dalam rangka efektifitas pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Jenis dimaksud :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - c. Apabila belum ada atau belum dikembangkan, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan untuk pengembangan Pedoman Pengelolaan Jenis di unit kerja saudara tersebut :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) dst
  - d. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas tersebut, menurut saudara siapa yang merupakan stakeholders utama yang memiliki peran pokok dalam kegiatan dimaksud :
    - 1)(sebutkan juga perannya)
    - 2)(sebutkan juga perannya)
    - 3) dst
  - e. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas tersebut, menurut saudara darimana sumber pendanaan yang rasional yang dapat mendukung kegiatan prioritas dimaksud (sebutkan secara berurutan sesuai ~~prioritas~~ sumber pendanaan) :
    - 1) .....





2) .....

3) dst

17. Database species kunci :

a. Apakah database tentang species kunci di unit kerja saudara sudah terbangun atau dikembangkan ?

b. Apabila sudah ada, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan dalam rangka efektifitas pelaksanaan database species kunci dimaksud :

1) .....

2) .....

3) dst

c. Apabila belum ada atau belum dikembangkan, kegiatan prioritas apa yang akan saudara lakukan untuk pembuatan atau pengembangan database tentang species kunci di unit kerja saudara tersebut :

1) .....

2) .....

3) dst

d. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas tersebut, menurut saudara siapa yang merupakan stakeholders utama yang memiliki peran pokok dalam kegiatan dimaksud :

1)(sebutkan juga perannya)

2)(sebutkan juga perannya)

3) dst

e. Dalam hal melaksanakan kegiatan prioritas tersebut, menurut saudara darimana sumber pendanaan yang rasional yang dapat mendukung kegiatan prioritas dimaksud (sebutkan secara berurutan sesuai prioritas sumber pendanaan) :

1) .....

2) .....

3) dst

18. Restorasi kawasan terdegradasi :

a. Dalam upaya merestorasi kawasan, kegiatan-kegiatan prioritas apa yang saudara lakukan dalam rangka mencapai keberhasilan restorasi kawasan di unit kerja saudara yang perlu dilanjutkan ke depan :

1) .....

2) .....

3) dst







- b. Menurut pendapat saudara, diantara kegiatan-kegiatan prioritas tersebut di atas, mana yang penting untuk direplikaasi untuk dilakukan di tempat lain :
- 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst

19. Resolusi konflik :

- a. Menurut saudara kegiatan-kegiatan prioritas apa yang telah saudara lakukan dalam mengatasi konflik penggunaan kawasan (perambahan, penambangan illegal, dll) di unit kerja saudara :
- 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst
- b. Menurut pendapat saudara, diantara kegiatan-kegiatan prioritas tersebut di atas, mana yang penting untuk direplikaasi untuk dilakukan di tempat lain :
- 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst
- c. Menurut pendapat saudara, apakah penggunaan kawasan illegal (perambahan, penambangan illegal, dll) di unit kerja saudara dapat diturunkan sampai "zero" level ?
- d. Terkait butir c, apabila tidak mungkin diturunkan sampai "zero" level, kegiatan-kegiatan prioritas apa yang menurut saudara perlu dilakukan, baik di unit kerja saudara maupun di tempat lain diwaktu yang akan datang :
- 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst

20. Tatakelola sistem kolaborasi :

- a. Untuk mengedukasi masyarakat local, dipandang perlu dibentuk unit edukasi mobile yang secara efektif melakukan edukasi kepada masyarakat local. Menurut pendapat saudara, kegiatan-kegiatan prioritas apa yang perlu dilakukan untuk efektifitas unit edukasi mobile tersebut :
- 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst
- b. Apakah pengembangan KKM di unit kerja saudara telah sesuai atau bahkan melebihi taret proyek ?





- c. Dalam hal target pengembangan KKM dapat dipenuhi, kegiatan-kegiatan prioritas apa yang saudara lakukan sehingga target tersebut dapat terpenuhi atau bahkan terlampaui :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst
- d. Dalam hal target pengembangan KKM telah terpenuhi, kegiatan prioritas atau penguatan-penguatan (enabling condition) apa saja yang perlu dilakukan agar KKM tersebut tetap atau bahkan lebih meningkat kegiatan usahanya :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst
- e. Untuk implementasi kegiatan prioritas atau penguatan-penguatan (enabling condition) terhadap KKM yang sudah terbentuk tersebut, stakeholders mana saja yang menurut saudara memiliki peran penting :
  - 1)(sebutkan juga perannya)
  - 2)(sebutkan juga perannya)
  - 3) dst
- f. Untuk implementasi kegiatan prioritas atau penguatan-penguatan (enabling condition) terhadap KKM yang sudah terbentuk tersebut, sebutkan sumber-sumber pendanaan yang rasional dapat mendorong peningkatan usaha KKM tersebut :
  - 1)(sebutkan juga peruntukannya)
  - 2)(sebutkan juga peruntukannya)
  - 3) dst
- g. Dalam hal target pengembangan KKM tidak memenuhi target proyek, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan tersebut :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst
- h. Untuk lebih mengembangkan KKM, menurut pendapat saudara di lokasi mana dan jenis usaha apa yang perlu dikembangkan di unit kerja saudara sebagai replikasi keberhasilan pengembangan KKM sebelumnya :
  - 1)(sebutkan jenis usahanya)
  - 2)(sebutkan jenis usahanya)
  - 3) dst





## BAGIAN II

Terhadap seluruh kegiatan-kegiatan prioritas yang perlu dilakukan (termasuk enabling condition) yang sudah teridentifikasi dalam pertanyaan-pertanyaan pada BAGIAN I, agar saudara kelompokkan (clustering) ke dalam 6 kelompok berdasarkan 6 kriteria: 1) Mendukung perencanaan dan kelembagaan efektif dalam pelestarian kawasan konservasi, 2) Terpeliharanya integritas pengelolaan ekosistem KK, 3) Pengelolaan KK yang terintegrasi dengan tata ruang, 4) Efektifitas pengelolaan KK tercapai, 5) Sumber pendanaan berkelanjutan bagi KK, dan 6) Kelola sosial dan ekonomi KK terwujud, dengan catatan bahwa setiap kegiatan hanya menempati satu kriteria yang saudara pandang paling dekat hubungan atau kategorinya dengan kriteria yang saudara pilih :

No.	Kriteria	Prioritas Kegiatan
1	Mendukung perencanaan dan kelembagaan efektif dalam pelestarian kawasan konservasi	1. .... 2. .... 3. dst
2	Terpeliharanya integritas pengelolaan ekosistem KK	1. .... 2. .... 3. dst
3	Pengelolaan KK yang terintegrasi dengan tata ruang	1. .... 2. .... 3. dst
4	Efektifitas pengelolaan KK tercapai	1. .... 2. .... 3. dst
5	Sumber pendanaan berkelanjutan bagi KK	1. .... 2. .... 3. dst
6	Kelola sosial dan ekonomi KK terwujud	1. .... 2. .... 3. dst





**Lampiran 2. Kuisisioner exit Strategy Proyek Epass 2015-2020 Komponen: Finansial Sustainability of The Sulawesi PA System**

**KUESIONER**  
**EXIT STRATEGY PROYEK EPASS 2015-2020**  
**KOMPONEN : Financial Sustainability of the**  
**Sulawesi PA System**

**JAKARTA, DESEMBER 2020**





## KUESIONER EXIT STRATEGY PROYEK EPASS 2015-2020

Kuesioner ini merupakan bagian dari bottom up proses penyusunan exit strategy EPASS Project yang akan berakhir Desember 2020. Melalui kuesioner ini diharapkan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan suatu kegiatan prioritas yang perlu dilanjutkan pasca project berakhir dapat dijamin validitas dan kelengkapannya.

Sesuai Dokumen Proyek PIMS No. 4392 Enhancing the Protected Area System in Sulawesi (Peningkatan Sistem Kawasan Konservasi di Sulawesi / EPASS) 2015-2020 disebutkan bahwa tujuan utama proyek adalah untuk memperkuat efektivitas dan keberlanjutan keuangan dari sistem kawasan konservasi di Sulawesi untuk menanggapi ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Karena itu exit strategy perlu disusun untuk mengarahkan dan meyakinkan agar kegiatan-kegiatan prioritas terkait dengan tujuan dan sasaran proyek dapat berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi itu sendiri (pendekatan program). Guna memperoleh ketepatan kegiatan-kegiatan utama yang dipandang urgen, penting, dan perlu dilanjutkan, **khusus untuk komponen 2 (Financial Sustainability of the Sulawesi PA System)**, dimohon kepada responden dapat melengkapi kuesioner ini dengan benar:

2. Bahwa kajian terhadap alternative sumber pendanaan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan 3 lokasi proyek EPASS telah dilakukan, yang tentunya tidak semua alternative sumber pendanaan tersebut dapat segera diimplementasikan pasca proyek EPASS berakhir. Mohon dapat dikelompokkan sumber pendanaan mana yang siap diimplementasikan berdasarkan jangka waktu sebagai berikut:
3. Terkait butir 2, untuk implementasi alternative sumber pendanaan berkelanjutan tersebut, tidak tertutup kemungkinan diperlukan enabling condition (kebijakan atau legalitas) agar alternative pendanaan tersebut dapat terealisasi. Menurut pendapat saudara, kegiatan-kegiatan (enabling condition) apa yang sangat prioritas perlu dilakukan:
  - a.
4. Terkait butir 2, untuk implementasi alternative sumber pendanaan berkelanjutan tersebut, menurut pendapat saudara siapa saja stakeholders penting, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang potensial terlibat untuk mendorong kegiatan-kegiatan prioritas (enabling condition) dimaksud.
5. Proyek EPASS mendorong setidaknya-tidaknya terdapat satu proyek percontohan terkait alternative sumber pendanaan berkelanjutan yang sudah beroperasi pasca Proyek EPASS. Menurut kajian dan pengamatan saudara, mohon dapat







disebutkan satu pilot proyek yang potensial untuk dipertahankan dan dilanjutkan setelah Proyek EPASS berakhir untuk setiap lokasi proyek:

6. Sebagai legacy Proyek EPASS, ada target untuk membangun 2 mekanisme pendanaan berkelanjutan pada sistem kawasan konservasi yang diperkirakan dapat menghasilkan minimal US \$ 3 juta per tahun. Apabila target tersebut sudah tercapai, sebutkan mekanisme yang dimaksud:
7. Badan Layanan Umum (BLU) kawasan konservasi dipandang sebagai salah satu alternative mekanisme pendanaan berkelanjutan yang potensial untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Guna percepatan pembentukan BLU kawasan konservasi, prioritas kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan oleh pengelola kawasan konservasi:

### KRITERIA DAN INDIKATOR

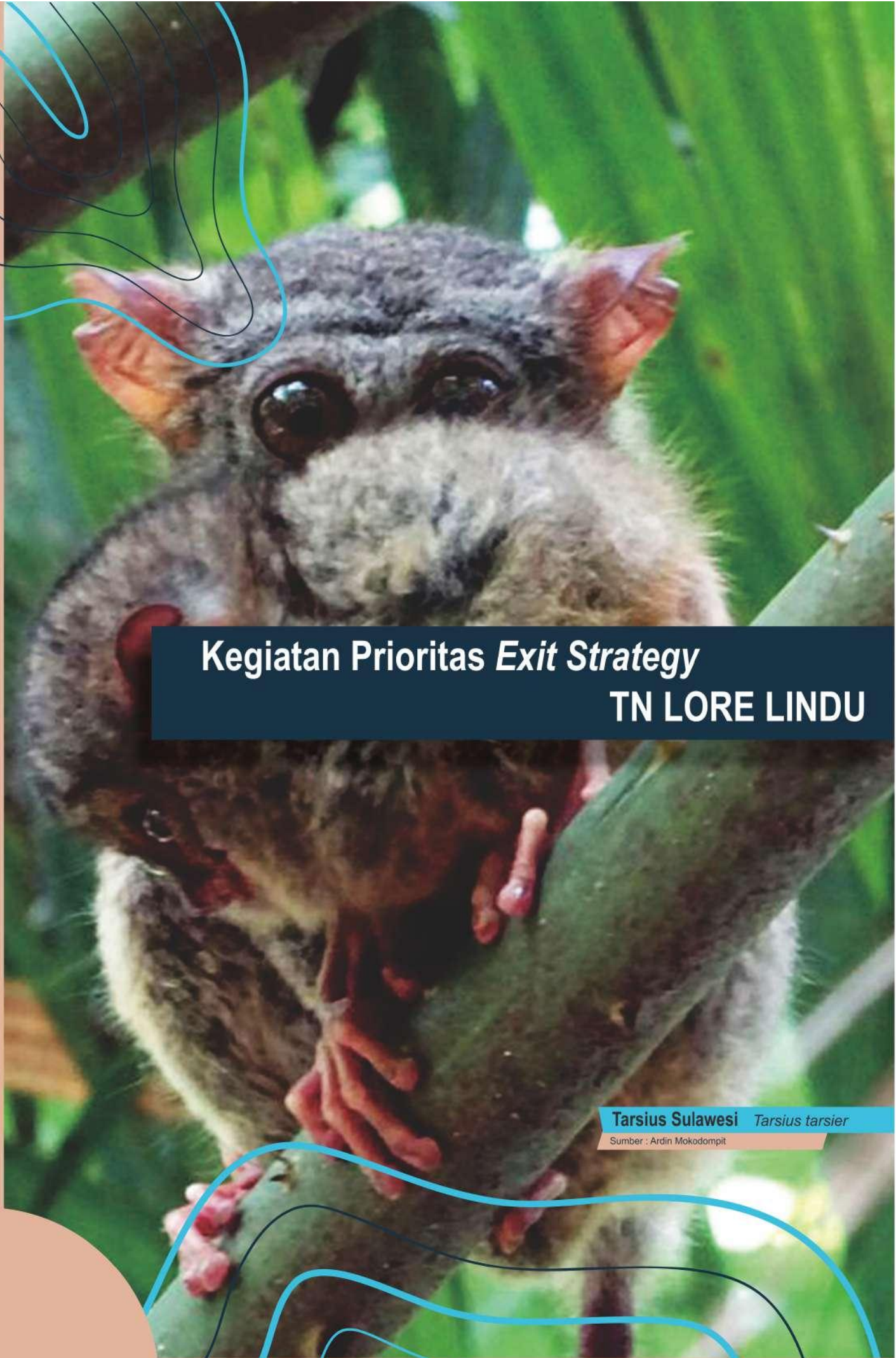
No.	Kriteria	Indikator
1	Mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan kawasan konservasi	Mendorong integritas pengelolaan biodiversity
		Membantu penguatan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi
		Mempercepat pembangunan infrastruktur kawasan konservasi
		Membantu penguatan pengelolaan daerah penyangga kawasan konservasi (termasuk pemberdayaan masyarakat)
		Membantu penyelesaian (resolusi) konflik kepentingan
		Memperkuat kapasitas peningkatan pendanaan konservasi



# Kegiatan Prioritas *Exit Strategy* TN LORE LINDU

**Tarsius Sulawesi** *Tarsius tarsier*

Sumber : Ardin Mokodompit





### Lampiran 3. Penetapan kegiatan prioritas *exit strategy* proyek E-PASS Unit : Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

Kriteria	Kegiatan	Rataan Bobot USG	Prioritas
1. Mendukung perencanaan dan kelembagaan efektif dalam pelestarian KK	1.1 Revisi RPJP BBTNLL berdasarkan hasil revisi zonasi & hasil pendampingan kepada masyarakat 16 desa di kawasan TNLL	31,7	PT
	1.2 Sinkronisasi perencanaan pembangunan di tingkat desa LPKD sesuai proses perencanaan pembangunan yang mulai dari Musrenbang	30,0	PT
	1.3 Peningkatan kapasitas bagi Polhut, PEH dan penyuluh (pelatihan fotografi, dll.)	22,7	PS
2. Terpeliharanya integritas pengelolaan ekosistem KK	2.1 Kegiatan pemulihan ekosistem di lokasi pertambangan liar di Dongi-dongi	20,7	PS
	2.2 Penanaman pohon MPTS sebagai tanda batas kawasan	24,0	PS
3. Pengelolaan KK yang terintegrasi dgn tata ruang	3.1 Reposisi pal batas sebagai akibat intensitas patroli dan penyesuaian terhadap peta penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan Prov. Sulteng No. SK.869/2014	29,0	PT
	3.2 Meningkatkan komunikasi & koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan Daerah Penyangga TNLL	28,0	PT
4. Efektifitas pengelolaan KK tercapai	4.1 Melanjutkan inventarisasi & monitoring flora fauna kunci endemik pada 3 site monitoring baru (hasil survey EPASS sebelumnya menjadi acuan)	25,3	PT
	4.2 Inventarisasi HHBK	19,3	PS
	4.3 Memperkuat baseline dan pengelolaan data Kehati	26,7	PS
	4.4 Monitoring habitat Tarsius	19,3	PS
	4.5 Patroli pengamanan kawasan TNLL berdasarkan sistem grid	32,0	PT
	4.6 Sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran hutan	24,7	PS
	4.7 Implementasi RBM	33,0	PT
	4.8 Penggunaan aplikasi SIMRELI (Sistem Informasi Manajemen Lore Lindu) pada setiap kegiatan TNLL (implementasi SMART Patrol)	28,0	PT
	4.9 Monitoring species kunci/ species prioritas secara berkala	28,0	PT
	4.10 Meredisain prosedur & metodologi inventarisasi Kehati TNLL	30,0	PT
5. Sumber pendanaan berkelanjutan bagi KK	5.1 Pemanfaatan dana desa untuk mendukung kegiatan wisata maleo	28,0	PT
	5.2 Penyusunan detailed business plan komoditi masyarakat di tingkat tapak	29,0	PT
	5.3 Meningkatkan KS sharing pendanaan dan SDM dalam rangka penguatan fungsi dengan lembaga pemerhati lingkungan	26,0	PS
6. Kelola sosial dan ekonomi KK terwujud	6.1 Kerjasama kemitraan konservasi dengan masyarakat sekitar	32,3	PT
	6.2 Peningkatan kualitas KS dengan masyarakat desa/masyarakat adat dalam rangka pengelolaan TN	28,3	PT
	6.3 Kegiatan pengembangan usaha maleo di Desa Pakoli Utara yang dilakukan oleh LPKD Singgani	30,0	PT



6.4 Kegiatan pengembangan wisata air panas di Desa Lawua oleh LPKD Lawua	29,3	PT
6.5 Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kerajinan tangan, kue tradisional, produksi gula aren dan turunannya (gula semut, baji beku, dsb,)	29,0	PT
6.6 Pengembangan kebun bibit kelompok	21,0	PS
6.7 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam peningkatan nilai tambah produk	25,3	PS
6.8 Pengembangan usaha perikanan dan peternakan kelompok masyarakat	28,0	PT
6.9 Menjalani KS kemitraan konservasi dengan setiap desa yang berbatasan dengan TNLL	30,0	PT
6.10 Peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya LPKD	28,0	PT
6.11 Meningkatkan kegiatan pendampingan masyarakat di TNLL dan sekitarnya secara intensif	32,0	PT
6.12 Meningkatkan komunikasi dengan Pemda dan stakeholder terkait pemberdayaan masyarakat di sekitar TNLL	28,0	PT
6.13 Melaksanakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan rencana induk yang telah disusun	27,0	PT

Rataan Bobot USG didasarkan pada penilaian 7 orang panellist E-PASS. Selang nilai: 7 – 35.

Nilai 7 – 16: Prioritas Rendah (PR); 17 – 26: Prioritas Sedang (PS); 27 – 35 : Prioritas Tinggi (PT)





## Kegiatan Prioritas *Exit Strategy* TN BOGANI NANI WARTABONE

**Burung Maleo** *Macrocephalon maleo*

Sumber : Hanom Bashari





**Lampiran 4. Penetapan kegiatan prioritas *exit strategy* proyek E-PASS Unit : Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone**

Kriteria	Kegiatan	Rataan Bobot USG	Prioritas
1. Mendukung perencanaan dan kelembagaan efektif dalam pelestarian KK	1.1 Peningkatan kapasitas perencanaan untuk mengurangi kesenjangan antara rencana jangka panjang dan implementasi jangka pendek	31,0	PT
	1.2 Sinkronisasi manajemen data/informasi	26,0	PS
	1.3 Konsistensi implementasi rencan. pengelolaan tahunan yg disusun bottom-up proses	27,0	PT
2. Terpeliharanya integritas pengelolaan ekosistem KK	2.1 Pemulihan ekosistem kolaboratif sesuai dengan prosedur kerja yang telah disusun	31,0	PT
	2.2 Penanaman pohon buah-buahan pd batas kawasan	34,0	PT
3. Pengelolaan KK yang terintegrasi dgn tata ruang	3.1 Penguatan fungsi ruang DP yg mendukung KK a.l. di Kab. Bolaang Mangandow Selatan	30,0	PT
4. Efektifitas pengelolaan KK tercapai	4.1 Implementasi RBM	31,0	PT
5. Sumber pendanaan berkelanjutan bagi KK	5.1 Meningkatkan alokasi APBN utk membiayai kegiatan konservasi	31,0	PT
	5.2 Mengupayakan akses APBD, Dana Desa utk dapat membiayai kegiatan konservasi	28,0	PT
	5.3 Mengupayakan dana yg bersumber dari kegiatan sosial ekonomi masyarakat	25,0	PS
	5.4 Melanjutkan skhema kontribusi masy. thdp kegiatan konservasi a.l. pemulihan ekosistem, ekowisata, pengendalian kebakaran hutan	32,0	PT
	5.5 Pengembangan aren, kemiri dan pala abg bagian dari penyelesaian permasalahan kawasan yg mendatangkan sumber pendapatan bagi masyarakat melalui skhema pemulihan ekosistem kolaboratif	32,0	PT
6. Kelola sosial dan ekonomi KK terwujud	6.1 Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KKM, target berikutnya adalah replikasi KKM	32,3	PT
	6.2 Perekrutan personil pendamping	28,0	PT
	6.3 Survey dan asesmen secara periodik untuk mengukur progress berdasarkan baseline data yang sudah diukur	22,0	PS
	6.4 Identifikasi peran stakeholder dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat KK	27,0	PT
	6.5 Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat	32,0	PT
	6.6 Penguatan BUMDES sebagai organisasi pengelola bisnis komoditas HHBK/ekowisata	32,0	PT

Rataan Bobot USG didasarkan pada penilaian 7 orang panellist E-PASS. Selang nilai: 7 – 35.

Nilai 7 – 16: Prioritas Rendah (PR); 17 – 26: Prioritas Sedang (PS); 27 – 35 : Prioritas Tinggi (PT)

## Kegiatan Prioritas *Exit Strategy* KPHK TANGKOKO

Julang Emas *Aceros cassidix*

Sumber : Ardin Mokodompit

**Lampiran 5. Penetapan kegiatan prioritas *exit strategy* proyek E-PASS Unit : KPHK TANGKOKO**

Kriteria	Kegiatan	Rataan Bobot USG	Prioritas
1. Mendukung perencanaan dan kelembagaan efektif dalam pelestarian KK	1.1 Penyusunan RPHJP& RPHJPd pada seluruh kawasan yang ada merujuk pada proses penyusunan rencana pengelolaan KPHK Tangkoko	32,0	PT
2. Terpeliharanya integritas pengelolaan ekosistem KK	2.1 Sosialisasi batas kawasan dan patroli partisipatif untuk pengendalian batas kawasan ke masyarakat	30,0	PT
	2.2 Pelaksanaan operasi peredaran TSL sesuai dengan Ranperda PPTSL Kota Bitung yang dilaksanakan oleh Satgas	30,0	PT
	2.3 Evaluasi EHI secara periodik	25,0	PS
	2.4 Melanjutkan kegiatan pemulihan ekosistem (PE) sesuai dengan rencana PE tahun 2019-2024 yang telah disusun	28,0	PT
	2.5 Implementasi program penyelesaian gangguan & ancaman kawasan sesuai dengan RP&RPJPn	22,0	PS
3. Pengelolaan KK yang terintegrasi dgn tata ruang	3.1 Mendorong Pemda untuk penguatan Daerah Penyangga	28,0	PT
	3.2 Ground checking pal batas kawasan bersama masarakat dengan merujuk pada titik koordinat BPKH	28,0	PT
4. Efektifitas pengelolaan KK tercapai	4.1 Implementasi SMART Patrol RBM	33,0	PT
	4.2 Patroli partisipatif dengan melibatkan LKK&LKKc	33,0	PT
	4.3 Evaluasi Threat index	23,0	PS
	4.4 Sosialisasi dan pemberitahuan masyarakat ttg keberadaan KK yg dilakukan bersama LKK& Pemerintah Kota Bitung	25,0	PS
	4.5 Monitoring satwa kunci (monyet Yaki dan maleo)	28,0	PT
	4.6 Pembinaan habita satwa kunci (maleo)	29,0	PT
5. Sumber pendanaan berkelanjutan bagi KK	5.1 Implementasi bisnis plan pendanaan berkelanjutan di KPHK Tangkoko	32,0	PT
	5.2 Pemanfaatan sampah plastik melalui bank sampah	30,0	PT
	5.3 Swadaya masyarakat melalui patroli & pemulihan ekosistem secara mandiri.	27,0	PT
6. Kelola sosial dan ekonomi KK terwujud	6.1 Pemberdayaan masyarakat melalui LKK/KKM	34,0	PT
	6.2 Peningkatan kapasitas pengelola/pengurus LKK	28,0	PT
	6.3 Pendampingan dan pengawasan LKK	32,0	PT
	6.4 Memfasilitasi akses pasar produk-produk LKK	31,0	PT
	6.5 Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa penyangga (arang aktif, perikanan bioflog, peternakan dan wisata bahari)	33,0	PT
	6.6 Pembinaan kader konservasi & pendidikan konservasi bagi pelajar	26,0	PS

Rataan Bobot USG didasarkan pada penilaian 7 orang panellist E-PASS. Selang nilai: 7 – 35.

Nilai 7 – 16: Prioritas Rendah (PR); 17 – 26: Prioritas Sedang (PS); 27 – 35 : Prioritas Tinggi (PT)



**Lampiran 6. Penetapan kegiatan prioritas pendanaan berkelanjutan *exit strategy* proyek E-PASS**

Kriteria	Kegiatan	Rataan Bobot USG	Prioritas
5. Mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan KK	5.1 Penyusunan neraca air di TN. Lore Lindu dan TN. Bogani Nani Wartabone	22,0	PS
	5.2 Pemetaan areal prioritas untuk restorasi ekosistem guna memastikan <i>runoff</i> semakin kecil di TN Lore Lindu	22,0	PS
	5.3 Pengembangan sistem monitoring air di TN Lore Lindu dan TN. Bogani Nani Wartabone	20,0	PS
	5.4 Penjajagan kolaborasi multipihak untuk restorasi ekosistem TN. Lore Lindu	27,0	PT
	5.5 Pemanfaatan air berkelanjutan untuk masyarakat di TN Lore Lindu	34,0	PT
	5.6 Pembangunan sarana dan prasarana ekowisata dan pendukungnya di KPHK Tangkoko	28,0	PT
	5.7 Pengembangan interpretasi edukasi wisata KPHK Tangkoko	28,0	PT
	5.8 Pengembangan dan implementasi SOP pelayanan ekowisata di KPHK Tangkoko	28,0	PT
	5.9 Pengembangan model kerja sama pengelolaan ekowisata di KPHK Tangkoko	29,0	PT
	5.10 Penguatan dukungan persiapan pengusulan SBSN dan pemulihan investasi SBSN	31,0	PT
	5.11 Membangun komitmen pelaksanaan dan dukungan anggaran publik untuk implementasi model bisnis	34,0	PT
	5.12 Menentukan tipologi TN untuk menilai kelayakan penerapan PPK BLU, BPD LH, dan BLUD	26,0	PS
	5.13 Dukungan terhadap pengelola TN dalam menyusun dan mengelola model bisnis	32,0	PT
	5.14 Koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan para pihak di tingkat tapak	30,0	PT
	5.15 Kajian mekanisme pembagian biaya manfaat dari Balai atau BLU TN selaku pihak pengelola kawasan TN kepada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan dana konservasi	27,0	PT
	5.16 Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di TN Lore Lindu (pilot proyek)	34,0	PT
	5.17 Pengembangan model gula aren di TN Bogani Nani Wartabone (pilot proyek)	34,0	PT
	5.18 Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di KPHK Tangkoko (pilot proyek)	34,0	PT
	5.19 Dukungan SBSN untuk pembangunan infrastruktur di kawasan konservasi	31,0	PT
	5.20 Pengarusutamaan konservasi ke dalam prioritas pembangunan nasional/ penguatan peran konservasi dalam pembangunan sosial-ekonomi	32,0	PT
	5.21 Penguatan dukungan persiapan pengusulan SBSN dan pemulihan investasi SBSN	30,0	PT
	5.22 Penguatan peran KK yang ditunjukkan melalui penajaman output kegiatan Balai TN yang dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga berimplikasi pada peningkatan anggaran TN	28,0	PT
	5.23 Monitoring/pengukuran dampak pemberdayaan kepada masyarakat (ekonomi) dan kelestarian kawasan konservasi (ekologis)	25,0	PT
	5.24 Pendampingan dan penguatan kapasitas staf Balai TN termasuk melalui jejaring, kemitraan dengan LSM dan mitra pembangunan agar lebih efektif, efisien, dan strategis dalam melakukan pemberdayaan masyarakat	30,0	PT
	5.25 Dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk konservasi	32,0	PT





5.26	Identifikasi tingkat kesesuaian pelaksanaan BLU TN berdasarkan tipologi karakteristik TN yang ada di Indonesia	24,0	PS
5.27	Dukungan terhadap pengelola TN dalam menyusun dan mengelola model bisnis	32,0	PS
5.28	Koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan para pihak di tingkat tapak, termasuk dukungan dan komitmen dari Pemerintah daerah untuk konservasi	32,0	PT
5.29	Kajian mekanisme pembagian biaya manfaat dari Balai atau BLU TN selaku pihak pengelola kawasan TN kepada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan dana konservasi	29,0	PT

Rataan Bobot USG didasarakn pada penilaian 7 orang panellist E-PASS. Selang nilai: 7 – 35.

Nilai 7 – 16: Prioritas Rendah (PR); 17 – 26: Prioritas Sedang (PS); 27 – 35 : Prioritas Tinggi (PT)



ISBN 978-602-99677-8-4 (PDF)



9 786029 967784